IMPLEMENTASI PROGRAM STASIUN PENGISIAN LISTRIK UMUM (SPLU) BEJI LINTAR

(STUDI PADA PT PLN (PERSERO) DISTRIBUSI JAKARTA RAYA AREA CIRACAS)

SKRIPSI

Diajukan untuk menempuh ujian sarjana
pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

Disusun Oleh:
GIOVEDI WIBISANNA
NIM. 135030107113010



UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
MALANG
2017

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

MOTTO

Tidak Ada Kekayaan yang Melebihi Akal dan Tidak Ada

Kemelaratan yang Melebihi Kebodohan

(Giovedi Wibisanna)

Baik Menjadi Orang Penting, tetapi Jauh Lebih Penting Menjadi

Orang Baik

(Jenderal Hoegeng)

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul	: IMPLEMENTASI PROGRAM STASIUN PENGISIAN LISTRIK UMUM (SPLU) BEJI LINTAR (Studi Pada PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya Area Ciracas)
Disusun oleh	: Giovedi Wibisanna
NIM	: 135030107113010
Fakultas	: Ilmu Administrasi
Jurusan	: Ilmu Administrasi Publik
Konsentrasi	: -

Malang, 7 Februari 2017

Komisi Pembimbing

Ketua	Anggota
Dr. Imam Hanafi, M.Si, MS	**Dr. Ratih Nur Pratiwi, M. Si**
NIP. 196910021998021001	**NIP. 195308071979032001**

TANDA PENGESAHAN

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada :

Hari : Sabtu

Tanggal : 4 Maret 2017

Jam : 08.00 WIB

Skripsi atas nama : Giovedi Wibisanna

Judul : Implementasi Program Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) Beji Lintar (Studi Pada PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya Area Ciracas)

Dan dinyatakan **LULUS**

MAJELIS PENGUJI

Ketua	Anggota
Dr. Imam Hanafi, M.Si, MS	**Dr. Ratih Nur Pratiwi, M.Si**
NIP. 19691002 199802 1 001	**NIP. 19530807 197903 2 001**
Anggota	Anggota
Dr. Sarwono, M.Si	**Martina Purwaning Diah, S.AP., M.AP**
NIP. 19570909 198403 1 002	**NIP. 2013048503212001**

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, didalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Malang, 17 Februari 2017

Mahasiswa



Nama: Giovedi Wibisanna
NIM:135030107113010

repository.ub.ac.id

RINGKASAN

Giovedi Wibisanna, 2017. **Implementasi Program Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) Beji Lintar (Studi pada PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya Area Ciracas)**, Dr. Imam Hanafi, M.Si, MS., Dr. Ratih Nur Pratiwi, M. Si. 207 Hal + xvi

Program Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) Beji Lintar merupakan program dari PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya Area Ciracas. Program SPLU Beji Lintar pada dasarnya dijalankan oleh PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya Area Ciracas, PT Tri Tunggal (vendor) dan PT Tangguh Jaya (vendor). Diharapkan Implementasi Program SPLU Beji Lintar dapat mengurangi praktik pencurian listrik di tempat-tempat umum sehingga dapat berdampak pada menurunya susut (*losses*) non teknis distribusi.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang berlokasi di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, sedangkan situsnya berada di PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya Area Ciracas. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi dan observasi. Instrumen penelitian yang digunakan antara lain peneliti sendiri, pedoman wawancara dan catatan lapangan. Sedangkan analisis data dalam penelitian ini melalui kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles, Huberman dan Saldana dalam Rini Lestari, 2015: 473).

Dari hasil penelitian menunjukan bahwa (1) implementasi program SPLU Beji Lintar telah dilaksanakan secara maksimal melalui peran aktif dan partisipasi aktor-aktor yang terlibat serta dukungan dari pedagang kaki lima dan masyarakat pada umumnya. (2) faktor-faktor yang mempengaruhi, yaitu antara lain faktor pendukung yang meliputi adanya sumber daya manusia yang profesional, adanya pembagian tugas-tugas dan kewajiban yang memadai dalam pelaksanaan program, dan adanya kesadaran masyarakat untuk ikut berpartisipasi terhadap program ini. Sedangkan faktor penghambat yaitu meliputi pengaruh cuaca pada saat pemasangan dan penentuan lokasi SPLU Beji Lintar.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah upaya menghilangkan kebiasaan masyarakat yang sering melakukan praktik pencurian listrik di wilayah kerja PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya Area Ciracas ini sudah dijalankan dengan baik dan berjalan lancar, adanya sumber daya manusia yang profesional dan peran aktif dari partisipasi masyarakat membuat implementasi program SPLU Beji Lintar dapat tercapai sesuai tujuan. Namun, apabila melihat faktor penghambat yang ada, upaya pembangunan SPLU Beji Lintar yang sesuai tujuan di PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya Area Ciracas belum maksimal, karena masih terdapat kendala cuaca pada saat pemasangan dan penentuan lokasi Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) Beji Lintar.

Kata Kunci: implementasi program, stasiun pengisian listrik umum, beji lintar

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

repository.ub.ac.id

SUMMARY

Giovedi Wibisanna, 2017. **Implementation Program of General Electric Charging Station (GECS) Beji Lintar (Studies at PT PLN (Persero) Distribution Area Jakarta Raya Ciracas)**, Dr. Imam Hanafi, M.Si, MS., Dr. Ratih Nur Pratiwi, M. Si. 207 Hal + xvi

General Electric Charging Station Program (GECS) Beji Lintar is a program of PT PLN (Persero) Distribution Area Jakarta Raya Ciracas. Program of GECS Beji Lintar is basically run by PT PLN (Persero) Distribution Area Jakarta Raya Ciracas, PT Tri Tunggal (vendor) and PT Tangguh Jaya (vendor). Expected Implementation Program GECS Beji Lintar practices can reduce electricity theft in public places so that they can have an impact on the decrease of shrinkage (losses) of non-technical distribution.

This research uses qualitative research with descriptive approach which is located in Jakarta Special Capital Region, while the site is in PT PLN (Persero) Distribution Area Jakarta Raya Ciracas. The technique of collecting data through interviews, documentation and observation. The research instruments used include researchers themselves, interview and field notes. Then, to analyze the data, this research using data condensation, data presentation, and conclusion (Miles, Huberman and Saldana in Rini Lestari, 2015: 473).

The results showed that (1) the implementation of Beji Lintar GECS program has been implemented to the fullest through active involvement and participation of the actors involved as well as the support of vendors and the public in general. (2) the factors that affect, among other contributing factors that include their human resources professionals, the division of tasks and responsibilities adequately in the implementation of the program, and their awareness of the community to participate in this program. While the inhibiting factors which include the effects of weather at the time of installation and siting GECS Beji Lintar.

The conclusion of this study is an attempt to eliminate customs of the people who frequent the practice of theft of electricity in the region of PT PLN (Persero) Distribution Area Jakarta Raya Ciracas have been run well and running smoothly, the human resources professional and the active role of community participation makes Beji Lintar GECS program implementation can be achieved as intended. However, when viewed factors that exist, the development effort GECS Beji Lintar appropriate destination in PT PLN (Persero) Distribution Area Jakarta Raya Ciracas not maximized, because there were limited weather at the time of installation and determining the location of General Electric Charging Station (GECS) Beji Lintar.

Keywords: implementation, public electric charging stations, beji lintar

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **"Implementasi Program Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) Beji Lintar (Studi pada PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya Area Ciracas)"**.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana Ilmu Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini peneliti menyampaikan ucapan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
2. Dr. Choirul Saleh, M.Si selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
3. Drs. Mintohadi, M.Si selaku Sekertaris Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
4. Dr. Dra. Lely Indah Mindarti, M.Si selaku Ketua Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

5. Dr. Sarwono, M.Si selaku Koordinator Program Studi Administrasi Publik.
6. Moh. Said, S.Sos., M.AP selaku Sekertaris Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
7. Dr. Imam Hanafi, S.Sos, M.Si selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, pengarahan, dan motivasi kepada peneliti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
8. Dr. Ratih Nur Pratiwi, M. Si selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, pengarahan, dan motivasi kepada peneliti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
9. PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya Area Ciracas yang telah memudahkan dalam memberikan data dan informasi terkait penelitian.
10. Kedua orang tua dan kedua kakak yang selalu memberikan doa, motivasi dan dukungan dari jauh demi kelancaran penyelesaian skripsi.
11. Teman-teman seperjuangan di Program Studi Administrasi Publik Universitas Brawijaya yang selalu menyemangati satu sama lain.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat peneliti harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangsih yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Malang, 17 Februari 2017

Peneliti

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... i.
MOTTO ..... ii.
TANDA PERSETUJUAN ..... iii.
TANDA PENGESAHAN ..... iv.
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI ..... v.
RINGKASAN ..... vi.
SUMMARY ..... vii.
KATA PENGANTAR ..... viii.
DAFTAR ISI ..... x.
DAFTAR TABEL ..... xiv.
DAFTAR GAMBAR ..... xv.
DAFTAR LAMPIRAN ..... xvi.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang ..... 1.
1.2 Rumusan Masalah ..... 10.
1.3 Tujuan Penelitian ..... 10.
1.4 Kontribusi Penelitian ..... 11.
1.5 Sistematika Pembahasan ..... 11.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu ..... 14.
2.2 Administrasi Publik ..... 22.
2.2.1 Pengertian Administrasi Publik ..... 22.
2.2.2 Ruang Lingkup Studi Administrasi Publik ..... 25.
2.2.3 Prinsip-Prinsip Administrasi ..... 27.
2.2.4 Paradigma Administrasi Publik ..... 28.

2.3 Kebijakan Publik ..... 38.
2.3.1 Pengertian Kebijakan Publik ..... 38.
2.3.2 Tahap-Tahap Kebijakan Publik ..... 44.
2.3.3 Aktor dan Pelaku Pembuatan Kebijakan Publik ..... 46.
2.3.4 Permasalahan dalam Kebijakan Publik ..... 50.
2.4 Implementasi Kebijakan ..... 53.
2.4.1 Konsep Implementasi Kebijakan ..... 53.
2.4.2 Implementasi Program ..... 55.
2.4.3 Model Pendekatan dan Tahapan Proses Implementasi Kebijakan ..... 61.
2.4.4 Faktor Penentu Dilaksanakan atau Tidaknya Suatu Kebijakan Publik ..... 66.
2.4.5 Faktor Penghambat dan Fakor Pendukung Implementasi Kebijakan ..... 68.
2.4.6 Komunikasi ..... 70.
2.4.7 Sumber-Sumber ..... 71.
2.5 Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) Beji Lintar ..... 76.
2.6 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ..... 78.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian ..... 81.
3.2 Fokus Penelitian ..... 82.
3.3 Lokasi dan Situs Penelitian ..... 83.
3.4 Jenis dan Sumber Data ..... 83.
3.5 Teknik Pengumpulan Data ..... 84.
3.6 Instrumen Penelitian ..... 86.
3.7 Keabsahan Data ..... 87.
3.8 Analisis Data ..... 89.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi dan Situs Penelitian ..... 91.

4.1.1 Gambaran Umum Daerah Khusus Ibukota Jakarta ..... 91.
4.1.1.1 Kondisi Geografis ..... 91.
4.1.1.2 Klimatologi ..... 93.
4.1.1.3 Topografi ..... 93.
4.1.1.4 Kependudukan ..... 94.
4.1.2 Gambaran Umum Kota Jakarta Timur ..... 96.
4.1.2.1 Kondisi Geografis ..... 96.
4.1.2.2 Pemerintah dan Ketertiban ..... 97.
4.1.2.3 Ketenagakerjaan ..... 98.
4.1.2.4 Kondisi Sosial Kependudukan ..... 98.
4.1.3 Gambaran Umum PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya Area Ciracas ..... 100.
4.1.3.1 Profil PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya Area Ciracas ..... 100.
4.1.3.2 Visi dan Misi PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya Area Ciracas ..... 101.
4.1.3.3 Struktur Organisasi PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya Area Ciracas ..... 102.
4.1.3.4 Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab ..... 105.
4.2 Penyajian Data dan Fokus Penelitian ..... 111.
4.2.1 Implementasi Program Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) Beji Lintar di PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya Area Ciracas. ..... 111.
a. Aktor dan Pelaku dalam Implementasi Program Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) Beji Lintar ..... 118.
b. Tujuan dan Sasaran Program ..... 124.
c. Sumber Daya ..... 131.
d. Sosialisasi Program ..... 136.
e. Proses Tahapan Implementasi Program ..... 139.
4.2.2 Faktor Penghambat dan Pendukung dari Implementasi Program Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) Beji Lintar di PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya Area Ciracas ..... 142.
a. Faktor Pendukung ..... 142.
b. Faktor Penghambat ..... 146.

4.3 Analisis Data ..... 149.

4.3.1 Implementasi Program Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) Beji Lintar di PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya Area Ciracas. ..... 149.

a. Aktor dan Pelaku dalam Implementasi Program Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) Beji Lintar ..... 155.
b. Tujuan dan Sasaran Progam ..... 159.
c. Sumber Daya ..... 163.
d. Sosialisasi Program ..... 167.
e. Proses Tahapan Implementasi Program ..... 171.

4.3.2 Faktor Penghambat dan Pendukung dari Implementasi Program Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) Beji Lintar di PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya Area Ciracas. ..... 173.

a. Faktor Pendukung ..... 173.
b. Faktor Penghambat ..... 177.

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan ..... 180.

5.2 Saran ..... 182.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1. Jumlah Kebutuhan Listrik Tahun 2016 per Regional ..... 3.

Tabel 2. Susut (*losses*) Non Teknis Bulan Januari-Oktober 2016 ..... 4.

Tabel 3. Unit-Unit Pelaksana PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya .... 7.

Tabel 4. Perbandingan Antara Administrasi Publik Klasik (*Old Public Management*), NPM, dan NPS ..... 36.

Tabel 5. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin, Rasion Jenis Kelamin pada Kabupaten/Kota Administrasi, 2012 ..... 94.

Tabel 6. Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota Administrasi, 2011 – 2012..... 95.

Tabel 7. Luas Wilayah, Penduduk dan Kepadatan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota Administrasi, 2012 ..... 95.

Tabel 8. Luas Daerah Jakarta Timur per Kecamatan ..... 97.

Tabel 9. Pertumbuhan Penduduk Jakarta Timur..... 99.

Tabel 10. Jumlah Kepadatan Penduduk Jakarta Timur ..... 99.

Tabel 11. Jumlah Hunian di Jakarta Timur 2012 ..... 100.

Tabel 12. Alamat Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) Beji Lintar di PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya Area Ciracas ..... 116.

Tabel 13. Jenjang Pendidikan Pegawai PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya Area Ciracas..... 133.

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1. Kedekatan prosedur analisis kebijakan dengan tipe-tipe pembuatan kebijakan ..... 43.

Gambar 2. Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) Beji Lintar ..... 77.

Gambar 3. Peta Daerah Khusus Ibukota Jakarta ..... 92.

Gambar 4. Struktur Organisasi PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya Area Ciracas ..... 104.

Gambar 5. Kondisi sebelum adanya Program Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) Beji Lintar ..... 113.

Gambar 6. Sosialisasi Program Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) Beji Lintar ..... 138.

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

Lampiran 1. Pedoman Wawancara ..... 188.

Lampiran 2. Surat Keterangan Telah Melakukan Riset ..... 191.

Lampiran 3. Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor: 0017.P/DIR/2015 tentang Program Peningkatan dan Pengendalian Penjualan Tenaga Listrik ..... 192.

Lampiran 4. Dokumentasi Penelitian ..... 204.

Lampiran 5. Curriculum Vitae ..... 207.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 **Latar Belakang**

Pelayanan publik adalah segala bentuk jasa pelayanan baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan. Menurut Kurniawan dalam Sinambela (2014: 5) pelayanan publik diartikan "pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan". Sedangkan menurut Kepmen PAN No. 63/2003, pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Listrik merupakan suatu kebutuhan penting bagi masyarakat, karena pada zaman modern sebagian besar alat pendukung kehidupan manusia membutuhkan aliran tenaga listrik seperti; mesin cuci, komputer, lampu dan lain sebagainya. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, bahwa tenaga listrik mempunyai peran yang sangat penting dan strategis dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional maka usaha penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara dan penyediaannya perlu terus ditingkatkan sejalan dengan perkembangan pembangunan agar tersedia tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, merata, dan bermutu. Selain itu, di dalam Undang-Undang

tersebut juga dijelaskan bahwa usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dapat dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), koperasi, swasta dan swadaya masyarakat, yang meliputi usaha pembangkitan, transmisi, distribusi, usaha penjualan tenaga listrik dan usaha penyediaan tenaga listrik terintegrasi.

Sampai kondisi saat ini tepatnya pada tahun 2016, usaha penyediaan tenaga listrik di Indonesia masih dimonopoli oleh PT PLN (Persero) selaku Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang menyelenggarakan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum secara terintegrasi, mulai dari fungsi pembangkitan listrik, transmisi dan distribusi tenaga listrik.

Konsumsi listrik di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya sejalan dengan peningkatan pertumbuhan penduduk dan ekonomi nasional. Semakin tinggi daya beli dan konsumsi publik, maka semakin tinggi pula tingkat penggunaan listriknya. Dengan kata lain pembangunan bidang kelistrikan harus dapat mengimbangi kebutuhan tenaga listrik yang akan terus meningkat tiap tahunnya. Oleh sebab itu, untuk menyalurkan tenaga listrik secara ekonomis maka perlu dibuat suatu perencanaan dari jauh hari sebelum kebutuhan tenaga listrik itu sendiri terjadi.

Data mengenai jumlah kebutuhan listrik negara Indonesia tahun 2016 diatur dan direncanakan di dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No. 5899 K/20/MEM/2016 tentang Pengesahan Rencana

Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) tahun 2016 s/d 2025. Adapun uraian untuk tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Jumlah Kebutuhan Listrik Tahun 2016 per Regional

No	Regional	Kebutuhan Listrik (Twh)
1	Jawa dan Bali	162
2	Sumatera dan Aceh	32
3	Indonesia Timur (Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua)	23
Jumlah		217

Sumber: Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) Tahun 2016 s/d 2025

Tabel diatas menunjukkan data mengenai jumlah kebutuhan listrik tahun 2016 per regional. Data diatas dapat menjadi acuan bahwa sebagai pelaku usaha di bidang ketenagalistrikan, PT PLN (Persero) mempunyai kewajiban untuk menyediakan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup kepada masyarakat di seluruh Indonesia secara terus menerus, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Hal tersebut selaras dengan prinsip PT PLN (Persero) yaitu melayani kebutuhan tenaga listrik untuk seluruh masyarakat di wilayah Indonesia.

PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya merupakan salah satu unit Distribusi yang ada dibawah PT PLN (Persero). PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya mempunyai tugas untuk melayani pendistribusian listrik di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Sepanjang tahun 2016 tepatnya pada bulan Januari hingga bulan Oktober, PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya mencatat terdapat

pelanggaran pemakaian tenaga listrik atau sering disebut dengan susut (*losses*) non teknis yang menyebabkan kerugian sebanyak 1.879.979.669 kwh. Menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 431/KMK.06/2002, susut (*losses*) adalah sejumlah energi yang hilang dalam proses pengaliran energi listrik mulai dari Gardu Induk sampai dengan konsumen. Apabila tidak terdapat gardu induk, susut (*losses*) dimulai dari gardu distribusi sampai dengan konsumen. Susut (*losses*) diakibatkan oleh dua faktor yaitu faktor teknis dan faktor non teknis. Faktor teknis adalah kwh meter yang sudah rusak atau macet. Sedangkan faktor non teknis adalah pelanggaran atau pencurian listrik. Adapun rincian susut (*losses*) non teknis pada bulan Januari hingga bulan Oktober tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Susut (*losses*) Non Teknis bulan Januari-Oktober 2016

No	Bulan	Susut (kwh)
1	Januari	216.295.654
2	Februari	127.312.768
3	Maret	224.398.077
4	April	201.888.560
5	Mei	215.618.687
6	Juni	174.655.848
7	Juli	165.436.197
8	Agustus	192.746.333
9	September	178.505.185
10	Oktober	183.122.360
Jumlah		1.879.979.669

Sumber: Laporan Neraca Energi PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya Nomor: 309-10 Tahun 2016

Tabel diatas menunjukkan jumlah susut (*losses*) non teknis dari bulan Januari hingga bulan Oktober tahun 2016. Bila diperhatikan dari tabel diatas, bahwa setiap bulannya susut (*losses*) non teknis mengalami fluktuasi tetapi jika dijumlahkan secara keseluruhan jumlahnya terbilang cukup besar, yaitu sebesar 1.879.979.669 kwh. Jika dikalikan dengan harga tarif layanan khusus saat ini adalah sekitar Rp 1.644,52/kwh, maka jumlah kerugian yang dialami PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya selama bulan Januari hingga bulan Oktober tahun 2016 adalah sekitar Rp 3.091.664.165.263,88.

PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya mengambil langkah serius untuk mengurangi jumlah susut (*losses*) non teknis pada wilayah kerjanya. Salah satu langkah yang dilakukan oleh PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya adalah dengan membuat suatu program, yaitu Program Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) Beji Lintar. Program Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) Beji Lintar dijalankan atas dasar inisiatif PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya untuk menggurangi pelanggaran pemakaian tenaga listrik atau sering disebut dengan susut (*losses*) non teknis. Program tersebut mulai dijalankan sejak bulan April tahun 2016.

Dasar hukum program tersebut mengacu pada Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor: 0017.P/DIR/2015 tentang Program Peningkatan dan Pengendalian Penjualan Tenaga Listrik, tepatnya pada Pasal 12 ayat 2 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik Non Konsumen. Dalam Pasal 12 ayat 2 menyebutkan bahwa Unit PLN dapat memasang APP sistem prabayar untuk penggunaan khusus seperti pasar malam, pedagang kaki lima, kegiatan

umum/sosial (lapangan olah raga), pos ronda atas nama PLN setepat (IDPEL PLN) dengan daya dibatasi maksimum 5500 VA dan dikenakan tarif Layanan Khusus TR dengan faktor pengali N=1.

Tujuan diimplementasikannya Program Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) Beji Lintar adalah agar para Pedagang Kaki Lima (PKL) dan masyarakat pada umumnya dapat memanfaatkan listrik secara terbuka untuk segala keperluan pribadi, selain itu juga untuk mengurangi praktik pencurian listrik. Tujuan tersebut ingin dicapai karena sebelum adanya Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) Beji Lintar banyak para pedagang yang menggunakan sumber listrik dari rumah warga, genset, atau bahkan menggunakan listrik secara ilegal dengan mencantolkan ke tiang listrik secara langsung. Selain merugikan perusahaan dan negara, hal tersebut juga dapat membahayakan para pedagang dan masyarakat sekitar karena instalasi dan alat yang digunakan tidak sesuai standard sehingga rawan kebakaran.

Nama Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) Beji Lintar diambil dari Beji yang dalam bahasa betawi artinya sumber, dan Lintar merupakan akronim dari Listrik Pintar. Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) Beji Lintar terbagi menjadi 2 tipe, yaitu tipe standing dengan kapasitas 4 kwh dan tipe hook dengan kapasitas 2 kwh. SPLU Beji Lintar bersifat prabayar dengan menggunakan token. Cara menggunakan SPLU terbilang cukup praktis dan mudah. Pertama-tama, pelanggan harus mencatat nomor ID pelanggan yang tertera pada Box Beji Lintar. Kedua, pelanggan dapat membeli pulsa listrik di ATM, *Internet Banking, Mobile Banking,* Indomaret/Alfamart terdekat. Selanjutnya, pelanggan dapat memasukkan nomor

token, dan SPLU dapat digunakan dengan cara disambungkan ke alat elektronik penggunanya.

PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya mengimplementasikan Program Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) Beji Lintar ke sejumlah kawasan legal PKL di seluruh wilayah DKI Jakarta. Dalam hal ini, definisi kawasan legal PKL adalah kawasan yang di ijinkan Pemerintah Daerah DKI Jakarta sebagai tempat berjualan pedagang non permanen atau paruh waktu. PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya dalam hal ini menugaskan kepada unit pelaksana yaitu Manajer Area untuk melaksanakan survey pendataan kawasan legal Pedagang Kaki Lima (PKL) dan melakukan pemasangan Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) Beji Lintar di wilayah kerjanya. Adapun unit-unit pelaksana pada PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya dapat dilihat pada tabel 3 dibawah ini:

Tabel 3. Unit-Unit Pelaksana PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya

No	Nama Area
1	PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya Area Ciracas
2	PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya Area Menteng
3	PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya Area Bandengan
4	PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya Area Cempaka Putih
5	PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya Area Jatinegara
6	PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya Area Pondok Kopi
7	PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya Area Tanjung Priok
8	PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya Area Marunda
9	PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya Area Bulungan
10	PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya Area Bintaro
11	PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya Area Kebun Jeruk
12	PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya Area Ciputat

13	PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya Area Kramat Jati
14	PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya Area Lenteng Agung
15	PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya Area Pondok Gede
16	PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya Area Cengkareng

Sumber: Dokumentasi PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya

PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya Area Ciracas merupakan salah satu unit pelaksana yang ada dibawah PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya. PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya Area Ciracas mempunyai peran yang sangat penting, hal itu dikarenakan PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya Area Ciracas merupakan aktor pelaksana yang berhubungan secara langsung dengan Pedagang Kaki Lima (PKL) dan masyarakat.

Menurut hasil survey lokasi layanan khusus PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya Area Ciracas untuk Pedagang Kaki Lima Binaan Pemerintah Daerah DKI Jakarta pada Maret 2016, jumlah Pedagang Kaki Lima (PKL) binaan yang masuk wilayah kerja PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya Area Ciracas adalah sekitar 150 Pedang Kaki Lima (PKL). Jumlah PKL binaan tersebut terbagi dibeberapa lokasi, yang pertama terletak di Jalan Raya Bogor km 27 dengan jumlah sebanyak 37 PKL, yang kedua terletak di samping Pom Bensin Jalan Raya Ceger dengan jumlah sebanyak 24 PKL, yang ketiga terletak di Jalan Raya Munjul dengan jumlah sebanyak 21 PKL, yang keempat terletak di Jalan Baret Biru dengan jumlah sebanyak 20 PKL, yang kelima terletak di Jalan Raya Hankam dengan jumlah sebanyak 33 PKL, yang keenam terletak di depan Masjid Al-Fallah Jalan Raya Bambu Apus dengan jumlah sebanyak 15 PKL. Dari ke enam lokasi PKL binaan tersebut, PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya Area Ciracas hanya

menyediakan Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) Beji Lintar di tiga lokasi. Ketiga lokasi yang disediakan Stasiun Pengisian Listrik Umum (Beji Lintar) adalah di Jalan Raya Bogor km 27, Jalan Raya Hankam, dan di depan Masjid Al-Fallah Jalan Raya Bambu Apus. Selain ketiga lokasi PKL binaan tersebut, PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya Area Ciracas juga menyediakan Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) Beji Lintar di lokasi PKL non binaan.

Berdasarkan hasil observasi penulis terhadap objek penelitian didapatkan beberapa indikasi permasalahan seperti; Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) Beji Lintar terbilang kurang praktis, karena penggunanya harus membeli pulsa listrik terlebih dahulu. Tidak konsistennya PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya Area Ciracas yang hanya memasang 2 kwh pada tipe standing, padahal pada tipe standing mampu menampung 4 kwh. Kelompok sasaran dari Program Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) Beji Lintar masih terbilang rancu, fungsinya untuk fasilitas umum tetapi hampir secara keseluruhan lokasi Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) Beji Lintar di letakkan dekat Pedagang Kaki Lima (PKL) berjualan.

Oleh sebab itu, penulis menganggap perlu untuk mengkaji lebih lanjut terkait pelaksanaan Program Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) Beji Lintar pada PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya Area Ciracas. Untuk itu berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"Implementasi Program Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) Beji Lintar (Studi pada PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya Area Ciracas)"**.

1.2 **Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah yang akan penulis bahas dalam penelitian ini agar tidak menyimpang dari judul dan isi penelitian serta untuk mempertajam materi pembahasan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Program Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) Beji Lintar di PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya Area Ciracas?
2. Apa Faktor Penghambat dan Pendukung dari Implementasi Program Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) Beji Lintar di PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya Area Ciracas?

1.3 **Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan, menganalisis, serta mengintrepretasikan secara mendalam dan menyeluruh tentang:

1. Implementasi Program Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) Beji Lintar di PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya Area Ciracas.
2. Faktor Penghambat dan Pendukung dari Implementasi Program Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) Beji Lintar di PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya Area Ciracas.

1.4 **Kontribusi Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi atau kegunaan baik secara teoritis maupun praktis, serta berguna bagi pihak terkait antara lain:

1. Secara Teoritis
   a. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai pemikiran dan pengembangan kajian ilmu administrasi pada umumnya dan ilmu administrasi pada khususnya.
   b. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dan suatu informasi bagi kegiatan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan Implementasi Program Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) Beji Lintar.
2. Secara Praktis

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran serta masukan berupa kritik dan saran kepada PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya Area Ciracas dalam hal implementasi Program Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) Beji Lintar.

1.5 **Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan digunakan untuk mempermudah penulis mendapatkan gambaran skripsi ini. Dalam sistematika pembahasan ini, terdapat 5 bab yang akan dijelaskan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab I ini berisikan tentang pendahuluan dari proses penelitian yang berisikan tentang *pertama,* latar belakang yang mengemukakan permasalahan yang berkaitan dengan judul. *Kedua,* rumusan masalah yang merupakan kajian yang akan dibahas dalam penelitian serta yang akan menjadi fokus penelitian. *Ketiga,* tujuan penelitian dimana berisikan tentang hal-hal yang telah dicapai atau ditemukan. *Keempat*, adalah kontribusi penelitian baik secara teoritis maupun praktis. *Kelima*, adalah sistematika pembahasan yang merupakan uraian singkat dari bab-bab penulisan skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab II ini menjelaskan tentang teori-teori yang berhubungan dengan topik penelitian. Sehingga dapat mendukung dalam menganalisa dan menginterpretasikan data, teori tersebut antara lain: Administrasi Publik, Kebijakan Publik, Implementasi Kebijakan, Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) Beji Lintar dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Di awal bab ini juga dilampirkan penelitian terdahulu yang relevan dengan Implementasi Program Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) Beji Lintar di PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya Area Ciracas.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab III ini menjelaskan tentang metode penelitian, dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan analisis deskriptif. Langkah selanjutnya yaitu menentukan fokus penelitian yang diambil dari rumusan masalah.

Setelah menentukan fokus penelitian maka dilakukan pemilihan lokasi dan situs penelitian, kemudian menentukan jenis dan sumber data yang dipakai dalam penelitian. Setelah itu menentukan teknik pengumpulan data, instrument penelitian, keabsahan data dan analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab IV ini akan menjabarkan tentang gambaran umum dan data-data tentang masalah yang akan diteliti. Berkaitan dengan tujuan penelitian dan sesuai dengan fokus penelitian, data yang sudah dikumpulkan kemudian dianalisis dan di interpretasikan.

BAB V PENUTUP

Pada bab V akan membahas tentang kesimpulan dari hasil pembahasan dan saran yang dapat penulis berikan dalam permasalahan penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 **Penelitian Terdahulu**

Dasar atau acuan yang berupa teori- teori atau temuan-temuan melalui hasil berbagai penelitian sebelumnya merupakan hal yang sangat perlu dan dapat dijadikan sebagai data pendukung. Salah satu data pendukung yang menurut peneliti perlu dijadikan bagian tersendiri adalah penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang sedang dibahas dalam penelitian ini. Dalam hal ini, fokus penelitian terdahulu yang dijadikan acuan adalah terkait dengan masalah implementasi program. Oleh karena itu, peneliti melakukan langkah kajian terhadap beberapa hasil penelitian berupa tesis dan jurnal-jurnal melalui internet.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang peneliti temukan, terdapat beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini. Hasil penelitian terdahulu yang relevan dalam menunjang penelitian ini adalah:

1. Penelitian Karina Nindarwanti tahun 2012 dengan judul Implementasi Program Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta di Kota Semarang. Penelitian ini menghasilkan suatu kesimpulan bahwa secara umum Implementasai Program Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) di Kota Semarang belum berjalan dengan baik dan maksimal. Hal tersebut berdasarkan penelitian dan temuan dilapangan ditemukan beberapa kejanggalan dalam proses pelaksanaan terkait administrasi yang ada, sumber daya manusia

sebagai pelaksana program terdapat ketidak jelasan dalam pembagian tugas atau pengorganisasian serta mengikut sertakan pihak ketiga didalam susunan organisasi yang ada. Kemudian ketegasan hukum terkait sanksi-sanksi yang diberikan tidak ada transparansi antara pembuat kebijakan (implementor) dengan penerima kebijakan (konsumen/masyarakat).

2. Penelitian Adita Nugroho Pujisusilo tahun 2014 dengan judul Implementasi Program Listrik Prabayar Dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (Studi Kasus Pada PT PLN (Persero) APJ Kota Malang). Penelitian ini menghasilkan suatu kesimpulan bahwa implementasi program Listrik Prabayar dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Kota Malang yang diselenggarakan oleh PT. PLN (Persero) APJ sudah berjalan dengan baik. Penulis memberikan solusi terkait dengan implementasi Program Listrik Prabayar dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik tersebut yaitu: 1. Dihimbau agar pihak PT. PLN (Persero) lebih memperbanyak pasokan produksi kwh meter guna mencukupi kebutuhan para pelanggan PLN, 2. Perlunya suatu sosialisasi dan promosi dari pihak PT. PLN (Persero) APJ yang lebih agar lebih mendekatkan diri kepada masyarakat sehingga masyarakat terbujuk untuk bisa menggunakan listrik prabayar, 3. Program Listrik Prabayar akan berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang diinginkan apabila terjadi kerjasama yang baik antara pihak aparatur PT. PLN (Persero) APJ dengan pelanggan.

3. Penelitian Augusta Andhin Pradana tahun 2015 dengan judul Implementasi Program Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Serta Tantangan Yang Akan Dihadapi PT PLN (Persero) PLTU TJB Jepara Dalam Upaya Mepertahankan *Zero Accident*. Penelitian ini menghasilkan suatu kesimpulan bahwa pelaksanaan program keselamatan dan kesehatan kerja di PT PLN (Persero) Unit PLTU TJB Tubanan Jepara berjalan dengan sangat baik. Untuk kendala dan tantangan yang dihadapi oleh PT PLN (Persero) PLTU TJB Tubanan Jepara terkait pelaksanaan kegiatan keselamatan dan kesehatan kerja adalah menindaklanjuti ketidakdisiplinan sebagai pegawai terkait penggunaan APD dan pelanggaran aturan K3 lain seperti merokok di kawasan *plant*, dengan adanya pembuatan sistem sanksi untuk para pelanggar aturan K3, sebagai alat pengontrol penegakan disiplin. Dari segi tantangan, bentuk sosialisasi terkait aturan dan prosedur K3 untuk karyawan harus dilakukan dengan cara beragam dengan pertimbangan tingkat pendidikan dan lingkungan sosial para karyawan yang plural membuat perusahaan harus melakukan sistem pendekatan yang berbeda, agar para karyawan dapat menerima dan menjalankan aturan K3 yang sudah dibuat oleh perusahaan.
4. Penelitian Ade Maulana Putra tahun 2014 dengan judul Implementasi Program *Corporate Social Responsibility* (CSR) Berbasis *Community Development* (Studi Tentang CSR PT Greenfields Indonesia di Desa Babadan Kecamatan Ngajum, Kabupaten Malang). Penelitian ini berusaha menganalisis implementasi program CSR berbasis *Community*

Development, faktor pendorong dan penghambat program. Pelaksanaan CSR yang dilakukan oleh PT Greenfields Indonesia sudah berjalan baik. Hal ini dilihat dari komitmen tinggi dari perusahaan untuk terus memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Sejauh ini masyarakat Desa Babadan merasakan dampak dari program CSR PT Greenfields Indonesia. Namun dalam pelaksanaannya ada beberapa faktor pendorong dan penghambat yang mempengaruhi pelaksanaannya baik itu yang berasal dari internal maupun eksternal perusahaan.

5. Penelitian Muhammad Rizal tahun 2014 dengan judul Implementasi Program Mahasiswa Wirausaha dalam Menciptakan Kemandirian Mahasiswa (Studi pada Universitas Brawijaya). Program Mahasiswa Wirausaha bertujuan untuk memberikan bekal pengetahuan, keterampilan dan jiwa wirausaha (*Entrepreneurship*) berbasis IPTEKS kepada para mahasiswa agar dapat mengubah pola pikir dari pencari kerja menjadi pencipta lapangan pekerjaan serta menjadi pengusaha yang tangguh dan sukses menghadapi persaingan global. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu berusaha mendapatkan informasi menggunakan teknik wawancara mengenai Implementasi Program Mahasiswa Wirausaha (PMW) dalam menciptakan kemandirian mahasiswa. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Program Mahasiswa Wirausaha dalam Menciptakan Kemandirian Mahasiswa telah terlaksana dengan cukup baik walaupun masih banyak

faktor kendala dan kekurangan yang harus diperbaiki untuk program selanjutnya.

6. Penelitian Angga Tomy Eko Prabowo tahun 2015 dengan judul Implementasi Program *Corporate Social Responsibility* PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Distribusi Jawa Timur (Studi Pada Bina Lingkungan Bank Sampah Bintang Mangrove di Kelurahan Gunung Anyar Tambak Surabaya). Hasil penelitian ini bahwa PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Distribusi Jawa Timur sudah berhasil melaksanakan program CSR bina lingkungan berdasarkan model implementasi CSR Wibisono. Sumber daya manusianya sudah cukup bagus meskipun tidak ada struktur khusus CSR. Koordinasi dan komunikasi dari instansi-instansi yang terlibat sudah terjalin dengan baik. Instansi yang terlibat dalam pelaksanaan program CSR bina lingkungan PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Distribusi Jawa Timur adalah Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Surabaya yang mempunyai karakteristik masing-masing. Dalam penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti ditemukan bahwa dalam pelaksanaannya, Bank Sampah Bintang Mangrove di Kelurahaan Gunung Anyar Tambak Surabaya mengembangkan berbagai macam inovasi strategi pemberdayaan masyarakat, seperti program simpan pinjam dengan sampah, program bayar listrik dengan sampah, program berobat dengan sampah, program peduli lingkungan dengan sampah, program kerukunan antar warga dengan dengan sampah, penyediaan perpustakaan untuk

nasabah dan pengunjung serta galeri sampah. Program-program inovatif tersebut diwujudkan oleh Bank Sampah Bintang Magrove dalam rangka untuk semakin memberdayakan masyarakat agar mau mengelola sampah dengan lebih baik. Dalam hal ini program-program inovatif tersebut difungsikan sebagai stimulus oleh Bank Sampah Bintang Mangrove agar dapat merangsang untuk lebih peduli terhadap lingkungannya.

7. Penelitian Benny Andhika Sesa tahun 2015 dengan judul Implementasi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Pada Badan Usaha Milik Negara (Studi Kasus PT. PLN Persero Cabang Jayapura). Hasil dari penelitian ini bahwa kendala dalam penerapan Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan Pada Badan Usaha Milik Negara PT. PLN Persero Cabang Jayapura yakni kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan, sehingga masyarakat kurang mendukung Program Kemitraan dan Bina Lingkungan, baik dalam pelaksanaan program maupun berkaitan dengan pertanggungjawaban anggaran. Sesungguhnya hal itu terjadi bukan semata-mata kesalahan masyarakat, akan tetapi pihak PT. PLN Persero Cabang Jayapura sebagai fasilitator program kurang melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait program yang akan dilaksanakan. Selain itu, program Kemitraan Dan Bina Lingkungan Pada Badan Usaha Milik Negara PT. PLN Persero Cabang Jayapura telah dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang dan Peraturan yang terkait.

8. Penelitian Rima Kadim tahun 2015 dengan judul Implementasi Kebijakan Program Listrik Pintar di Kecamatan Palu Timur. Penelitian ini menghasilkan suatu kesimpulan bahwa implementasi Kebijakan Program Listrik Pintar di Kecamatan Palu Timur oleh PT. PLN (Persero) Cabang Palu Kota terdiri dari empat indikator yaitu komunikasi (*communication*), sumber daya (*resources*), disposisi (*dispotition*) dan struktur birokrasi (*bureaucratic*). Dari keempat indikator tersebut masih ada sub indikator yang masih perlu ditingkatkan yaitu sub indikator fasilitas fisik, implementor kebijakan dan sikap pembuat kebijakan yang bermuara pada penciptaan hasil yang baik.
9. Penelitian Triana Puji Rahayu tahun 2013 dengan judul Implementasi Kebijakan *E-Procurement* Untuk Mewujudkan Efisiensi dan Transparansi (Studi Pada PT PLN (Persero) area Malang). Penelitian ini menghasilkan suatu kesimpulan bahwa Implementasi kebijakan *e-procurement* di PT. PLN (Persero) Area Malang sudah dapat dikatakan baik, hal ini ditunjukkan adanya kebijakan operasional *e-procurement*, daya dukung aktor pelaksana kebijakan, proses/tahapan kebijakan *e-procurement*, sistem/aplikasi *e-procurement*, persepsi aktor dan *stakeholder* terhadap *e-procurement*, ketaatan aktor dan *stakeholder* terhadap *e-procurement* yang sesuai dengan Keputusan Direksi No. 305.K/DIR/2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa PT. PLN (Persero). Implementasi kebijakan *e-procurement* memberikan *output* yang positif terhadap efisiensi dan transparansi pengadaan barang/jasa. Efisiensi dapat dilihat dari jumlah

pengadaan, optimalisasi waktu proses pengadaan barang/jasa, peluang tatap muka antara panitia dengan CPBJ. Sedangkan transparansi dapat dilihat dari keamanan data penawaran, kejelasan prosedur dan biaya proses pengadaan barang/jasa, dan distribusi informasi pengadaan/jasa. Dalam implementasi kebijakan *e-procurement* PT. PLN (Persero) Area Malang juga terdapat kendala eksternal dan internal.

10. Penelitian Novtalin Hutasoit tahun 2013 dengan judul Tinjauan Pelaksanaan Program Tanggap Darurat Kebakaran Di Kantor Sektor Dan Pusat Listrik Paya Pasir PT PLN (Persero) Sektor Pembangkitan Medan Tahun 2013. Penelitian ini menghasilkan suatu kesimpulan bahwa pelaksanaan program sarana proteksi kebakaran aktif seperti detektor dan alarm sudah sesuai dengan ketentuan dalam Permenaker RI No.02/MEN/1983 tentang Instalasi Alarm Kebakaran Automatik, APAR sudah sesuai dengan ketentuan dalam Permenaker No.Per.04/MEN/1980 tentang Syarat-Syarat Pemasangan dan Pemeliharaan Alat Pemadam Api Ringan dan hidran sudah sesuai dengan ketentuan dalam Kepmen PU No.10/KPTS/2000 tentang Ketentuan Teknis Pengamanan Terhadap Bahaya Kebakaran Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan. Kemudian pada pelaksanaan program sarana penyelamatan jiwa dan pelaksanaan program manajemen penanggulangan keadaan darurat, sudah sesuai dengan peraturan yang terkait.

Dari beberapa contoh hasil penelitian terdahulu di atas, maka dapat digambarkan beberapa persamaan dan perbedaannya. Persamaan penelitian ini

dengan hasil-hasil penelitian sebelumnya adalah pada salah satu variabel yang digunakan dalam membahas pokok permasalahan, yaitu variabel implementasi program.

Sedangkan, perbedaan antara penelitian ini dengan hasil-hasil penelitian sebelumnya adalah pada kaitan pembahasan variabel implementasi program itu sendiri. Pada penelitian ini kajian lebih difokuskan untuk menjelaskan secara deskriptif aktor yang terlibat, tujuan program dan sumber daya dalam implementasi program Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) Beji Lintar di PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya Area Ciracas. Sementara itu, pada penelitian terdahulu menjelaskan variabel implementasi program secara mandiri yang digunakan untuk mengungkapkan atau menjelaskan secara deskriptif suatu permasalahan dalam organisasi. Pada hasil-hasil penelitian sebelumnya, variabel implementasi program juga digunakan bersama-sama dengan variabel lain untuk mengungkapkan hubungan antara variabel bebas (*independent*) maupun variabel terikat (*dependent*).

2.2 **Administrasi Publik**

2.2.1 **Pengertian Administrasi Publik**

Istilah kata "administrasi" secara etimologi berasal dari Bahasa Latin (Yunani) yang terdiri atas dua kata yaitu "*ad*" dan "*ministrate*" yang berarti "*to serve*" yang dalam Bahasa Indonesia berarti "membantu, melayani, atau memenuhi". Menurut Indradi (2010: 2), administrasi adalah suatu kegiatan yang bersifat memberikan pelayanan atau servis sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh yang memberikan tugas, kewajiban dan tanggungjawab kepadanya.

Kata "administrasi" juga berasal dari kata "*administration*" (*to administer*). Kata *to administer* dapat berarti *to manage* (mengelola) dan *to direct* (menggerakan). Ini berarti administrasi merupakan kegiatan mengelola atau menggerakan (Indradi, 2010: 1). Menurut Siagian dalam Syafri (2012: 9), administrasi didefinisikan sebagai keseluruhan proses kerja sama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Secara konseptual "administrasi" merupakan sarana untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan melalui usaha kelompok. Sebagai suatu konsep, administrasi adalah *Universal Application*. Administrasi ada bersamaan dengan munculnya *human race* dan akan terus dipakai selama umat manusia masih hidup (Zauhar, 1992: 6).

Administrasi merupakan alat dan bukan merupakan tujuan. Dengan demikian, maka tujuan akhir administrasi tidak berbeda dengan tujuan akhir organisasi. Administrasi diciptakan untuk melayani organisasi dan keberadaannya tidak untuk keperluan lain (Zauhar, 1992: 6). Menurut Indradi (2010: 20):

> Organisasi sebagai unsur administrasi memberi pengertian bahwa didalamnya ada suatu proses yang dimulai dari penyusunan bentuk dan pola usaha kerjasama, penggolongan kerja yang harus dijalankan, pembagian wewenang dari masing-masing pelaksana dan menentukan hubungan kerjasama yang seimbang serta tanggungjawab.

Sejalan dengan pendapat tersebut, menurut Zauhar (1992: 7) bahwa tidak ada organisasi yang sukses dalam mencapai tujuannya tanpa dukungan administrasi yang efektif. Dalam konteks yang agak luas, pencapaian tujuan sosial, politik,

ekonomi, militer atau keagamaan dari suatu organisasi sangat tergantung pada administrasi yang efisien.

Publik merupakan terjemahan dari bahasa inggris "*Public*". Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Pustaka dalam Indradi (2010: 110) publik diartikan, orang banyak (umum); semua orang yang datang (menonton, mengunjungi dan sebagainya). Sedangkan menurut Syafi'ie dkk dalam Pasolong (2011: 6) publik adalah sejumlah manusia yang memiliki kesamaan berpikir, perasaan, harapan, sikap dan tindakan yang benar dan baik berdasakan nilai-nilai norma yang mereka miliki.

Setelah mengetahui definisi atau pengertian "administrasi" dan "publik", maka selajutnya akan dijelaskan pengertian administrasi publik. Semakin banyaknya orang yang tertarik pada ilmu administrasi, maka akan semakim banyak variasi definisi yang diberikannya. Salah satu penyebab terjadinya variasi beragam itu adalah latar belakang pendidikan perumus yang berbeda.

Istilah Administrasi Negara berasal dari bahasa latin *administrate* yang dalam bahasa Belanda diartikan sama dengan *besturen* yang berarti fungsi pemerintah. Menurut Chandler dan Plano dalam Indradi (2010: 114) administrasi publik adalah proses dimana sumberdaya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola (*manage*) keputusan-keputusan dalam kebijakan publik.

Dasar dan tujuan daripada administrasi adalah sesuai dengan dasar dan tujuan administrasi Negara Indonesia adalah sesuai dengan dasar Negara Kesatuan

Republik Indonesia adalah tercapainya kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial (Sjamsuddin, 2014: 23). Menurut Sjamsuddin (2014: 23), dalam penyelenggaraan administrasi negara yang baik diperlukan:

1. *Social participation* (ikut sertanya rakyat dalam administrasi).
2. *Social responsibility* (pertanggungjawaban administrator)
3. *Social support* (dukungan dari rakyat pada administrasi negara)
4. *Social control* (pengawasan dari rakyat kepada kegiatan administrasi negara)

Berdasarkan beberapa penjelasan diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa administrasi publik adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan aparatur negara atau pemerintah untuk mencapai tujuan negara secara efisien.

2.2.2 **Ruang Lingkup Studi Administrasi Publik**

Permasalahan yang dihadapi studi administrasi publik bersifat multidimensi, dalam arti meliputi seluruh aspek hidup dan kehidupan masyarakatnya, mulai dari yang bersifat fisik materil sampai kepada yang bersifat mental spiritual, serta mulai dari yang bersifat individual sampai yang bersifat sosial kemasyarakatan (Syafri, 2012: 114).

Untuk dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi itu, administrasi publik memerlukan bantuan dari cabang ilmu pengetahuan yang lain. Oleh karena itu, ruang lingkup studi administrasi publik bersifat multidisiplin. Menurut Syafri (2012: 114):

> Permasalahan yang dihadapi lebih lanjut adalah dimensi permasalahan yang perlu mendapat penanganan prioritas. Untuk menjawab hal tersebut, administrasi publik harus terlebih dahulu memahami kaitan seluruh permasalahan yang dihadapi agar diperoleh tinjauan yang menyeluruh. Artinya, mampu memahami kaitan masalah yang satu dengan masalah yang

lain. Untuk memperoleh gambaran permasalahan yang menyeluruh, administrasi publik harus mempergunakan pendekatan *integrated approach* (*unified approach*).

Secara lebih rinci Lembaga Administrasi Negara dalam Syafri (2012: 115-116) menyebutkan bahwa sebagai suatu disiplin dan sistem, ruang lingkup administrasi publik meliputi hal-hal berikut:

1. *Tata nilai*: menyangkut nilai kultural, spiritual, etika, falsafah hidup yang menjadi dasar dan tujuan serta acuan perilaku dari sistem dan proses administrasi publik.
2. *Organisasi pemerintahan negara*: terdiri dari organisasi lembaga eksekutif (pemerintah), legislatif (badan perwakilan rakyat), yudikatif (badan peradilan), dan lembaga-lembaga negara lainnya yang diperlukan serta saling hubungannya dalam rangka penyelenggaraan negara, termasuk organisasi kesekretariatan lembaga-lembaga tersebut.
3. *Manajemen pemerintahan negara*: meliputi kegiatan pengelolaan pelaksanaan tugas pemerintahan umum dan pembangunan dalam berbagai bidang kehidupan dan wilayah pemerintahan, merupakan pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen pemerintahan, seperti pengelolaan kebijakan, perencanaan, pembiayaan, pelaksanaan, pengendalian, pelayanan, pengawasan, dan pertanggungjawaban hasil-hasilnya dari setiap atau keseluruhan organisasi pemerintahan negara.
4. *Sumber daya aparatur*: sumber daya manusia sebagai unsur dominan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan negara, pengelolaan dan pembinaannya mendapatkan perhatian dalam keseluruhan aspek dan dimensinya, mulai dari *recruitment*, pengembangan kompetensi, pengembangan karier, dan kesejahteraan serta pemensiunannya.
5. *Sistem dan proses kebijakan negara*: sebagai sistem dan proses kebijakan negara, peran administrasi publik terutama dalam fungsi dan proses: (a) perumusan kebijakan; (b) penetapan kebijakan; (c) pelaksanaan kebijakan; (d) pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan; (e) penilaian hasil (evaluasi kinerja) pelaksanaan berbagai kebijakan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat (sosial, ekonomi, politik, hukum, agama, lingkungan hidup, dan lain sebagainya).
6. *Posisi, kondisi, dan peran masyarakat bangsa dalam bernegara*: negara didirikan oleh rakyat bangsa untuk mencapai tujuan bersama sehingga rakyatlah pemilik kedaulatan. Dengan demikian, organisasi dan manajemen pemerintahan tidak dapat mengabaikan aspirasi dan peran masyarakat atau rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan negara.
7. *Hukum administrasi publik*: menyangkut dimensi hukum yang bertalian dengan pengaturan sistem dan proses penyelenggaraan negara, termasuk mengenai eksistensi, tugas, fungsi lembaga-lembaga pemerintahan negara, saling hubungannya satu dengan yang lain dimaksudkan agar

kelembagaan negara tersusun dan terselenggara secara efisien, proporsional, efekti, dan *legitimate*.

2.2.3 **Prinsip-Prinsip Administrasi**

Herbert Simon dalam Pasolong (2011: 14) membagi empat prinsip-prinsip administrasi yang lebih umum:

1. Efisiensi administrasi dapat ditingkatkan melalui suatu spesialisasi tugas dikalangan suatu kelompok.
2. Efisiensi administrasi ditingkatkan oleh anggota kelompok dalam suatu hirarki yang pasti.
3. Efisiensi administrasi dapat ditingkatkan dengan membatasi jarak pengawasan pada setiap sektor di dalam organisasi sehingga jumlahnya menjadi lebih kecil.
4. Efisiensi administrasi ditingkatkan dengan mengelompokan pekerjaan untuk maksud-maksud pengawasan berdasarkan; tujuan, proses, langganan, tempat.

Selanjutnya Robin dalam Pasolong (2011: 13-14) mengemukakan prinsip-prinsip administrasi sebanyak 14 yaitu sebagai berikut:

1. Pembagian pekerjaan, prinsip ini sama dengan pembagian tenaga kerja menurut adam smith, sepesialisasi meningkatkan hasil yang membuat tenaga kerja lebih efisien.
2. Wewenang, manajer harus memberi perintah, wewenang akan membuat mereka melakukan dengan baik.
3. Disiplin, tenaga kerja harus membantu dan melaksanakan aturan yang ditentukan organisasi.
4. Kesatuan komando, setiap tenaga kerja menerima perintah hanya dari yang berkuasa.
5. Kesatuan arah, beberapa kelompok aktivitas organisasi yang mempunyai tujuan yang sama dapat diperintah oleh seorang manajer menggunakan satu rencana.
6. Mengalahkan kepentingan individu untuk kepentingan umum, kepentingan setiap orang, pekerja atau kelompok pekerja tidak dapat diutamakan dari kepentingan organisasi secara keseluruhan.
7. Pemberian upah, pekerja harus dibayar dengan upah yang jelas untuk pelayanan mereka.
8. Pemusatan, berhubungan pada perbandingan yang mana mengurangi keterlibatan dalam pengambilan keputusan.
9. Rentang kendali, garis wewenang dari manajemen puncak pada tingkatan di bawahnya mempresentasikan rantai skalar.

10. Tata tertib, orang dan bahan-bahan dapat ditempatkan dalam hal yang tepat dan dalam waktu yang tepat.
11. Keadilan, manajer dapat berbuat baik dan terbuka pada bawahannya.
12. Stabilitas pada jabatan personal, perputaran yang tinggi merupakan ketidak efisienan.
13. Inisiatif, tenaga kerja yang menyertai untuk memulai dan membawa rencana yang akan menggunakan upaya pada tingkat tinggi.
14. Rasa persatuan, kekuatan promosi tim akan tercipta melalui keharmonisan dan kesatuan di dalam organisasi.

2.2.4 **Paradigma Administrasi Publik**

Paradigma adalah sekumpulan keyakinan dasar seseorang atau sekelompok orang terhadap suatu hal. Khun dalam Syafri (2012: 160) mengatakan bahwa paradigma adalah suatu cara pandang, nilai-nilai, metode-metode, prinsip dasar, ataupun cara memecahkan suatu masalah, yang dianut oleh suatu masyarakat ilmiah pada kurun waktu tertentu. Paradigma suatu ilmu akan berubah apabila paradigma tersebut mengalami krisis, kurang berwibawa, tidak lagi mendapat dukungan, atau dipandang tidak mampu mengatasi suatu problema keilmuan (*anomalies*) sehingga paradigma tersebut digantikan oleh paradigma baru yang lahir kemudian.

Denhardt & Denhardt dalam Syafri (2012: 192) membagi perkembangan ilmu administrasi publik dalam tiga paradigma besar, yaitu:

A. Paradigma Administrasi Publik Klasik (*Old Public Administration*)

Paradigma administrasi publik klasik (*old public administration*) menurut para ahli administrasi publik berlangsung dari tahun 1887-1987. Administrasi publik klasik sangat dipengaruhi oleh pemikiran Woodrow Wilson, mantan Presiden Amerika Serikat dan Guru Besar Ilmu Politik di Princeton University Amerika Serikat. Melalui karya besarnya yang

berjudul *The Study of Administration*, Wilson dalam Syafri (2012: 192) menyampaikan beberapa pemikiran tentang administrasi publik antara lain sebagai berikut:

1) Perlunya pemisahan antara aktivitas pembuatan kebijakan yang dilakukan dalam proses politik dan implementasi kebijakan yang harus dilakukan oleh birokrasi pemerintah (dikotomi politik-administrasi). Pemisahan tersebut dilakukan karena jika masalah administratif dicampuri politik, akan terjadi penyimpangan yang mengarah pada korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) sehingga pemerintahan menjadi tidak efisien.
2) Nilai yang ingin dicapai dalam pelaksanaan tugas pemerintahan adalah efisiensi, ekonomis, dan rasionalitas dengan dasar pengambilan keputusan *bureaucratic rational choice*.
3) Untuk mewujudkan nilai-nilai pada point dua, perlu dibangun struktur organisasi yang efisien dan hierarkis. Organisasi yang tepat untuk itu adalah organisasi birokrasi.

Menurut Thoha dalam Syafri (2012: 193), secara garis besar ide inti administrasi publik klasik adalah sebagai berikut:

1) Titik perhatian pemerintah adalah pada jasa pelayanan yang diberikan langsung oleh dan melalui instansi-instansi pemerintah yang berwenang.
2) *Public policy* dan *administration* berkaitan dengan merancang dan melaksanakan kebijakan-kebijakan untuk mencapai tujuan-tujuan publik.
3) Administrasi publik hanya memainkan peran yang lebih kecil pada proses pembuatan kebijakan-kebijakan pemerintah ketimbang upaya untuk melaksanakan (*implementation*) kebijakan publik.
4) Upaya memberikan pelayanan harus dilakukan oleh para administrator yang bertanggung jawab kepada pejabat politik dan yang diberikan diskresi terbatas untuk melaksanakan tugasnya.
5) Para administrator bertanggung jawab kepada pemimpin politik yang dipilih secara demokratis.
6) Program-program kegiatan diadministrasikan secara baik melalui garis hierarki organisasi dan dikontrol oleh para pejabat dari hierarki atas organisasi.
7) Nilai-nilai utama (*the primary values*) administrasi publik adalah efisiensi dan rasionalitas.
8) Administrasi publik dijalankan sangat efisien dan sangat tertutup sehingga warga negara keterlibatannya amat terbatas.

9) Peran administrasi publik dirumuskan secara luas seperti *planning*, *organizing*, *staffing*, *directing*, *coordinating*, *reporting budgeting*.

Gagasan Wilson melakukan pemisahan antara politik dan administrasi tidak sepenuhnya dapat dilakukan karena pada kenyataannya administrasi publik tidak dapat dipisahkan dari kegiatan politik. Administrasi publik tidak hanya sekadar pelaksana keputusan politik dalam bentuk kebijakan negara, tetapi administrasi publik juga ikut merumuskan kebijakan negara. Sifat organisasi pada administrasi publik klasik yang sangat hierarkis menimbulkan *red-tape*, kelambanan, tidak adil, dan biaya tinggi. Demikian pula dengan sifat administrasi publik klasik yang birokratik dan tertutup menyebabkan keterlibatan warga negara sangat terbatas sehingga keadilan sosial terabaikan dan dianggap tidak mampu memecahkan masalah-masalah yang dihadapi masyarakat.

Dengan alasan-alasan di atas ditambah dengan perkembangan teknologi informasi, globalisasi, demokrasi, dan liberalisasi yang terjadi pada tahun 1990-an, berdampak pada perubahan lingkungan strategis administrasi publik sehingga mengharuskan administrasi publik meninjau kembali konsep-konsep yang telah ada selama ini, yang dianggap sudah tidak cocok dengan lingkungan strategis baru.

B. Paradigma *New Public Management* (NPM)

Menurut O'Flynn dan Stoker dalam Syafri (2012: 194), lahirnya konsep *New Public Management* (NPM) pada awal tahun 1990-an merupakan reasksi terhadap kelemahan birokrasi tradisonal dalam

paradigma administrasi publik klasik. Setyoko dalam Syafri (2012: 194-195) mengompilasi pendapat ahli mengenai NPM ini, yaitu sebagai berikut:

1) NPM menggeser penekanan dari administrasi publik tradisional ke manajemen publik (Lane, 1994). Model tradisional organisasi dan penyaluran pelayanan publik berdasarkan prinsip hierarki birokrasi, sentralisasi perencanaan, dan pengendalian langsung oleh pemerintah digantikan oleh manajemen pelayanan berdasarkan kehendak pasar (*market-based public service management*) (Wals, 1995; Flynn, 1993).
2) NPM dimaknai sebagai visi, ideologi atau seperangkat pendekatan dan teknik manajemen publik yang diadopsi dari sektor swasta (Pollitt, 1994; Ferlie, dkk., 1996; Hood, 1991, 1995).

NPM menganut nilai-nilai dan praktik-praktik administrasi bisnis yang diterapkan ke dalam praktik administrasi publik (*run government like business*), misalnya dengan melakukan restrukturisasi sektor publik melalui privatisasi, perampingan struktur birokrasi, mengenalkan nilai persaingan (kompetisi) melalui pasar internasional, mengontrakkan pelayanan publik pada organisasi swasta, penerapan *outsourcing* (kontrak kerja), membatasi intervensi pemerintah (hanya dilakukan jika mekanisme pasar mengalami kegagalan), dan meningkatkan efisiensi melalui pengukuran kinerja (Setyoko dalam Syafri, 2012: 195).

NPM berkehendak meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas sehingga kurang memperhatikan keadilan sosial. Nilai-nilai ekonomis (bisnis) yang dianut NPM sering kali bertentangan dengan demokrasi dan kepentingan publik. Pengelolaan pelayanan publik yang diserahkan kepada swasta pada satu sisi memang dapat meningkatkan kinerja pelayanan publik, namun cenderung hanya dinikmati oleh orang-orang yang mampu membayar. Uraian di atas merupakan gambaran

kegagalan konsep NPM dan sekaligus gambaran kegagalan administrasi publik dalam mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat.

C. Paradigma *New Public Service* (NPS)

Ketidakberhasilan NPM mewujudkan administrasi publik yang berkeadilan sosial melahirkan pendekatan baru yang berorientasi kepentingan masyarakat, yaitu *new public service* (NPS) (Denhardt & Denhardt, 2000, 2003). NPS dalam literatur administrasi publik dikenal juga dengan paradigma *governance* (Denhardt & Denhardt, 2003, 2007), *public governance* (Bovaired & Loffler, 2009), atau *collaborative governance* (Ansell & Gash, 2007) untuk menggantikan istilah *government* dalam paradigma *Old Public Administration* (OPA) dan paradigma NPM.

Pergeseran *government* ke *governance* dimaksudkan untuk mendemokratisasi administrasi publik. *Government* menunjuk pada institusi pemerintah terutama dalam kaitannya dengan pembuatan kebijakan. Sementara itu, *Governance* menunjuk pada keterlibatan *Non Governmental Organization* (NGO), kelompok-kelompok kepentingan, dan masyarakat, di samping institusi pemerintah dalam pengelolaan kepentingan umum, terutama dalam proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik. Konsep *governance* memperhitungkan seluruh aktor dan area kebijakan yang berada di luar "pemerintah/eksekutif inti" yang telibat dalam proses pembuatan kebijakan (Richard & Smith dalam Syafri, 2012: 196).

NPS menilai bahwa NPM dan OPA terlalu menekankan pada efisiensi dan melupakan atau mengabaikan masyarakat sebagai sasaran dari kebijakan publik. NPS memperbaiki kekurangan ini dengan konsep pelayanan kepada warga masyarakat bukan kepada pelanggan (*delivery service to citizen not customer*) dalam proses penyelenggaraan administrasi publik dan kebijakan publik. Berbagai kebijakan dan program diarahkan untuk memenuhi kepentingan warga masyarakat dan dilakukan melalui tindakan kolektif dan proses kolaboratif. Dengan demikian, kepentingan publik merupakan hasil dari proses dialog tentang nilai-nilai yang disetujui bersama oleh masyarakat dan bukan agregasi kepentingan pribadi atau kelompok administrator publik. Kebijakan publik tidak hanya sekadar memenuhi tuntutan pasar, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai dan kepentingan masyarakat (Denhardt & Denhardt dalam Syafri, 2012: 196).

Istilah *public governance* menunjuk pada saling interaksi antara para *stakeholders* dengan tujuan mempengaruhi hasil kebijakan publik (Bovaird & Loffler, 2009). *Stakeholders* di atas meliputi antara lain adalah masyarakat (warga negara), organisasi masyarakat, lembaga publik, media massa, politisi, organisasi nirlaba, kelompok kepentingan, dan sebagainya.

Osborne dalam Syafri (2012: 197-198) menjelaskan bahwa *public governance* berisa lima untaian sebagai berikut:

1) *Socio-political governance*: menyangkut hubungan antarinstitusi dalam masyarakat. Kooiman (1999) mengatakan bahwa hubungan timbal balik dan interaksi antarinstitusi dalam masyarakat perlu dipahami secara totalitas dalam pembuatan ataupun implementasi kebijakan publik. Dalam konsep demikian, pemerintah tidak lagi

menjadi dominan dalam pembuatan kebijakan publik, tetapi bergantung kepada keseluruhan elemen masyarakat (*stakeholder*).

2) *Public policy governance*: berkaitan dengan bagaimana elite pembuat kebijakan beserta jaringannya berinteraksi dalam proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik.
3) *Administrative governance*: menyangkut efektivitas penerapan administrasi publik dan reposisinya untuk menangani masalah-masalah pemerintahan yang dewasa ini semakin kompleks.
4) *Contract governance*: berkaitan dengan penerapan NPM, dipandangan perlu adanya kontrak perjanjian dalam penyelenggaraan pelayanan publik (perjanjian antara penyedia pelayan publik dengan pihak penerima layanan). Organisasi/institusi publik pada negara-negara *modern* memiliki tanggung jawab untuk menyediakan sistem pelayanan publik yang baik (Kettl, 1993 & 2000).
5) *Network governance*: merupakan jaringan kerja sama mandiri antarorganisasi pemerintah atau tanpa organisasi pemerintah dalam penyediaan pelayan publik (Rhodes, 1997; Kickert, 1993).

Sementara itu, istilah *collaborative governance* merupakan cara pengelolaan pemerintahan yang melibatkan secara langsung *stakeholder* di luar negara, berorientasi konsensus, dan musyawarah dalam proses pengambilan keputusan kolektif, yang bertujuan untuk membuat atau melaksanakan kebijakan publik serta program-program publik (Setyoko dalam Syafri, 2012: 198). Fokus *collaborative governance* adalah pada kebijakan dan masalah publik. Walaupun lembaga publik memiliki otoritas tertinggi dalam pembuatan kebijakan, tujuan dan proses kolaborasi adalah mencapai derajat konsensus di antara para *stakeholders* (bukan penekanan dari lembaga publik). *Collaborative governance* menghendaki terwujudnya keadilan sosial dalam memenuhi kepentingan publik (Setyoko dalam Syafri, 2012: 198).

Kelahiran paradigma baru dalam administrasi publik secara teoritis tidak berarti menghilangkan paradigma lama. Dalam praktik, ketiga

paradigma tersebut dapat berlaku secara bersama-sama atau bersamaan dalam suatu negara. Pada organisasi yang menjunjung tinggi aspek hierarki, prosedural, kesatuan perintah, dan kepatuhan seperti organisasi militer, kepolisian, kehakiman (lembaga pemasyarakatan), ketika merumuskan dan melaksanakan kebijakan, akan lebih cocok menggunakan paradigma *Old Public Administration* (OPA) daripada paradigma NPM yang berorientasi bisnis atau NPS yang berorientasi pelayanan (*citizen charter*).

Bagi organisasi pemerintah yang berorientasi bisnis (mencari profit) seperti lembaga-lembaga keuangan, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), industri-industri strategis negara, praktik administrasi dan kebijakan publiknya tentu lebih cocok menggunakan paradigma NPM. Sementara itu, institusi yang berorientasi pada pelayanan publik dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial seperti kesehatan, pendidikan, pelayanan publik, dinas/institusi sosial, akan lebih cocok menggunakan pendekatan NPS atau *governance* (Setyoko dalam Syafri, 2012: 198-199).

Perbandingan di antara ketiga paradigma di atas secara umum digambarkan Denhardt dan Denhardt dalam Syafri (2012: 189-190) sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 4. Perbandingan Antara Administrasi Publik Klasik (*Old Public Management*), NPM, dan NPS

Aspek	*Old Public Administration*	*New Public Management*	*New Public Service*
Dasar teoritis & epistemilogi pembentuk	Teori politik, sosial politik dianggap setengah ilmu sosial.	Teori ekonomi, lebih maju dialog berdasarkan ilmu sosial positif.	Teori demokrasi, berbagai pendekatan kepada pengetahuan dilakukan secara positif, interpertatif, dan kritis.
Rasionalitas dan model keterkaitan dari perilaku manusia	Manusia administrasi.	Rasionalitas teknis dan ekonomi "manusia ekonomi", atau pengambilan keputusan sendiri.	Rasionalitas formal, berbagai tes rasional berganda (politik, ekonomi dan keorganisasian).
Konsep kepentingan publik	Kepentingan publik adalah sesuatu yang didefinisikan secara politis dan yang tercantum dalam aturan.	Kepentingan publik mewakili agregasi dari kepentingan individu.	Kepentingan publik adalah hasil dari dialog tentang berbagai nilai.
Kepada siapa birokrasi publik harus bertanggung jawab?	Klien (*Clients*) dan pemilih.	Pelanggan (*Customers*).	Warga negara (*Citizens*).

Peran pemerintah	Pengayuh (*Rowing*).	Mengarahkan (*Steering*).	Menegosiasikan dan mengelaborasi berbagai kepentingan warga negara dan kelompok komunitas.
Mekanisme pencapaian tujuan kebijakan	Program ditangani institusi pemerintah yang telah ada.	Penciptaan mekanisme baru dengan organisasi privat dan non-profit.	Penciptaan nilai bersama, kerja sama institusi pemerintah, privat dan non-profit organisasi.
Akuntabilitas	Menurut hierarki administratif.	Kehendak pasar yang merupakan hasil keinginan pelanggan (*customers*).	Multiaspek: Akuntabel pada hukum, nilai komunitas, norma politik, standar professional, kepentingan warga Negara.
Diskresi administrasi	Diskresi terbatas.	Ada keleluasaan menuju kewirausahaan.	Penuh keleluasaan, tetapi dengan akuntabilitas.
Struktur organisasi	Organisasi birokrasi bersifat *top-down* dengan kontrol yang ketat.	Desentralisasi, namun tetap terkontrol.	Kolaborasi struktur dengan kepemimpinan

			internal dan eksternal.
Motivasi pegawai	Gaji, pegawai dilindungi.	Spirit wirausaha, spirit pengurangan pegawai.	Pelayanan publik keinginan melayani masyarakat.

Sumber: Denhardt dan Denhardt dalam Syafri (2012: 189-190)

2.3 **Kebijakan Publik**

2.3.1 **Pengertian Kebijakan Publik**

Kebijakan publik merupakan salah satu faktor terpenting dalam pelaksanaan administrasi publik. Dengan kebijakan publik yang diambil pemerintah, bisa dilihat kinerja pemerintah tersebut apakah sudah berazaskan demokrasi atau malah hanya demi kepentingan elit dan golongan saja.

Sebelum berbicara lebih jauh tentang kebijakan publik, alangkah lebih baiknya jika mengetahui dulu apa makna dari kebijakan publik itu sendiri. Terdapat banyak definisi kebijakan publik yang dikemukakan oleh para ahil dengan mengusung makna masing-masing.

Menurut Winarno (2016: 19) “pada dasarnya terdapat banyak batasan atau definisi mengenai apa yang dimaksud dengan kebijakan publik (*public policy*) dalam literatur-literatur ilmu politik. Masing-masing definisi tersebut memberi penekanan yang berbeda-beda. Perbedaan ini timbul karena masing-masing ahli mempunyai latar belakang yang berbeda-beda”.

Secara umum, istilah "kebijakan" atau "*policy*" digunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, maupun suatu lembaga pemerintah) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu (Winarno, 2016: 19).

Carl Friedrich dikutip dari Wahab (2012: 3) menjelaskan bahwa "kebijaksanaan ialah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan". Sejalan dengan pemikiran ini, Harold Laswell dan Abraham Kapalan dalam Nugroho (2009: 93) mendefinisikan sebagai "suatu program yang diproyeksikan dengan tujuan-tujuan tertentu, nilai-nilai tertentu dan praktik-praktik tertentu".

Definisi-definisi di atas menjelaskan pengertian kebijakan tanpa mengasumsikan bahwa pemerintah adalah aktor utama, namun di lain pihak terdapat beberapa pakar yang dengan secara tegas menyebutkan bahwa pemerintah adalah aktor utama dalam kebijakan publik. Hal ini seperti yang dikatakan oleh David Easton dalam Nugroho (2009: 93) bahwa kebijakan publik yaitu akibat aktivitas pemerintah (*the impact of governance activity*). Kemudian ditambahkan oleh Steven A. Peterson dalam Nugroho (2009: 93) yaitu "*government action to address some people*". Lebih dalam lagi B.G. Peters dalam Nugroho (2009: 93) mendefenisikan sebagai "*the sum of government activities, whether acting directly or through agents, as it has an influence on the lives of citizens*".

Kemudian Suharto (2009: 33) menjelaskan bahwa "kebijakan publik adalah keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan tindakan yang bersifat strategis atau garis besar yang secara langsung mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumber daya publik (alam, finansial, dan manusia) demi kepentingan rakyat banyak, penduduk, masyarakat atau warga negara".

Dari definisi-definisi tersebut dapat diketahui bahwa kebijakan publik merupakan bentuk komitmen yang dilakukan pemerintah untuk memberikan pengaruh terhadap kehidupan masyarakat. Komitmen dari pemerintah sendiri meliputi berbagai bidang kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Untuk membedakan ragam kebijakan publik yang diambil pemerintah, Gabriel A. Almond dan G. Bingham Powell dalam Luankali (2007: 3-5) mengklasifikasikan kebijakan publik dalam empat kategori yaitu:

1. Kebijakan publik dalam penarikan sumber daya manusia (*extractions*) mengacu pada sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam yang ditarik oleh sistem politik dari masyarakat dalam bentuk pajak, retribusi, wajib militer dan sebagainya. Penarikan sumber daya ini adalah biaya yang dipikul oleh masyarakat dalam rangka menghidupkan negara.
2. Kebijakan publik dalam hal pengaturan (*regulations*), mengacu pada berbagai bentuk pengaturan pemerintah agar tata kehidupan pemerintah dan masyarakat dapat mencapai tingkat harmonisasi. Hanya dengan cara demikian, maka baik pemerintah maupun masyarakat dapat melakukan berbagai aktivitas dengan aman dan tertib.
3. Kebijakan publik dalam hal pembagian (*allocations*), artinya pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan publik untuk melakukan distribusi biaya, barang, pelayanan, kehormatan, status penghargaan, kesempatan kepada masyarakat. Dalam kegiatan alokasi ini, masyarakat dapat ikut berpartisipasi dalam kegiatan pemerintahan dan pembangunan.
4. Kebijakan publik dalam hal pengaturan lambang (*symbols*) artinya pemerintah mengeluarkan berbagai peraturan yang mengatur secara khusus tentang penetapan simbol dan lambang sebagai kesetiaan kepada negara.

Dengan keempat pengklasifikasian ini, maka dapat diidentifikasi jenis kebijakan publik yang dilakukan oleh pemerintah. Dengan adanya pengidentifikasian tersebut tergambar jelas dari fungsi pemerintah sehingga kinerja pemerintah dapat dinilai oleh publik pada tiap-tiap klasifikasi.

Di sisi lain Parsons (2008: 20) menjelaskan pemikiran Easton (1953, 1965) bahwa "karya Easton menyediakan model "sistem" politik yang sangat memengaruhi "cara studi kebijakan" *output* pada 1960-an dalam mengkonseptualisasikan hubungan antara pembuatan kebijakan, *output* kebijakan, dan "lingkungannya" yang lebih luas. Lebih lanjut Parsons (2008: 20) mengemukakan bahwa "karakteristik utama model Eastonian adalah model ini melihat proses kebijakan dari segi input yang diterima, dalam bentuk aliran dari lingkungan, dimediasi melalui saluran input (partai, media, kelompok kepentingan) dan permintaan di dalam sistem politik (*with in puts*) dan konversinya menjadi *output* dan hasil kebijakan. Berbeda dari itu, Laswell dalam Parson (2008: 15) menjelaskan bahwa kata "kebijakan" (*policy*) umumnya dipakai untuk menunjukkan pilihan terpenting yang diambil baik dalam kehidupan organisasi atau privat "kebijakan" bebas dari konotasi yang dicakup dalam kata politis (*political*) yang sering kali diyakini mengandung makna "keberpihakan" dan "korupsi".

Dari kedua pandangan yang berbeda dari pakar di atas serta melihat kenyataan di lapangan saat ini, teori Easton lebih tepat menggambarkan keadaan kebijakan publik di Indonesia dewasa ini. Setiap kebijakan publik yang dilaksanakn di Indonesia tidak pernah terlepas dari kepentingan politik. Sedangkan teori dari Laswell lebih mengarah pada pelaksanaan kebijakan publik tanpa adanya

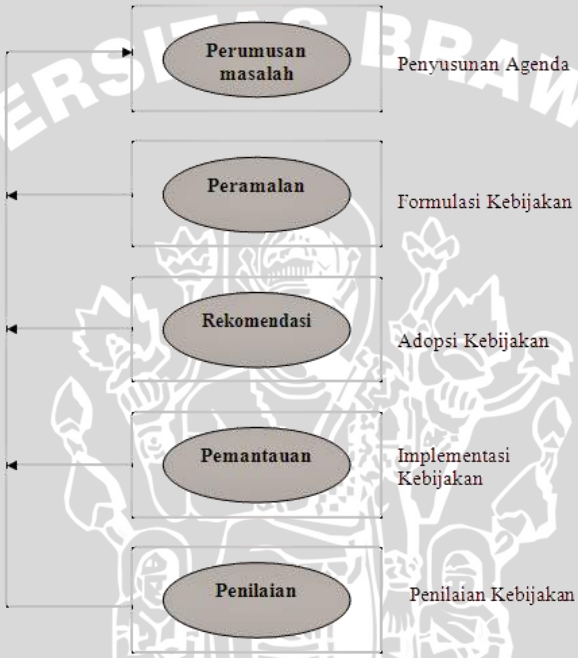
kepentingan lain selain untuk kesejahteraan publik. Teori Laswell ini tentu saja sulit diuji dalam pelaksanaan kebijakan publik khususnya di Indonesia. Hal ini dipertegas oleh pernyataan Dunn (1999: 22) bahwa "proses analisis kebijakan adalah serangkaian aktivitas intelektual yang dilakukan di dalam proses kegiatan yang pada dasarnya bersifat politis. Bahwa aktivitas politis tersebut dijelaskan sebagai proses pembuatan kebijakan".

Proses pembuatan kebijakan tersebut menurut Dunn (1999: 26-28) adalah sebagai berikut:

1. Perumusan Masalah
   Perumusan Masalah dapat memasok pengetahuan yang relevan dengan kebijakan yang mempersoalkan asumsi-asumsi yang mendasari definisi masalah dan memasuki proses pembuatan kebijakan melalui penyusunan agenda (agenda *setting*). Perumusan masalah dapat membantu menemukan asumsi-asumsi yang tersembunyi, mendiagnosis penyebab-penyebabnya, memetakan tujuan-tujuan yang memungkinkan, memadukan padangan-pandangan yang bertentangan, dan merancang peluang-peluang kebijakan yang baru.
2. Peramalan
   Peramalan dapat menyediakan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang masalah yang akan terjadi di masa mendatang sebagai akibat dari diambilnya alternatif, termasuk tidak melakukan sesuatu. Ini dilakukan dalam tahap formulasi kebijakan.
3. Rekomendasi
   Rekomendasi membuahkan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang manfaat atau biaya dari berbagai alternatif yang akibatnya di masa mendatang telah diestimasikan melalui peramalan. Ini membantu pengambil kebijakan pada tahap adopsi kebijakan. Rekomendasi membantu mengestimasi tingkat resiko dan ketidakpastian, mengenali eksternalitas dan akibat ganda, menentukan kriteria dalam pembuatan pilihan, dan menentukan pertanggungjawaban administratif bagi implementasi kebijakan.
4. Pemantauan
   Pemantuan (*monitoring*) menyediakan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang akibat dari kebijakan yang diambil sebelumnya. Ini membantu pengambil kebijakan pada tahap implementasi kebijakan. Banyak badan secara teratur memantau hasil dan dampak kebijakan dengan menggunakan berbagai indikator kebijakan di bidang kesehatan, pendidikan, perumahan, kesejahteraan, kriminalitas, dan ilmu teknologi.

5. Evaluasi
   Evaluasi membuahkan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang ketidaksesuaian antara kinerja kebijakan yang diharapkan dengan yang benar-benar dihasilkan. Jadi ini membantu pengambilan kebijakan pada tahap penilaian kebijakan terhadap proses pembuat kebijakan.

Kemudian Dunn juga menjelaskan proses pembuatan kebijakan dengan sebuah skema yaitu sebagai berikut:



Gambar 1. Kedekatan prosedur analisis kebijakan dengan tipe-tipe pembuatan kebijakan
Sumber: William N. Dunn (1999: 25)

Berbagai uraian dan penjelasan tentang kebijakan publik di atas, mengemukakan bahwa kebijakan publik bukan hanya sebuah tindakan tanpa pola atau prosedur, melainkan adalah sebuah kejadian runtut yang membutuhkan studi dalam pelaksanaannya agar mendapat pengetahuan mendalam dalam setiap proses kebijakan publik. Hal ini ditegaskan oleh peryataan Thomas Dye dalam Wahab (2012: 11), yaitu:

> "Studi ini mencakup upaya menggambarkan isi kebijaksanaan negara: penilaian mengena dampak dari kekuatan-kekuatan yang berasal dari lingkungan terhadap isi kebijaksanaan negara; analisis mengenai akibat dari berbagai pengaturan kelembagaan dan proses-proses politik terhadap kebijaksanaan negara; penelitian mendalam mengenai akibat-akibat dari berbagai kebijaksanaan negara pada masyarakat; baik berupa dampak yang diharapkan (yang direncanakan) maupun yang tidak diharapkan".

Lebih lanjut Anderson dan Dye dalam Wahab (2012: 12-13) mengklasifikasikan alasan mempelajari kebijaksanaan negara yaitu sebagai berikut:

1. Alasan ilmiah
   Kebijaksanaan negara dipelajari dengan maksud memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam mengenai hakikat dan asal mula kebijaksanaan negara berikut proses-proses yang mengantarkan perkembangannya serta akibat-akibatnya pada masyarakat.
2. Alasan Profesional
   Studi kebijaksanaan negara dimaksudkan sebagai upaya untuk menerapkan pengetahuan ilmiah di bi bidang kebijaksanaan negara guna memecahkan masalah-masalah sosial sehari-hari.
3. Alasan Politis
   Mempelajari kebijaksanaan negara pada dasarnya dimaksudkan agar pemerintah dapat menempuh kebijaksanaan yang tepat guna mencapai tujuan yang tepat pula.

Pada akhirnya kesimpulan dari pelaksanaan kebijakan publik adalah sesuai dengan pernyataan Nugroho (2009: 243) yaitu "setiap kebijakan harus mengandung unsur pragmatisme dan untung-rugi. Tentu saja pemahamannya pertama kali perlu diletakkan dalam konteks etikal, yaitu tentang nilai kebaikan dan keburukan.

2.3.2 **Tahap-Tahap Kebijakan Publik**

Proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji. Oleh karena itu, beberapa ahli politik yang menaruh minat untuk mengkaji kebijakan publik membagi proses-proses penyusunan kebijakan publik ke dalam beberapa tahap. Tujuan pembagian seperti ini adalah untuk memudahkan kita di dalam mengkaji

kebijakan publik. Namun demikian, beberapa ahli mungkin membagi tahap-tahap ini dengan urutan yang berbeda. Seperti misalnya, tahap penilaian kebijakan seperti yang tercantum dalam gambar di bawah ini bukan merupakan tahap akhir dari proses kebijakan publik, sebab masih ada satu tahap lagi, yakni tahap perubahan kebijakan dan terminasi atau penghentian kebijakan. Tahap-tahap kebijakan publik menurut Winarno (2016: 30-32) adalah sebagai berikut:

a. Tahap Penyusunan Agenda

   Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Sebelumnya masalah-masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk ke dalam agenda kebijakan. Pada akhirnya, beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus kebijakan. Pada tahap ini suatu masalah mungkin tidak disentuh sama sekali, sementara masalah yang lain diterapkan menjadi fokus pembahasan, atau ada pula masalah karena alasan-alasan tertentu ditunda untuk waktu yang lama.

b. Tahap Formulasi Kebijakan

   Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan (*policy alternatives/policy options*) yang ada. Sama halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk ke dalam agenda kebijakan, dalam tahap perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah. Pada tahap ini, masing-masing aktor akan "bermain" untuk mengusulkan pemecahan masalah terbaik.

c. Tahap Adopsi Kebijakan

   Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau keputusan peradilan.

d. Tahap Implementasi Kebijakan

   Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elite, jika program tersebut tidak diimplementasikan. Oleh karena itu, keputusan program kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan masalah harus diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah. Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia. Pada tahap implementasi ini beberbagai kepentingan akan bersaing.

Beberapa implementasi kebijakan mendapat dukungan para pelaksana (*implementors*), namun beberapa yang lain mungkin akan ditentang oleh para pelaksana.

e. Tahap Evaluasi Kebijakan

Pada tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat telah mampu memecahkan masalah. Kebijakan publik pada dasarnya dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan. Dalam hal ini, memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu, ditentukanlah ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik telah meraih dampak yang diinginkan.

2.3.3 **Aktor dan Pelaku Pembuatan Kebijakan Publik**

a. Pejabat Pembuat Kebijakan

Menurut Leo Agustino (2012: 29) pejabat pembuat kebijakan adalah orang yang mempunyai wewenang yang sah untuk ikut serta dalam formulasi hingga penetapan kebijakan publik, walau dalam kenyataannya, beberapa orang yang mempunyai wewenang sah untuk bertindak dikendalikan oleh orang lain, seperti pimpinan partai politik atau kelompok penekan. Yang termasuk dalam pembuat kebijakan, secara normatif adalah: legislatif, eksekutif, administrator dan para hakim, yang akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Legislatif

Legislatif berhubungan dengan tugas politik sentral dalam pembuatan peraturan dan pembentukan kebijakan dalam suatu sistem politik. Penetapan keputusan politik menjadi kebijakan publik merupakan sesuatu yang harus ditentukan melalui rangkaian kegiatan empiris yang runtut dan sistematis (Agustino, 2012: 30). Di Indonesia lembaga ini sering disebut sebagai DPR. Lembaga ini bersama-sama dengan pihak eksekutif memegang peran dalam perumusan kebijakan.

2. Eksekutif

Presiden sebagai kepala eksekutif mempunyai peran yang penting dalam perumusan kebijakan. Keterlibatan presiden dalam perumusan kebijakan dapat dilihat dalam komisi-komisi presidensial, maupun dalam rapat-rapat kabinet (Winarno, 2016: 118). Struktur pembuatan kebijakan secara singkat lebih mudah dipahami dibanyak negara berkembang. Karena secara sederhana struktur pembuatan kebijakan di negara-negara berkembang hanya terletak pada pundak eksekutif selaku pembuatan kebijakan itu sendiri.

3. Instansi Administratif

Sistem administrasi di seluruh dunia dibedakan berdasarkan karakteristiknya, seperti ukuran, dan keragaman, hirarkisitas organisasi, hingga tingkat otonominya. Meskipun terdapat satu doktrin umum dalam ilmu politik bahwa instansi administrasi hanya dipengaruhi oleh kebijakan yang ditentukan oleh pemerintah, namun saat ini diakui bahwa politik dan administrasi dapat berbaur dan instansi administrasi sering terlibat dalam pengembangan kebijakan publik (Agustino, 2012: 33).

Menurut Agustino (2012: 33) legislatif tak dapat lagi memerankan fungsinya sebagai wakil rakyat secara baik oleh karena partisipasi publik secara individual menjadi cerita baru dalam masyarakat pasca-industri. Warga lebih yakin bila aspirasinya disampaikan langsung pada instansi terkait, misalnya pada lembaga terkait dibandingkan kalau harus menyalurkan pada parlemen yang sering kali mendistorsi kebutuhan dan

tuntutan warga. Akibatnya, instansi menjadi aktor pembuat kebijakan yang banyak membuat keputusan, sehingga mau tidak mau terlibat dalam konsekuensi jangkauan politik dan kebijakan yang lebih jauh dibandingkan pada masa-masa sebelumnya.

4. Lembaga Peradilan

Pengadilan tidak jarang diminta untuk mengartikan dan menentukan arti dari suatu peraturan atau perundangan yang seringkali diinterpretasikan secara berbeda oleh lembaga yang tengah bersengketa. Apabila pengadilan menerima satu interpretasi diantara interpretasi yang lainnya, maka konsekuensi tindakannya adalah mereka memberikan pengaruh kepada kebijakan yang dipilih oleh lembaga yang memang sengketa. Dalam dua dasawarsa terakhir ini dan khususnya beberapa tahun, pengadilan telah mengajukan banyak bidang aktifitas sosial dan politik yang berkonsekuensi pada pembuatan kebijakan publik.

b. Partisipasi Non Pemerintah dalam Pembuatan Kebijakan.

Selain lembaga-lembaga formal dalam membuat kebijakan masih ada elemen lain yang berpartisipasi dalam membuat kebijakan, antara lain:

1. Kelompok Kepentingan

Kelompok kepentingan seperti yang ditampilkan oleh organisasi buruh, bisnis, dan kepemudaan, merupakan sumber utama pemerintah dalam memproses kebijakan-kebijakan publik di depan. Dari kelompok-kelompok kepentingan inilah, biasanya pemerintah menggali keinginan-keinginan atau kebutuhan-kebutuhan warga yang belum dapat diberikan atau

disediakan dengan baik, sehingga dikemudian hari pemerintah dapat membuat kebijakan yang lebih komprehensif dan mampu menjawab keinginan, tuntutan dan kebutuhan masyarakat (Agustino, 2012: 36).

2. Partai Politik

   Dalam masyarakat modern bahkan pasca modern seperti saat ini umumnya partai politik sering memerankan fungsinya sebagai "kumpulan kepentingan", yaitu mereka berusaha untuk mengubah permintaan khusus dari kelompok kepentingan yang berserak di penjuru negeri menjadi alternatif kebijakan umum (Agustino, 2012: 39).

3. Warganegara Sebagai Individu

   Dalam pembahasan mengenai pembuatan kebijakan, warga negara secara individu sering diabaikan. Kelompok kepentingan bahkan kelompok penekan lebih terkemuka. Hal ini kurang baik karena menyisakan perbedaan-perbedaan dalam mekanismenya. Meskipun tugas untuk membuat kebijakan biasanya diberikan pada pejabat publik, namun dalam beberapa kejadian sejatinya warganegara sebagai individu masih mempunyai peluang untuk berpartisipasi secara langsung dalam pembuatan keputusan (Agustino, 2012: 39).

c. Aktor Kebijakan Publik di Indonesia

1. MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat)
2. DPR (Dewan Perwakilan Rakyat)
3. Presiden
4. Pemerintah

a) Pemerintah Pusat

b) Menteri

c) Lembaga Pemerintah Non-Departemen

d) Direktoral Jendral (Dirjen)

e) Badan-Badan Negara Lainnya (Bank Sentral, BUMN, Dll)

f) Pemerintah Daerah Provinsi

g) Pemerintah Daerah Kota

h) Kepala Desa

5. Dewan Perwakilan Daerah Provinsi
6. Dewan Perwakilan Daerah Kota/Kabupaten
7. Badan Perwakilan Desa.

Lembaga-lembaga negara (dan pemerintah) tersebut memiliki peran dan wewenang masing-masing untuk membuat perundangan (Kebijakan Publik) sesuai dengan kedudukannya dalam sistem pemerintahan.

2.3.4 **Permasalahan dalam Kebijakan Publik**

Menurut Winarno (2016: 74), "secara formal, suatu masalah dapat didefinisikan sebagai suatu kondisi atau situasi yang menimbulkan kebutuhan atau ketidakpuasan pada sebagian orang yang menginginkan pertolongan atau perbaikan". Permasalahan menyangkut berbagai hal dalam berbagai bidang, permasalah publik jelas berbeda dengan permasalah pribadi. Maka permasalah publik memiliki definisi sendiri seperti yang dikatakan oleh Winarno (2016: 74) yaitu "masalah-masalah publik adalah masalah-masalah yang mempunyai dampak

yang luas dan mencakup konsekuensi-konsekuensi bagi orang-orang yang tidak secara langsung terlibat".

Dunn (1999: 214-216) dalam bukunya Analisis kebijakan Publik, mengemukakan setidaknya empat ciri pokok masalah kebijakan, yakni:

1. Saling ketergantungan, masalah-masalah kebijakan dalam satu bidang (misalnya: energi) kadang-kadang memengaruhi masalah-masalah kebijakan dalam bidang lain (misalnya, pelayanan kesehatan dan pengangguran). Pada kenyataannya, seperti dikatakan oleh Ackoff, masalah-masalah kebijakan bukan merupakan satuan yang berdiri sendiri, namun merupakan bagian dari seluruh sistem masalah yang disebut sebagai meses, yaitu sistem kondisi eksternal yang menghasilkan ketidakpuasan di antara segmen-segmen masyarakat yang berbeda.
2. Subyektifitas, kondisi eksternal yang menimbulkan suatu permasalahan didefinisikan, diklasifikasikan, dijelaskan dan dievaluasi secara selektif. Masalah kebijakan adalah suatu hasil pemikiran yang dibuat pada suatu lingkungan tertentu; masalah tersebut merupakan elemen dari suatu situasi masalah yang diabstraksikan dari situasi tersebut oleh analis. Seperti telah disinggung di muka, suatu masalah tidak dapat mendefenisikan dirinya sendiri, akan tetapi dia harus didefinisikan oleh individu maupun kelompok yang berkepentingan. Proses ini melibatkan pengalaman-pengalam subyektif individu yang bersangkutan.
3. Sifat buatan, masalah-masalah kebijakan hanya mungkin ketika manusia membuat penilaian mengenai keinginannya untuk mengubah beberapa situasi masalah. Masalah kebijakan merupakan hasil penilaian subyektif manusia; masalah kebijakan itu juga bisa diterima sebagai definisi-definisi yang sah dari kondisi sosial obyektif, dan karenanya masalah kebijakan dipahami, dipertahankan dan diubah secara sosial.
4. Dinamika masalah kebijakan, ada banyak solusi yang bisa ditawarkan untuk memecahkan suatu masalah sebagaimana terdapat banyak definisi tentang masalah-masalah tersebut. Cara padang orang terhadap masalah pada akhirnya akan menentukan solusi yang ditawarkan untuk memecahkan masalah tersebut.

Masalah kebijakan publik yang sangat komplek tersebut dapat disederhanakan dalam berbagai model agar lebih mudah dalam pemahamannya. Dunn (1999: 22) menjelaskan bahwa "model kebijakan (*policy model*) adalah representasi sederhana mengenai aspek-aspek yang terpilih dari suatu kondisi masalah yang disusun untuk tujuan-tujuan tertentu". Selanjutnya Dunn (1999: 233)

juga menjelaskan bahwa model-model kebijakan dapat membantu membedakan hal-hal yang esensial dan yang tidak esensial dari situasi masalah, mempertegas hubungan di antara faktor-faktor atau variabel-variabel penting, dan membantu menjelaskan dan memprediksi konsekuensi-konsekuensi dari pilihan-pilihan kebijakan.

Dari penjelasan di atas, model-model kebijakan yang dapat diaplikasikan dalam perumusan masalah kebijakan menurut Dunn (1999: 234-241) adalah sebagai berikut:

1. Model Deskriptif
   Dua bentuk utama model kebijakan adalah deskriptif dan normatif, tujuan model deskriptif adalah menjelaskan dan/atau memprediksikan sebab-sebab dan konsekuensi-konsekuensi dari pilihan-pilihan kebijakan.
2. Model Normatif
   Tujuan model normatif bukan hanya untuk menjelaskan dan/atau memprediksi tetapi juga memberikan dalil dan rekomendasi untuk mengoptimalkan pencapaian beberapa utilitas (nilai).
3. Model Verbal
   Model verbal diekspresikan dalam bahasa sehari-hari, bukannya bahasa logika simbolis dan matematika, dan mirip dengan yang kita terangkan sebelumnya sebagai masalah-masalah subsantif. Dalam menggunakan model verbal, analis bersandar pada penilaiann nalar untuk membuat prediksi dan menawarkan rekomendasi.
4. Model Simbolis
   Model simbolis menggunakan simbol-simbol matematis untuk menerangkan hubungan di antara variabel-variabel kunci yang dipercaya menciri suatu masalah. Prediksi atau solusi yang optimal diperoleh dari model-model simbolis dengan meminjam metode-metode matematika, statistika dan logika.
5. Model Prosedural
   Model prosedural (*procedural models*) menampilkan hubungan yang dinamis di antara variabel-variabel yang diyakini menjadi ciri suatu masalah kebijakan.
6. Model sebagai pengganti dan perspektif
   Model pengganti (*surrogate model*) diasumsikan sebagai pengganti dari masalah-masalah substantif. Model pengganti dimulai, disadari atau tidak, dari asumsi bahwa masalah formal adalah representasi yang syah dari masalah substantif. Sebaliknya, model perspektif (*perspective model*)

> dipandang sebagai satu dari cara lain yang dapat digunakan untuk merumuskan masalah substantif.

Dari keenam model di atas, tidak dapat dipilih salah satu model yang utama pemakaiannya karena setiap model mengusung fungsi masing-masing dalam mengidentifikasi masalah kebijakan publik. Namun dalam pandangan penulis, model yang sering digunakan dalam proses kebijakan publik, sebagian besar menggunakan model deskriptif dan model verbal, karena model ini paling sederhana dalam pemakaiannya sehingga digunakan pertama kali untuk mengidentifikasi masalah.

2.4 **Implementasi Kebijakan**

2.4.1 **Konsep Implementasi Kebijakan**

Implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik. Suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan (Winarno, 2016: 133). Ripley dan Franklin dalam Winarno (2016: 134-135) berpendapat bahwa:

> Implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*), atau suatu jenis keluaran yang nyata (*tangible output*). Istilah implementasi menunjuk pada sejumlah kegiatan yang mengikuti pernyataan maksud tentang tujuan-tujuan program dan hasil-hasil yang diinginkan oleh para pejabat pemerintah. Implementasi mencakup tindakan-tindakan (tanpa tindakan-tindakan) oleh berbagai aktor, khususnya para birokrat, yang dimaksudkan untuk membuat program berjalan.

Lebih jauh menurut mereka, implementasi mencakup banyak macam kegiatan. *Pertama*, badan-badan pelaksana yang ditugasi oleh undang-undang dengan tanggung jawab menjalankan program harus mendapatkan sumber-sumber

yang dibutuhkan agar implementasi berjalan lancar. Sumber-sumber ini meliputi personel, peralatan, lahan tanah, bahan-bahan mentah, dan diatas semuanya adalah uang. *Kedua*, badan-badan pelaksana mengembangkan bahasa anggaran dasar menjadi arahan-arahan konkret, regulasi, serta rencana-rencana dan desain program. *Ketiga,* badan-badan pelaksana harus mengorganisasikan kegiatan-kegiatan mereka dengan menciptakan unit-unit birokrasi dan rutinitas untuk mengatasi beban kerja. Akhirnya, badan-badan pelaksana memberikan keuntungan atau pembatasan kepada para pelanggan atau kelompok-kelompok target. Mereka juga memberikan pelayanan atau pembayaran atau batasan-batasan tentang kegiatan ataupun lainnya yang bisa dipandang sebagai wujud dari keluaran yang nyata dari suatu program (Winarno, 2016: 135).

Sementara itu, Grindle dalam Winarno (2016: 135) juga memberikan pandangannya tentang implementasi dengan mengatakan bahwa secara umum, tugas implementasi adalah membentuk suatu kaitan (*linkage*) yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah. Selanjutnya, Van Meter dan Van Horn dalam Winarno (2016: 135) membatasi implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (atau kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya.

Sedangkan Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier dalam Agustino (2012: 139) mendefinisikan:

> Implementasi kebijakan sebagai pelaksana keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasikan masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya.

Dengan demikian, implementasi kebijakan merupakan salah satu tahap saja dari sekian tahap kebijakan publik. Hal ini berarti bahwa implementasi kebijakan hanya merupakan salah satu variabel penting yang berpengaruh terhadap keberhasilan suatu kebijakan dalam memecahkan persoalan-persoalan publik (Winarno, 2016: 136). Adapun proses implementasi kebijakan dapat dilaksanakan setelah menetapkan tujuan-tujuan kebijakan publik, membuat program-program dan pengalokasian dana untuk mencapai tujuan kebijakan tersebut.

2.4.2 **Implementasi Program**

2.4.2.1 **Program**

Program merupakan tahap-tahap dalam penyelesaian rangkaian kegiatan yang berisi langkah-langkah yang akan dikerjakan untuk mencapai tujuan dan merupakan unsur pertama yang harus ada demi tercapainya kegiatan implementasi. Program akan menunjang implementasi, karena dalam program telah dimuat berbagai aspek antara lain:

a. Adanya tujuan yang ingin dicapai.
b. Adanya kebijaksanaan-kebijaksanaan yang diambil dalam mencapai tujuan itu.

c. Adanya aturan-aturan yang harus dipegang dan prosedur yang harus dilalui.
d. Adanya perkiraan anggaran yang dibutuhkan.
e. Adanya strategi dalam pelaksanaan (Manila, 1996: 43).

Selanjutunya Jones (1991: 35), menyebutkan apakah program efektif atau tidak, maka standar penilaian yang dapat dipakai adalah organisasi, interpretasi, penerapan. Ketiga standar penilaian tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

A. Organisasi

Maksudnya disini ialah organisasi pelaksanaan program. Selanjutnya organisasi tersebut harus memiliki strukutur organisasi, adanya sumber daya manusia yang berkualitas sebagai tenaga pelaksana dan perlengkapan atau alat-alat kerja serta didukung dengan perangkat hukum yang jelas. Stuktur organisasi yang kompleks, struktur ditetapkan sejak semula dengan desain dari berbagai komponen atau subsistem yang ada tersebut.

Sumber daya manusia yang berkualitas berkaitan dengan kemampuan aparatur dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Aparatur dalam hal ini petugas yang terlibat dalam pelaksanaan program. Tugas aparat pelaksana program yang utama adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat yang dipercayakan kepadanya untuk mencapai tujuan negara. Agar tugas-tugas pelaksana program dapat dilaksanakan secara efektif maka setiap aparatur dituntut memiliki kemampuan yang memadai sesuai dengan bidang tugasnya.

B. Interpretasi

Maksudnya disini agar program dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan atau ketentuan yang berlaku, harus dilihat apakah pelaksanaannya telah sesuai dengan petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwewenang.

a) Sesuai Dengan Peraturan

Sesuai dengan peraturan berarti setiap pelaksanaan kebijaksanaan harus sesuai dengan peraturan yang berlaku baik Peraturan Tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten.

b) Sesuai Dengan Petunjuk Pelaksana

Sesuai dengan petunjuk pelaksana berarti pelaksanaan kebijaksanaan dari peraturan sudah dijabarkan cara pelaksanaannya pada kebijaksanaan yang bersifat administratif, sehingga memudahkan pelaksana dalam melakukan aktifitas pelaksanaan program.

c) Sesuai Petunjuk Teknis

Sesuai dengan petunjuk teknis berarti kebijaksanaan yang sudah dirumuskan dalam bentuk petunjuk pelaksana dirancang lagi secara teknis agar memudahkan dalam operasionalisasi program. Petunjuk teknis ini bersifat strategis lapangan agar dapat berjalan efisien dan efektif, rasional dan realistis.

C. Penerapan

Maksudnya disini peraturan/kebijakan berupa petunjuk pelaksana dan teknis telah berjalan sesuai dengan ketentuan, untuk dapat melihat ini harus dilengkapi dengan adanya prosedur kerja yang jelas, program kerja serta jadwal kegiatan yang disiplin.

a) Prosedur kerja yang jelas

Prosedur kerja yang sudah ada harus memiliki prosedur kerja agar dalam pelaksanaannya tidak tejadi tumpang tindih, sehingga tidak bertentangan antara unit kegiatan yang terdapat di dalamnya.

b) Program kerja

Program kerja harus sudah terprogram dan terencana dengan baik, sehingga tujuan program dapat di realisasikan dengan efektif.

c) Jadwal kegiatan

Program yang sudah ada harus dijadwalkan kapan dimulai dan diakhiri suatu program agar mudah dalam mengadakan evaluasi. Dalam hal ini yang diperlukan adanya tanggal pelaksanaan dan rampungnya sebuah program sudah ditentukan sebelumnya.

Menurut Abdullah (1998) suatu hal yang harus diperhatikan bahwa di dalam proses pelaksanaan suatu program sekurang-kurangnya terdapat tiga unsur yang penting dan mutlak ada, antara lain sebagai berikut:

1. Adanya program (kebijaksanaan) yang dilaksanakan, jadi ada tujuan yang ingin dicapai dari program tersebut sehingga program tersebut memberikan hasil.

2. Target group, yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut dalam bentuk perubahan dan peningkatan jadi dari pelaksanaan program yang telah dibuat tersebut diharuskan memberikan hasil positif bagi sekelompok masyarakat yang telah menjadi target.
3. Unsur pelaksana (implementer) baik organisasi maupun perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan dan pengawasan dari proses implementasi tersebut.

Program dalam konteks implementasi kebijakan publik terdiri dari beberapa tahap, yaitu:

1. Merancang (*design*) program beserta perincian tugas dan perumusan tujuan yang jelas, penentuan ukuran prestasi yang jelas serta biaya dan waktu.
2. Melaksanakan (*application*) program dengan medayagunakan struktur-strukur dan personalia, dana serta sumber-sumber lainnya, prosedur dan metode yang tepat.
3. Membangun system penjadwalan, *monitoring* dan sarana pengawasan yang tepat guna serta evaluasi (hasil) pelaksanaan kebijakan.

Dari beberapa penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa suatu program sebelum diimplementasikan, terlebih dahulu harus diketahui secara jelas mengenai uraian pekerjaan yang dilakukan secara sistematis, tata cara pelaksanaan, jumlah

anggaran yang dibutuhkan dan kapan waktu pelaksanaannya agar program yang direncanakan dapat mencapai target yang telah ditetapkan.

2.4.2.2 **Implementasi Program**

Program merupakan unsur pertama yang harus ada demi tercapainya kegiatan implementasi. Unsur kedua yang harus di penuhi dalam proses implementasi program yaitu adanya kelompok masyarakat yang menjadi sasaran program, sehingga masyarakat dilibatkan dan membawa hasil dari program yang dijalankan dan adanya perubahan dan peningkatan dalam kehidupannya. Tanpa memberikan manfaat kepada masyarakat maka dikatakan program tersebut telah gagal dilaksanakan. Berhasil atau tidaknya suatu program di implementasikan tergantung dari unsur pelaksanaannya (eksekutif). Unsur pelaksanaan ini merupakan unsur ketiga. Pelaksanaan penting artinya karena pelaksanaan baik itu organisasi maupun perorangan bertanggungjawab dalam pengelolaan maupun pengawasan dalam proses implementasi.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi program ádalah tindakan-tindakan yang dilaksanakan oleh individu-individu atau pejabat-pejabat terhadap suatu objek atau sasaran yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui adanya organisasi, interpretasi dan penerapan.

Guna mencapai tujuan implementasi program secara efektif, pemerintah harus melakukan aksi atau tindakan yang berupa penghimpunan sumber dana dan pengelolaan sumber daya alam dan manusia. Hasil yang diperoleh dari aksi pertama

dapat disebut input kebijakan, sementara aksi yang kedua disebut sebagai proses implementasi kebijakan (Wibawa, 1994: 4). Untuk mengoperasionalkan implementasi program agar tercapainya suatu tujuan serta terpenuhinya misi program diperlukan kemampuan yang tinggi pada organisasi pelaksanaannya.

2.4.3 **Model Pendekatan dan Tahapan Proses Implementasi Kebijakan**

2.4.3.1 **Model Pendekatan Implementasi Kebijakan**

Dalam sejarah perkembangan studi implementasi kebijakan, dijelaskan tentang adanya dua pendekatan guna memahami implementasi kebijakan, yakni *top down* dan *bottom up*. Dalam pendekatan *top down*, implementasi kebijakan yang dilakukan tersentralisir dan dimulai dari aktor tingkat pusat, dan keputusannya pun diambil dari tingkat pusat. Model pendekatan *top-down* yang dirumuskan oleh Donald Van Metter dan Carl Van Horn dalam Agustino (2012: 141-144) disebut dengan *A Model of The Policy Implementation*. Proses implementasi ini merupakan sebuah abstraksi atau performansi suatu implementasi kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan publik yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan berbagai variabel.

Model Van Meter dan Van Horn merupakan model klasik atau model pertama, tepatnya pada tahun 1975. Dalam model ini, implementasi kebijakan berjalan secara linier dari kebijakan publik, implementator, dan kinerja kebijakan publik. Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Dewi (2016: 163) beberapa variable yang dimasukkan sebagai variable yang mempengaruhi kebijakan publik adalah sebagai berikut:

a. Aktivitas implementasi dan komunikasi antarorganisasi;
b. Karakteristik dari agen pelaksana atau implementator;
c. Kondisi ekonomi, sosial, dan politik;
d. Kecenderungan (*disposition*) dari pelaksana atau implementator.

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Dewi (2016: 163), ditinjau dari aspek tipologi kebijakan dan variable bebas, model proses implementasi kebijakan terdiri atas sebagai berikut:

1) Tipologi kebijakan, adalah:
   a) Jumlah masing-masing perubahan yang diharapkan;
   b) Jangkauan atau lingkup kesepakatan atas tujuan antarpihak yang terlibat dalam proses implementasi.
2) Variabel bebas yang memisahkan kebijakan dari proses kerja:
   a) Ukuran dan Tujuan Kebijakan;
   b) Sumber Daya;
   c) Karakteristik Agen Pelaksana;
   d) Sikap/Kecenderungan;
   e) Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik.

Variabel-variabel bebas yang memisahkan kebijakan dari proses kerja dijelaskan oleh Van Metter dan Van Horn dalam Agustino (2012) sebagai berikut:

a) Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilan-nya jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosio-

kultur yang mengada di level pelaksana kebijakan. Ketika ukuran kebijakan atau tujuan kebijakan terlalu ideal untuk dilaksanakan di level warga, maka agak sulit memang merealisasikan kebijakan publik hingga titik yang dapat dikatakan berhasil.

b) Sumber Daya

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Tahap-tahap tertentu dari keseluruhan proses implementasi menuntut adanya sumberdaya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara politik. Selain sumber daya manusia, sumber daya-sumber daya lain juga diperhitungkan juga, ialah sumberdaya finansial dan sumber daya waktu.

c) Karakteristik Agen Pelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat pengimplementasian kebijakan publik. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan (publik) akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya. Misalnya implementasi kebijakan publik yang berusaha untuk merubah perilaku atau tingkah laku manusia secara radikal, maka agen pelaksana projek itu haruslah berkarakteristik keras dan ketat pada aturan serta sanksi hukum.

d) Sikap/Kecenderungan

Sikap penerimaan atau penolakan dari (agen) pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan.

e) Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana

Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan publik. Semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi dan begitu pun sebaliknya.

f) Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik

Sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi biang keladi dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu supaya untuk mengimplementasikan kebijakan harus pula memperhatikan kekondusifan kondisi lingkungan eksternal.

2.4.3.2 **Tahapan unsur-unsur pokok proses implementasi**

Menurut Jones (1994: 166) dalam Nursalam (2010), implementasi merupakan proses yang memerlukan tindakan-tindakan sistematis yang terdiri dari imterpretasi, organisasi dan aplikasi, berikut penjelasannya:

1. *Interpretation*

   Menafsirkan agar program menjadi rencana yang kongkrit dan jelas serta dapat dilaksanakan. Interpretasi berlaku dari para pelaksana kebijakan harus mengetahui dengan baik mengenai substansi kebijakan, makna kebijakan, dan tujuan kebijakan agar penafsiran ini tidak menyimpang dari kebijakan tersebut.

   Dalam proses implementasi, birokrasi pemerintah yang berperan sebagai organisasi pelaksana perlu menginterpretasikan program agar lebih operasional dan siap dilaksanakan dalam hal ini program dirumuskan sebagai proyek, sehingga para pelaksana di lapangan dapat bertindak sesuai dengan rencana proyek tersebut.

2. *Organization*

   Sebagai kegiatan yang bertalian dengan pembentukan atau penataan kembali sumber daya, unit-unit serta metode untuk menjadikan program berjalan. Untuk mencapai tujuan kebijakan pemerintah harus melakukan tindakan dengan pihak yang membuat kebijakan dan juga dengan pihak yang melaksanakan kebijakan yaitu berupa penghimpunan sumber daya

dan pengelolaan sumber daya tersebut. Tujuan organisasi adalah menjalankan program-program yang telah dirancang.

3. *Application*

Adalah tahap penerapan rencana implementasi kebijakan ke kelompok target atau sasaran program atau juga dapat dikatakan sebagai ketentuan yang bersifat tetap dalam pelayanan untuk mencapai sasaran program. Dengan pengerahan segala sumber daya melalui aplikasi ini, diharapkan akan muncul respon dari kelompok sasaran atau lingkungan apakah menerima atau menolak implementasi dan hasil kebijakan tersebut.

2.4.4 **Faktor Penentu Dilaksanakan atau Tidaknya Suatu Kebijakan Publik**

Dalam hal ini Agustino (2012: 157-161) akan memaparkan beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan atau tidaknya suatu kebijakan publik, yaitu:

a) Faktor Penentu Pemenuhan Kebijakan

1. Respeknya Anggota Masyarakat pada Otoritas dan Keputusan Pemerintah

Kodrat manusia bila merujuk pada filsafat John Locke dalam Agustino (2012: 157) dikatakan memiliki *state of nature* yang berkarakter positif. Ini artinya, manusia dapat menerima dengan baik hubungan relasional antar individu. Ketika relasional ini berjalan dengan baik, logikanya bahwa ada sistem sosial yang menggerakan seluruh warga untuk saling hormat-menghormati, memberikan respek

pada otoritas orang tua, memberikan penghargaan yang tinggi pada ilmu dan pengetahuan, menghormati undang-undang yang dibuat oleh politisi, mematuhi aturan hukum yang ditetapkan, mempercayai pejabat-pejabat pemerintah yang menjabat dan macam sebagainya.

2. Adanya Kesadaran Untuk Menerima Kebijakan

   Karena bermain ranah "kesadaran" artinya pemerintah harus mampu merubah *mindset* warga dengan cara sikap dan perilaku yang sesuai dengan *mindset* yang hendak dibentuk oleh aparatur itu sendiri. Sehingga dalam hal ini kesadaran setiap individu sangatlah diperlukan dalam pelaksanaan kebijakan publik.

3. Adanya Sanksi Hukum

   Orang dengan akan sangat terpaksa mengimplementasikan dan melaksanakan suatu kebijakan karena ia takut terkena sanksi hukuman, misalnya: denda, kurungan dan sanksi-sanksi lainnya. Karena adanya sanksi hukum merupakan salah satu strategi yang sering digunakan oleh aparatur administrasi atau aparatur birokrasi dalam pelaksanaan implementasi kebijakan publik.

4. Adanya Kepentingan Publik

   Masyarakat meyakini bahwa kebijakan publik dibuat dan sesuai secara sah, sehingga masyarakat menyadari dan bersedia melaksanakan kebijakan tersebut, dan kebijakan tersebut berkaitan dengan kepentingan mereka.

5. Adanya kepentingan Pribadi

   Seseorang akan dengan senang hati menerima kebijakan publik apabila mereka memperoleh keuntungan secara langsung dari proyek implementasi kebijakan itu.

6. Masalah Waktu

   Suatu kebijakan yang ditentukan pemerintah jika bertentangan dengan kepentingan publik, secara langsung maupun tidak langsung masyarakat akan menolak kebijakan-kebijakan itu. Namun seiring dengan berjalannya waktu, pada akhirnya warga mampu menerima kebijakan yang dulu tidak diterima. Sebagai contohnya kenaikan BBM.

b) Faktor Penentu Penolakan atau Penundaan Kebijakan

Menurut Agustino (2012: 6) ada beberapa faktor penentu penolakan atau penundaan kebijakan, sebagai berikut:

1. Adanya kebijakan yang bertentangan dengan sistem nilai yang mengada.
2. Tidak adanya kepastian hukum.
3. Adanya keanggotaan seseorang dalam suatu organisasi.
4. Adanya konsep ketidakpatuhan selektif terhadap hukum.

2.4.5 **Faktor Penghambat dan Faktor Pendukung Implementasi Kebijakan**

Tidak semua implementasi kebijakan bisa berjalan dengan baik, setiap implementasi kebijakan pasti mengandung resiko kegagalan. Hogwood dan Gunn

dalam Wahab (2008: 61-62) telah membagi pengertian kegagalan kebijakan (*policy failure*) dalam dua kategori:

a. *Non Implementation* (tidak terimplementasikan), artinya bahwa suatu kebijakan tidak dilaksanakan sesuai dengan rencana, dimungkinkan karena pihak-pihak yang terlibat di dalam pelaksanaannya tidak mau bekerja sama, atau mereka telah bekerja secara tidak efisien, setengah hati ataupun karena mereka tidak sepenuhnya menguasai permasalahan.
b. *Unsuccesfull Implementation* (implementasi yang tidak berhasil) artinya manakala suatu kebijakan tertentu telah dilaksanakan sesuai dengan rencana, namun mengingat kondisi eksternal ternyata tidak menguntungkan. Kebijakan tersebut tidak berhasil dalam mewujudkan dampak atau hasil akhir yang dikehendaki. Biasanya kebijakan yang memiliki resiko untuk gagal tersebut disebabkan oleh faktor-faktor berikut: pelaksananya yang buruk (*bad execution*), kebijakan sendiri yang buruk (*bad policy*) dan kebijakan itu bernasib buruk (*bad luck*).

Soenarko (2000: 185) berpendapat bahwa kegagalan pelaksanaan kebijakan itu disebabkan oleh beberapa masalah, yaitu:

1) Teori yang menjadi dasar kebijakan itu tidak tepat, karenanya harus dilakukan *reformulation* terhadap kebijakan tersebut.
2) Sarana yang dipilih untuk pelaksanaan tidak efektif.
3) Sarana itu mungkin tidak tau bahkan kurang dipergunakan sebagaimana mestinya.
4) Isi dari kebijakan itu bersifat samar-samar.
5) Ketidakpastian faktor internal dan eksternal.
6) Kebijakan yang ditetapkan itu mengandung banyak lubang, dalam pelaksanaan kurang memperhatikan masalah-masalah teknis.
7) Adanya kekurangan atau tersedianya sumber-sumber pembantu (waktu, uang, dan sumber daya manusia).

Berdasarkan penjelasan tentang hal-hal yang dapat menyebabkan kegagalan dalam melaksanakan sebuah kebijakan tersebut, maka dapat diketahui bahwa dalam pembentukan suatu kebijakan tersebut tidaklah semata-mata hanya disebabkan oleh ketidakmampuan para pelaksana atau implementor, melainkan dapat pula disebabkan oleh pembentukan kebijakannya yang kurang sempurna. Dari sini implementor berperan penting dalam mengambil kebijakan, dan untuk mencapai

tujuan pokok kebijakan tersebut, maka perlu diadakan *reformulation*. Selain faktor penghambat tersebut, juga terdapat faktor-faktor pendukung dalam implementasi kebijakan. Anderson dalam Islamy (2009: 108-110) menjelaskan sebab-sebab anggota masyarakat melaksanakan kebijakan, yaitu:

1) Respek anggota masyarakat terhadap otoritas dan keputusan-keputusan badan pemerintah.
2) Adanya kesadaran untuk menerima kebijakan.
3) Adanya keyakinan bahwa kebijakan itu dibuat secara sah, konstitusional dan dibuat oleh pejabat pemerintah yang berwenang melalui prosedur yang telah ditetapkan.
4) Sikap menerima dan melaksanakan kebijakan publik karena kebijakan-kebijakan kontroversional yang lebih banyak mendapatkan penolakan warga masyarakat dalam pengimplementasiannya.

Menurut Soenarko (2000: 186), faktor pendukung keberhasilan suatu implementasi kebijakan meliputi:

1) Persetujuan, dukungan dan kepercayaan masyarakat.
2) Isi dan tujuan kebijakan haruslah dimengerti secara jelas terlebih dahulu.
3) Pelaksanaan harus mempunyai informasi yang cukup, terutama mengenai kondisi dan kesadaran masyarakat yang menjadi kelompok sasaran.
4) Pembagian pekerjaan yang efektif dalam pelaksanaan.
5) Pembagian kekuasaan dan wewenang yang rasional dalam pelaksanaan kebijakan.
6) Pemberian tugas-tugas dan kewajiban-kewajiban yang memadai dalam pelaksanaan kebijakan.

2.4.6 **Komunikasi**

Menurut Edward III dalam Widodo (2010: 97), komunikasi diartikan sebagai "proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan". Informasi mengenai kebijakan publik menurut Edward III dalam Widodo (2010: 97) perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mengetahui apa yang harus mereka persiapkan dan lakukan untuk menjalankan

kebijakan tersebut sehingga tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai dengan yang diharapakan.

Menurut Edward III dalam Widodo (2010: 97), komunikasi kebijakan memiliki beberapa dimensi, antara lain dimensi transmisi (*trasmission*), kejelasan (*clarity*) dan konsistensi (*consistency*). Ketiga dimensi tersebut dijelaskan oleh Edward III dalam Widodo (2010: 97) sebagai berikut:

1) Dimensi transmisi menghendaki agar kebijakan publik disampaikan tidak hanya disampaikan kepada pelaksana (*implementors*) kebijakan tetapi juga disampaikan kepada kelompok sasaran kebijakan dan pihak lain yang berkepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung.
2) Dimensi kejelasan (*clarity*) menghendaki agar kebijakan yang ditrasmisikan kepada pelaksana, target grup dan pihak lain yang berkepentingan secara jelas sehingga diantara mereka mengetahui apa yang menjadi maksud, tujuan, sasaran, serta substansi dari kebijakan publik tersebut sehingga masing-masing akan mengetahui apa yang harus dipersiapkan serta dilaksanakan untuk mensukseskan kebijakan tersebut secara efektif dan efisien.
3) Dimensi konsistensi (*consistency*) diperlukan agar kebijakan yang diambil tidak simpang siur sehingga membingungkan pelaksana kebijakan, target grup dan pihak-pihak yang berkepentingan.

2.4.7 **Sumber-Sumber**

Sumber-sumber merupakan faktor yang penting dalam melaksanakan kebijakan publik. Sumber-sumber yang penting itu meliputi staf sebagai beberapa orang yang melaksanakan tugas-tugas mereka serta fasilitas yang dibutuhkan.

Menurut Edwards dalam Winarno (2016: 161), sumber-sumber meliputi, antara lain:

1) Staf

Barangkali sumber yang paling penting dalam melaksanakan kebijakan adalah staf. Ada satu hal yang harus diingat adalah bahwa

jumlah tidak selalu mempunyai efek positif bagi implementasi kebijakan. Hal ini berarti bahwa jumlah staf yang banyak tidak secara otomatis mendorong implementasi yang berhasil. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kecakapan yang dimiliki oleh para pegawai pemerintah ataupun staf, namun di sisi yang lain kekurangan staf juga akan menimbulkan persoalan yang pelik menyangkut implementasi kebijakan yang efektif.

2) Informasi

Informasi merupakan sumber penting yang kedua dalam implementasi kebijakan. Informasi mempunyai dua bentuk. Pertama, informasi mengenai bagaimana melaksanakan suatu kebijakan. Pelaksana-pelaksana perlu mengetahui apa yang dilakukan dan bagaimana mereka harus melakukannya. Dengan demikian, para pelaksana kebijakan harus diberi petunjuk untuk melaksanakan kebijakan. Bentuk kedua, dari informasi adalah data tentang ketaatan personel-personel lain terhadap peraturan-peraturan pemerintah. Pelaksana-pelaksana harus mengetahui apakah orang-orang lain yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan mentaati undang-undang ataukah tidak.

Informasi mengenai program-program adalah penting terutama bagi kebijakan-kebijakan baru atau kebijakan-kebijakan yang melibatkan persoalan-persoalan teknis, seperti misalnya, kebijakan mengenai otonomi daerah dan rumah sakit swadana. Kegiatan-kegiatan rutin,

seperti membagi dana, membangun jalan-jalan, mempekerjakan pengetik, atau membeli barang-barang relatif langsung dalam pelaksanannya, dan informasi tentang bagaimana melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut banyak. Tidak demikian halnya dengan pelaksana-pelaksana suatu kebijakan baru, seperti otonomi daerah dan kebijakan pemerintah mengenai rumah sakit swadana tadi, para pelaksana kebijakan harus dijelaskan bagaimana kebijakan-kebijakan tersebut harus dilaksanakan.

Kurangnya pengetahuan tentang bagaimana mengimplementasikan kebijakan mempunyai beberapa konsekuensi secara langsung. Pertama, beberapa tanggung jawab secara sungguh-sungguh tidak akan dapat dipenuhi atau tidak dapat dipenuhi tepat pada waktunya. Kedua, ketidakefisienan. Kebijakan yang tidak tepat menyebabkan unit-unit pemerintahan lain atau organisasi-organisasi dalam sektor swasta membeli perlengkapan, mengisi formulir, atau menghentikan kegiatan-kegiatan yang tidak diperlukan.

3) Wewenang

Sumber-sumber lain yang penting dalam pelaksanaan adalah wewenang. Wewenang ini akan berbeda-beda dari satu program ke program yang lain serta mempunyai banyak bentuk yang berbeda, seperti misalnya: hak untuk mengeluarkan surat panggilan untuk datang ke pengeadilan; mengajukan masalah-masalah ke pengadilan; mengeluarkan perintah kepada para pejabat lain; menarik dana dari suatu

program menyediakan dana, staf dan bantuan teknis kepada pemerintah daerah; membeli barang-barang dan jasa; atau memungut pajak.

Lindblom dalam Situmorang (2016: 238) menyatakan bahwa kewenangan dapat dipahami dengan sebaik-baiknya kalau kita mengenal dua jalur di mana berbagai orang menggunakan metode kontrol. Pada jalur pertama, setiapkali bila seseorang ingin mengunakan berbagai metode kontrol, ia menerapkan berbagai metode kontrol (antara lain persuasi, ancaman, dan tawaran keuntungan) terhadap orang-orang yang akan dikontrolnya. Pada jalur kedua, pihak pengontrolnya hanya kadang-kadang saja mengunakan metode-metode itu untuk membujuk orang-orang yang dikontrolnya agar mentaati peraturan yang ada bahwa mereka harus tunduk terhadapnya. Untuk jalur kedua ini, Lindblom dalam Winarno (2016: 165) menegaskan bahwa hanya jalur kedua yang menetapkan kewenangan.

Seperti diungkapkan Lindblom dalam Situmorang (2016: 238), jika saya mentaati peraturan untuk tunduk kepada anda, maka anda mempunyai kewenangan terhadap saya. Dengan demikian, merujuk pada jalur kedua yang dikemukakan oleh Lindblom dalam Winarno (2016: 165) ini maka kontrol tidak berarti kewenangan, sebab kewenangan ada hanya jika satu pihak bersepakat terhadap dirinya sendiri untuk mentaati aturan yang dikemukakan oleh pihak lain.

Dari sini lantas Lindblom dalam Situmorang (2016: 239) mengemukakan ciri-ciri kewenangan, yakni: kewenangan selalu bersifat

khusus; kewenangan, baik sukarela maupun paksaan, merupakan konsesi dari mereka yang tersedia tunduk; kewenangan itu rapuh; dan yang terakhir, kewenangan terdiri dari dua hal pokok, yakni; Pertama, sebagian orang beranggapan bahwa mereka lebih baik jika ada seseorang yang memerintah. Kedua, kewenangan mungkin juga ada karena adanya ancaman, teror, dibujuk, diberi keuntungan dan lain sebagainya.

4) Fasilitas

Fasilitas fisik bisa pula merupakan sumber-sumber penting dalam implementasi. Seorang pelaksanakan mungkin mempunyai staf yang memadai, mungkin memahami apa yang harus dilakukan, dan mungkin mempunyai wewenang untuk melakukan tugasnya, tetapi tanpa bangunan sebagai kantor untuk melakukan koordinasi, tanpa perlengkapan, tanpa perbekalan, maka besar kemungkinan implementasi yang direncanakan tidak akan berhasil.

Berdasarkan penjelasan diatas tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa sumber-sumber merupakan faktor yang penting dalam melaksanakan kebijakan publik. Dengan tidak adanya sumber-sumber, maka kebijakan tidak dapat terlaksana dengan baik, dan hanya menjadi sebuah rencana saja. Sumber-sumber yang mendukung dalam implementasi kebijakan antara lain; staf, informasi, wewenang dan fasilitas. Masing-masing sumber tersebut memiliki tempat berbeda yang berperan penting dalam pelaksanaan kebijakan. Staf, sebagai pelaksana harus mempunyai ketrampilan dalam mengimplementasikan tugas-tugas. Informasi, dalam pelaksanaan kebijakan informasi menjadi bagian yang penting untuk

mengetahui bagaimana implementasi kebijakan. Wewenang, menjadi sumber penting dalam implementasi kebijakan karena wewenang dibutuhkan untuk mengatur personil-personil lainnya. Fasilitas, menjadi sumber penting terakhir namun berperan banyak dalam implementasi kebijakan, adanya fasilitas fisik dapat mendukung pelaksanaan implementasi sebagai sarana menyalurkan implementasi kebijakan.

2.5 **Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) Beji Lintar**

Kebutuhan masyarakat akan tersedianya sumber listrik semakin hari semakin meningkat. Hal yang sama juga terjadi terhadap para pedagang atau penyedia jasa yang berjualan di tempat-tempat umum. Mereka memanfaatkan listrik untuk keperluan penerangan, sebagai penggerak alat produksi atau mengoperasikan peralatan untuk menghasilkan suatu produk yang disajikan ke konsumen. Tetapi karena askes sambungan listrik yang legal tidak ada di tempat-tempat umum, tidak jarang dari mereka melakukan pencurian listrik atau penyambungan dari tempat-tempat lainnya yang berisiko membahayakan bagi masyarakat sekitar. Oleh karenanya PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya berinisiatif melakukan terobosan dengan menyediakan akses tenaga listrik secara legal dan aman untuk memenuhi kebutuhan mereka.



Gambar 2. Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) Beji Lintar
Sumber: Fontana, Avanti, dan Zainal Arifin (2016: 397)

Dasar hukum Program Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) Beji Lintar adalah mengacu pada Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor: 0017.P/DIR/2015 tentang Program Peningkatan dan Pengendalian Penjualan Tenaga Listrik, tepatnya pada Pasal 12 ayat 2. Dalam Pasal tersebut dijelaskan bahwa Unit PLN dapat memasang APP sistem prabayar untuk penggunaan khusus seperti pasar malam, pedagang kaki lima, kegiatan umum/sosial (lapangan olah raga), pos ronda atas nama PLN setempat (IDPEL PLN) dengan daya dibatasi maksimum 5500 VA dan dikenakan tarif Layanan Khusus TR dengan faktor pengali N=1.

Adapun manfaat yang bisa diperoleh dari Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) Beji Lintar:

1. Menyediakan akses tenaga listrik yang legal dan aman bagi masyarakat pengguna.
2. Bisa digunakan oleh siapa saja yang membutuhkan listrik.
3. Mudah penggunaannya seperti menggunakan listrik di rumah. Pengguna memasukkan kode token agar kredit energi listrik terisi ke meter dan mereka bisa menikmati listrik saat itu juga.
4. Mengurangi jumlah pencurian listrik.

Outcome yang diharapkan oleh PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya terkait telah diimplementasikannya program ini adalah naiknya penjualan tenaga listrik dan turunnya *losses* distribusi karena pemakaian listrik di tempat-tempat umum yang selama ini tidak terukur, berisiko tinggi dan termonitor bisa dikendalikan dengan efektif melalui Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) Beji Lintar ini.

2.6 **Badan Usaha Milik Negara (BUMN)**

Sesuai dengan isi dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 disebutkan bahwa Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki

oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

Sedangkan Perusahaan Perseroan, yang selanjutnya disebut Persero, adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan. Bagi direksi perusahaan yang berbentuk persero terdapat ketentuan perusahaan yang lebih khusus, sebagaimana diatur dalam pasal 6 sampai dengan pasal 17 Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (Persero), sebagaimana telah diubah dengan PP No. 45 Tahun 2001. Keberadaan direksi persero, disamping diatur dalam UUPT juga diatur dalam PP No. 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (Persero).

Dan Perusahaan Perseroan Terbuka, yang selanjutnya disebut Persero Terbuka, adalah Persero yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu atau Persero yang melakukan penawaran umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Disamping itu, terdapat ketentuan lain yang khusus berlaku dalam perusahaan berstatus BUMN, yaitu Keputusan Menteri BUMN No. 117/M-MBU/2002 tanggal 1 Agustus 2002 tentang Penerapan Praktek *Good Corporate Governance* dalam Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dalam ketentuan ini antara lain menyatakan Perusahaan Perseroan (Persero) sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 2 PP No. 12/1998. Oleh karena itu, perusahaan perseroan

(Persero) harus tunduk kepada ketentuan yang diatur dalam Keputusan Menteri BUMN.

Ketentuan tersebut dimaksudkan sebagai perintah dari Menteri BUMN kepada BUMN yang berada di bawah pengawasannya agar menjalankan prinsip *Good Corporate Governance*, disamping sebagai upaya untuk memberikan landasan hukum dan pedoman bagi BUMN dalam melaksanakan *Good Corporate Governance*. Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* meliputi:

1. Transparansi, yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materil dan relevan mengenai perusahaan.
2. Kemandirian, yaitu suatu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa bantuan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak mana pun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
3. Akuntabilitas, yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggung-jawaban organ sehingga perusahaan terlaksana secara efektif.
4. Pertanggung jawaban, yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
5. Kewajaran (*fairness*), yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak *stakeholder* yag timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 **Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Pasolong (2012: 75), penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang mendeskripsikan apa yang terjadi pada saat melakukan penelitian. Di dalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisa dan menginterprestasikan kondisi-kondisi yang sekarang ini terjadi atau ada. Tujuan dari penelitian ini untuk memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan saat ini, dan melihat kaitan antara variabel-variabel yang ada. Penelitian ini tidak menguji hipotesa, melainkan hanya mendeskripsikan informasi apa adanya secara objektif. Oleh karena itu, penelitian deskriptif pada umumnya menggunakan kata tanya "bagaimana" dalam merumuskan kalimat pertanyaan penelitiannya (Sugiyono dalam Pasolong, 2012: 76).

Sedangkan jenis pendekatan kualitatif menurut Pasolong (2012: 74) adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objektif alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Teknik pengumpulan data dilakukan secara induktif. Hasil penelitan kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Jadi penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif merupakan suatu jenis penelitian yang tepat untuk menggambarkan fenomena yang ada dengan cara

mendeskripsikan permasalah yang diteliti secara mendalam dan data yang diperoleh dari proses wawancara, dengan menyampaikan data secara naratif perkataan orang atau kutipan, berbagai teks, atau wacana lain.

3.2 **Fokus Penelitian**

Fokus penelitian adalah hal-hal yang menjadi pusat perhatian dalam penelitian dan untuk memudahkan peneliti dalam menentukan data yang akan diperlukan untuk suatu penelitian. Menurut Moleong (2006: 16) fokus penelitian akan membatasi studi, sehingga penentuan tempat penelitian menjadi layak dan penentuan fokus penelitian yang tepat akan mempermudah menyari informasi secara tepat. Jadi kemampuan peneliti dalam menentukan fokus penelitian yang tepat dapat berpengaruh pada ketajaman analisis. Adapun fokus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Implementasi Program Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) Beji Lintar di PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya Area Ciracas.
    a. Aktor dan Pelaku dalam Implementasi Program Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) Beji Lintar.
    b. Tujuan dan Sasaran Program.
    c. Sumber Daya.
    d. Sosialisasi Program.
    e. Proses Tahapan Implementasi Program.

2. Faktor Penghambat dan Pendukung dari Implementasi Program Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) Beji Lintar di PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya Area Ciracas.
   a. Faktor Pendukung.
   b. Faktor Penghambat.

3.3 **Lokasi dan Situs Penelitian**

Lokasi penelitian adalah tempat peneliti menangkap keadaan yang sebenarnya dari objek yang akan diteliti. Untuk menentukan lokasi yang akan diteliti, terdapat beberapa faktor yang harus dipertimbangkan oleh peneliti. Menurut Moleong (2006: 127), cara terbaik yang perlu ditempuh dalam penentuan lokasi penelitian ini adalah dengan jalan mempertimbangkan teori substantif, pergilah dan jajakilah ke lapangan untuk melihat apakah terdapat kesesuaian dengan kenyataan yang ada di lapangan.

Berdasarkan acuan diatas, maka penelitian ini mengambil lokasi di Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Sedangkan situs penelitian yakni pada PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya Area Ciracas. Dengan situs penelitian yang telah ditetapkan tersebut maka dapat diperoleh informasi data yang lengkap berkaitan dengan fokus penelitian.

3.4 **Jenis dan Sumber Data**

Sumber data menunjukkan dari mana peneliti mendapatkan data atau informasi yang diperlukan dalam penelitian, dapat berupa orang atau benda.

Sedangkan menurut Arikunto (2006: 114), yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subyek darimana data diperoleh. Jenis data yang menunjang penelitian ini meliputi:

1. Data Primer

   Merupakan data dan informasi yang diperoleh secara langsung dari informan pada saat dilaksanakannya penelitian, adapun informan terdiri dari:

   a) Manajer PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya Area Ciracas.
   b) Pegawai PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya Area Ciracas.
   c) Pengguna Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) Beji Lintar.

2. Data Sekunder

   Adalah data yang terlebih dahulu ditelusuri dan dilaporkan oleh orang lain diluar peneliti, tidak secara langsung berhubungan dengan responden. Data sekunder meliputi:

   a) Dokumen-dokumen.
   b) Arsip-arsip.
   c) Catatan-catatan dan laporan resmi yang berkaitan dengan penelitian ini.
   d) Rekaman media massa, jurnal-jurnal atau sumber lain.

3.5 **Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data yaitu proses menggali data di lapangan, sedangkan teknik yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode triangulasi

(gabungan) dengan membuat *focus group discussion*. Metode triangulasi merupakan metode gabungan dari tiga metode pengumpulan data yaitu:

1. *Interview* (Wawancara)

   Yaitu merupakan komunikasi langsung antara peneliti sebagai *interviewer* dengan nara sumber atau orang-orang yang berkaitan erat dengan obyek penelitian sebagai *enterviewer*. Maksud diadakannya wawancara menurut Lincoln dan Guba, yang dikutip oleh Moleong (2006: 135) antara lain: mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian dan lain-lain kebulatan; merekonstruksi kebulatan-kebulatan demikian sebagai yang dialami masa lalu; memproyeksikan kebulatan-kebulatan sebagai yang telah diharapkan untuk dialami pada masa yang akan datang; memverifikasi, mengubah dan memperluas informasi yang diperoleh dari orang lain, baik manusia maupun bukan manusia (triangulasi); dan memverifikasi, mengumbah dan memperluas konstruksi yang dikembangkan oleh peneliti.

2. Dokumentasi

   Pengumpulan data dengan metode dokumentasi merupakan penggalian data yang datanya bersumber dari dokumen-dokumen tertulis yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Sedangkan definisi sejenis, yang diberikan Arikunto (2006: 236), bahwa yang dimaksud dengan metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau

variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda dan dan sebagainya.

3. Observasi (Pengamatan)

   Pengamatan secara langsung terhadap keadaan obyek yang diteliti dan terhadap kejadian atau peristiwa yang terjadi di lapangan. Dalam pengertian psikologik, menurut Arikunto (2006: 146), bahwa observasi atau pengamatan meliputi kegiatan pemuatan perhatian terhadap sesuatu obyek dengan menggunakan seluruh alat indera.

3.6 **Instrumen Penelitian**

Instrumen atau alat penelitian adalah alat yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Menurut Arikunto (2006: 160), yang dimaksud dengan instrumen penelitian adalah alat-alat atau fasilitas yang dipergunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, dalam arti lebih cermat, lengkap dan sistematis sehingga lebih mudah diolah.

Instrumen untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini, antara lain:

1. Peneliti sendiri, artinya peneliti sebagai instrument pengamat yang melakukan pengamatan, mencatat fenomena objek yang terjadi dengan dibekali pengetahuan serta penguasaan terhadap permasalahan yang akan diteliti.

2. Pedoman Wawancara (*Interview Guide*), instrument ini dipergunakan sebagai pedoman dalam melakukan wawancara dengan narasumber untuk memperoleh data yang sesuai dengan fokus penelitian.
3. Catatan Lapangan (*Field Note*) yaitu berupa catatan-catatan yang dipergunakan untuk mencatat informasi utama selama peneliti melakukan observasi.

3.7 **Keabsahan Data**

Keabsahan data merupakan standar kebenaran suatu data hasil penelitian yang lebih menekankan pada data atau informasi dari pada sikap dan jumlah orang. Keabsahan data dimaksud untuk memperoleh tingkat kepercayaan yang berkaitan dengan seberapa jauh kebenaran hasil penelitian, mengungkapkan data, dan memperjelas data dengan fakta-fakta aktual di lapangan. Sugiyono dalam Pasolong (2012: 181-183) memberikan rujukan bahwa dalam pengujian keabsahan data, penelitian kualitatif menggunakan istilah yang berbeda dengan penelitian kuantitatif, Uji keabsahan dalam penelitian kualitatif meliputi uji sebagai berikut:

1) Uji Kredibilitas (*Credibility*)

Uji Kredibilitas yaitu uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi, dan analisis kasus.

Perpanjangan waktu penelitian dilakukan untuk meningkatkan kepercayaan atau kredibilitas data. Dalam artian bahwa peneliti harus kembali ke lapangan melakukan observasi, wawancara dengan responden atau responden yang baru.

Meningkatkan ketekunan yaitu melakukan pengamatan secara lebih dan cermat. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat ditekan secara pasti dan sistematis.

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas yaitu sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu.

Dalam artian bahwa triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu.

Analisis kasus negatif adalah kasus yang tidak sesuai atau berbeda dengan hasil penelitian hingga pada saat tertentu. Analisis kasus negative yaitu peneliti mencari data yang berbeda atau bahkan bertentangan dengan data yang telah ditemukan. Bila tidak ada lagi data yang berbeda atau bertentangan dengan temuan berarti data sudah dapat dipercaya.

Menggunakan bahan referensi yaitu adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Misalnya data hasil observasi perlu didukung oleh data foto atau gambar.

Member check yaitu pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada sumber data. Tujuannya adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh sumber data. Jika data yang ditemukan disetujui oleh sumber data berarti data tersebut valid, sehingga semakin kredibel atau dapat dipercaya.

2) Uji Keteralihan (*Transferability*)

Uji *Transferability* yaitu merupakan validitas eksternal dalam penelitian kuantitatif, Sedangkan yang dimaksudkan dengan validitas eksternal menunjukkan derajat ketepatan dan penerapan hasil penelitian pada populasi dimana sampel tersebut diambil. Nilai transfer berkenaan dengan pertanyaan, hingga hasil penelitian dapat diterapkan dalam situasi tertentu. Bagi peneliti kualitatif, nilai transfer tergantung pada pengguna, Oleh karena itu agar orang lain dapat menerima hasil penelitian kualitatif sehingga memungkinkan untuk menerapkan hasil penelitian tersebut, maka peneliti dalam menyusun laporannya harus memberikan uraian yang jelas dan sistematis atas hasil penelitian tersebut.

3) Uji Kebergantungan (*Dependability*)

Uji *Dependability* yaitu dalam penelitian kualitatif, uji *dependability* dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Misalnya peneliti tidak melakukan proses penelitian di lapangan, tetapi dapat memberikan data. Peneliti seperti ini perlu diuji *dependability*-nya. Maka hasil penelitian ini tidak *reliable* atau *dependable*. Untuk itu pengujian *dependability* dilakukan dengan cara melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian.

4) Uji Kepastian (*Confirmability*)

Uji *Confirmability* yaitu dalam penelitian kuantitatif disebut uji objektivitas. Penelitian dikatakan objektif bila hasil penelitian telah diterima oleh orang lain. Dalam penelitian kualitatif, uji *confirmability* mirip dengan uji *dependability*, sehingga pengujiannya dapat dilakukan bersamaan. Menguji *confirmability* berarti menguji hasil penelitian dikaitkan dengan proses penelitian. Bila hasil penelitian didapat melalui proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar *confirmability*. Dalam artian bahwa jangan sampai proses penelitian tidak ada, tetapi hasil penelitian ada.

3.8 **Analisis Data**

Analisis data adalah proses mencari dan meyusun data secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2012: 244).

Teknik analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Dalam hal ini Nasution dalam Sugiyono (2012: 245) menyatakan analisis telah mulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan, dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian.

Terkait dengan itu, teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis Miles, Huberman dan Saldana (2014) yang berupa analisis data model interaktif. Menurut Miles, Huberman dan Saldana (dalam Rini Lestari, 2015: 473) di dalam analisis data kualitatif terdapat tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, diantaranya yaitu:

1. *Data Condensation* (Kondensasi Data)

   Kondensasi data adalah merujuk pada proses memilih, menyederhanakan, mengabstrakkan dan atau mentransformasikan data yang mendekati keseluruhan bagian dari catatan-catatan lapangan secara

tertulis, transkip wawancara, dokumen-dokumen dan materi-materi empiris lainnya.

2. *Data Display* (Penyajian Data)

   Penyajian data adalah pengorganisasian, penyatuan dari informasi yang memungkinkan penyimpulan dan aksi. Penyajian data membantu dalam memahami apa yang terjadi dan untuk melakukan sesuatu, termasuk analisis yang lebih mendalam atau mengambil aksi berdasarkan pemahaman.

3. *Conclusion Drawing/Verifications* (Penarikan Kesimpulan)

   Penarikan kesimpulan merupakan langkah terakhir yang digunakan dalam menganalisis data yang telah tersaji. Berawal dari permulaan pengumpulan data, seorang penganalisis kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab-akibat dan proposisi. Kesimpulan ini merupakan jawaban dari setiap rumusan masalah dan pertanyaan yang telah dituliskan oleh peneliti sejak awal sebelum dilaksanakan penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

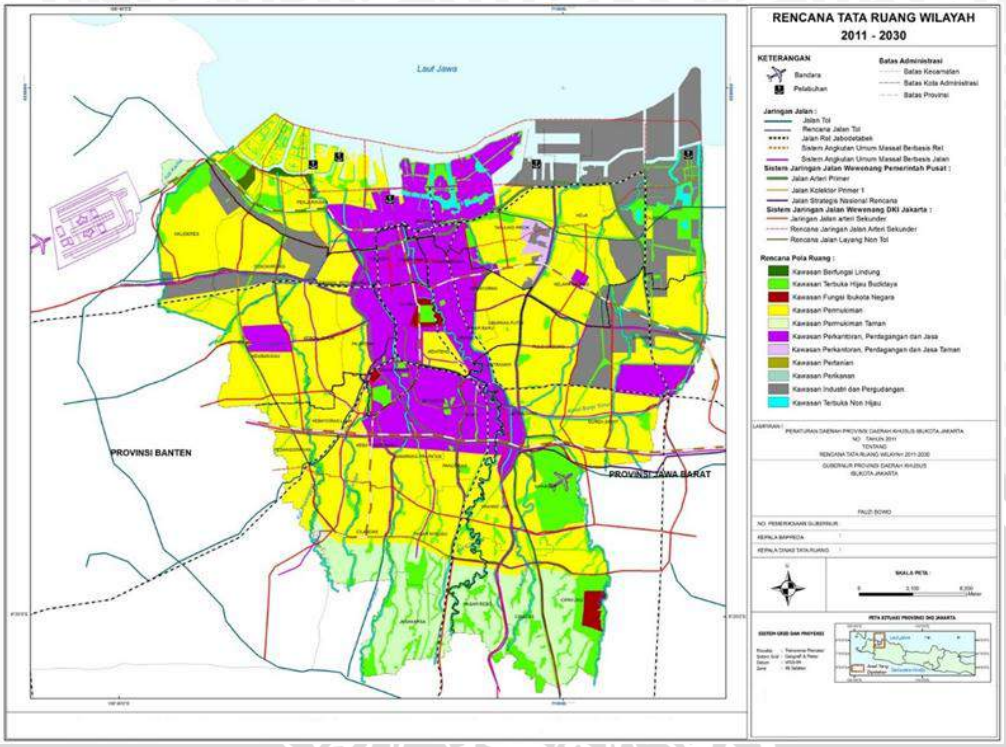
4.1 Gambaran Umum Lokasi dan Situs Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Daerah Khusus Ibukota Jakarta

4.1.1.1 Kondisi Geografis

Mengacu kepada Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Akhir Masa Jabatan 2007 – 2012 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Provinsi DKI Jakarta terletak pada posisi 6º12' Lintang Selatan dan 106º48' Bujur Timur dan merupakan dataran rendah dengan ketinggian 7 meter di atas permukaan laut. Berdasarkan SK Gubernur Nomor 171 tahun 2007, luas wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Jakarta adalah 7.639,83 km², dengan luas daratan 662,33 km² (termasuk 110 pulau yang tersebar di Kepulauan Seribu) dan luas lautan 6.977,5 km².

Berdasarkan posisi geografisnya, Provinsi DKI Jakarta memiliki batas-batas: di sebelah utara membentang pantai dari Barat sampai ke Timur sepanjang ± 35 km yang menjadi tempat bermuaranya 13 sungai, 2 buah kanal, yang berbatasan dengan Laut Jawa. Letak geografis di wilayah Utara sebagai muara 13 sungai yang melintas di Jakarta, menyebabkan Jakarta rawan genangan, baik karena curah hujan maupun karena semakin tingginya air laut pasang (rob). Sementara itu disebelah selatan dan timur berbatasan dengan wilayah Provinsi Jawa Barat, sebelah barat dengan Provinsi Banten.



Gambar 3. Peta Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Sumber: Badan Pusat Statistik

Dalam struktur wilayah administrasi, Jakarta mengalami pemekaran wilayah pada tahun 2001 yakni dari 5 kotamadya menjadi 1 kabupaten administrasi dan 5 kota administrasi. Wilayah Administrasi Provinsi DKI Jakarta terbagi menjadi lima wilayah kota Administrasi dan 1 (satu) Kabupaten Administrasi, yakni kota Jakarta Selatan dengan luas daratan 141,27 km², Jakarta Timur dengan luas daratan 188,03 km², Jakarta Pusat dengan luas daratan 48,13 km², Jakarta Barat dengan luas daratan 129,54 km² dan Jakarta Utara dengan luas daratan 146,66 km², serta Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dengan luas daratan 8,70 km².

4.1.1.2 **Klimatologi**

Jakarta beriklim tropis sebagaimana di Indonesia pada umumnya, dengan karakteristik musim penghujan rata-rata pada bulan Oktober hingga Maret dan musim kemarau pada bulan April hingga September. Cuaca di kawasan Jakarta dipengaruhi oleh angin laut dan darat yang bertiup secara bergantian antara siang dan malam. Suhu udara harian rata-rata di daerah pantai umumnya relatif tidak berubah, baik pada siang maupun malam hari. Suhu harian rata-rata berkisar antara 26 – 28 °C. Perbedaan suhu antara musim hujan dan musim kemarau relatif kecil. Hal tersebut dapat dipahami oleh Karena perubahan suhu udara di kawasan Jakarta seperti halnya wilayah lainnya di Indonesia tidak dipengaruhi oleh musim, melainkan oleh perbedaan ketinggian wilayah.

4.1.1.3 **Topografi**

Wilayah Jakarta merupakan dataran rendah yang sebagian besar terdiri dari lapisan batu endapan zaman *Pleitosen* yang batas lapisan atasnya berada 50 meter di bawah permukaan tanah. Bagian selatan merupakan bagian yang terdiri atas lapisan *alluvial*, sedangkan dataran rendah pantai merentang ke bagian pedalaman sekitar 10 km dan di bawahnya terdapat lapisan endapan yang lebih tua yang tidak tampak pada permukaan tanah karena seluruhnya merupakan *endapan alluvium*. Di bawah bagian utara, permukaan keras baru terdapat pada kedalaman 10–25 m, makin ke selatan permukaan keras semakin dangkal pada

kedalaman 8–15 m, pada bagian kota tertentu, lapisan permukaan tanah yang keras terdapat pada kedalaman 40 m.

4.1.1.4 **Kependudukan**

Jumlah penduduk Kota Jakarta dari 2007 sampai dengan 2011 terus bertambah. Pada tahun 2007 jumlah penduduk hanya 9.064.591 ribu jiwa sedangkan tahun 2010 mencapai 9.761,992 ribu jiwa. Pada kurun waktu 2007-2009, jumlah penduduk perempuan sedikit lebih banyak dibandingkan laki-laki, sedangkan pada 2010-2011, jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan perempuan.

Tabel 5. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin, Rasio Jenis Kelamin pada Kabupaten/Kota Administrasi, 2012

Kabupaten/Kota Administrasi	Jenis Kelamin		Jumlah	Rasio Jenis Kelamin
	Laki-Laki	Perempuan		
Kepulauan Seribu	11.233	10.987	22.220	102,24
Jakarta Selatan	1.081.850	1.066.411	2.148.261	101,45
Jakarta Timur	1.420.261	1.381.523	2.801.784	102,80
Jakarta Pusat	458.088	450.741	908.829	101,63
Jakarta Barat	1.216.220	1.178.910	2.395.130	103,16
Jakarta Utara	855.222	860.342	1.715.564	99,40

Sumber: Proyeksi Penduduk dari Hasil Sensus Penduduk 2010

Selanjutnya, jumlah penduduk dan laju pertumbuhan penduduk menurut Kabupaten/Kota Administrasi pada Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011 – 2012 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 6. Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota Administrasi, 2011 – 2012

Kabupaten/Kota Administrasi	Penduduk		Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun	
	2011	2012	2010 – 2011	2010 – 2012
Kepulauan Seribu	21.875	22.220	1,65	1,58
Jakarta Selatan	2.126.833	2.148.261	1,08	1,01
Jakarta Timur	2.775.956	2.801.784	1,00	0,93
Jakarta Pusat	906.752	908.829	0,23	0,23
Jakarta Barat	2.362.656	2.395.130	1,45	1,37
Jakarta Utara	1.679.871	1.715.564	1,12	1,04
Jumlah	9.891.943	9.991.788	1,08	1,01

Sumber: Proyeksi Penduduk dari Hasil Sensus Penduduk 2010

Adapun data mengenai luas wilayah, penduduk dan kepadatan penduduk menurut Kabupaten/Kota Administrasi pada Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 7. Luas Wilayah, Penduduk dan Kepadatan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota Administrasi, 2012

Kabupaten/Kota Administrasi	Luas (Km^2)	Penduduk (Orang)	Kepadatan Penduduk (Km^2)
Kepulauan Seribu	8,70	22.220	2.554,02
Jakarta Selatan	141,27	2.148.261	15.206,77
Jakarta Timur	188,03	2.801.784	14.900,73
Jakarta Pusat	48,13	908.829	18.882,80
Jakarta Barat	129,54	2.395.130	18.489,50
Jakarta Utara	146,66	1.715.564	11.697,56
Jumlah	662,33	9.991.788	15.085,82

Sumber: Proyeksi Penduduk dari Hasil Sensus Penduduk 2010

4.1.2 **Gambaran Umum Kota Jakarta Timur**

4.1.2.1 **Kondisi Geografis**

Kota Administrasi Jakarta Timur merupakan bagian wilayah Provinsi DKI Jakarta yang terletak antara 106º49'35" Bujur Timur dan 06º10'37" Lintang selatan, memiliki luas wilayah 188,42 km². Luas wilayah itu merupakan 28,39% dari luas wilayah Provinsi DKI Jakarta atau sekitar 662,33 km², terdiri dari 10 kecamatan dan 65 kelurahan. Penduduk yang menghuni wilayah ini sekitar 2.634.906 jiwa.

Wilayah Kota Madya Jakarta Timur memiliki perbatasan diantaranya:

- Sebelah Utara: Kotamadya Jakarta Utara dan Jakarta Pusat
- Sebelah Timur: Kotamadya Bekasi
- Sebelah Selatan: Kabupaten Bogor
- Sebelah Barat: Kotamadya Jakarta Selatan

Sebagai wilayah dataran rendah yang letaknya tidak jauh dari pantai. Tercatat 5 sungai mengaliri Kotamadya Jakarta Timur. Sungai-sungai tersebut antara lain Sungai Ciliwung, Sungai Sunter, Kali Malang, Kali Cipinang dan Cakung *drain* di bangian utara wilayah ini. Sungai-sungai tersebut pada musim puncak hujan pada umumnya tidak mampu menampung air sehingga beberapa kawasan tergenang banjir. Pada tahun 2006 curah hujan rata-rata mencapai 163,7 mm dengan curah hujan tertinggi pada bulan maret yaitu 381 mm.

Tekanan udara sekitar 1.009,2 mb dan kelembapan udara rata-rata 79,0%. Kecepatan angin 4,1 knot serya arah angin pada bulan maret ke arah utara, April – September ke arah timur laut, dan Oktober – Desember ke arah Barat. Arah Angin Oktober – Desember sering menimbulkan hujan lebat seperti halnya wilayah lain di Indonesia.

4.1.2.2 **Pemerintah dan Ketertiban**

Kotamadya Jakarta Timur adalah salah satu wilayah administrasi dibawah Provinsi DKI Jakarta memiliki luas 188,42 km² dengan jumlah penduduk 2.634.906 jiwa. Administrasi dibagi dalam 10 kecamatan dan 65 kelurahan yaitu:

Tabel 8. Luas Daerah Jakarta Timur per Kecamatan

No	Nama Kecamatan	Luasan (km²)
1	Pasar Rebo	12,97
2	Ciracas	16,08
3	Cipayung	28,45
4	Makasar	21,86
5	Kramat Jati	13,3
6	Jatinegara	10,25
7	Duren Sawit	22,66
8	Cakung	42,27
9	Pulo Gadung	15,6
10	Matraman	4,98
Jumlah		188,42

Sumber: Jakarta dalam angka 2012

4.1.2.3 **Ketenagakerjaan**

Dibidang ketenagakerjaan jumlah angkatan kerja diperkirakan mencapai 1,17 juta orang, terdiri dari 989.000 pekerja dan 182.000 pengangguran. Profil pekerja di Jakarta Timur didominasi oleh pekerja di sektor perdagangan, hotel dan restoran (31,38%) disusul kemudian oleh sektor jasa – jasa (26,19%) dan sektor industri (20,62%).

Dari segi keahliannya, tenaga terampil masih cukup tinggi (72,37%) dan sisanya (27,61%) terdiri dari tenaga tidak terampil dan pekerja kasar. Tenaga terampil tersebut umumnya berkerja di sektor formal (70%) sementara tenaga tidak terampil bekerja disektor informal (30%). Sektor formal meliputi kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh pekerja/buruh perusahaan serta pengusaha dibantu tenaga kerja tetap/dibayar. Sebaliknya sektor informal adalah pekerja keluarga, pengusaha dibantu oleh pekerja tak dibayar dan pengusaha tanpa bantuan pekerja.

4.1.2.4 **Kondisi Sosial Kependudukan**

Sumber data kependudukan yang digunakan di Jakarta Timur ada 2 Jenis yaitu Registrasi Penduduk dan Survey kependudukan. Berdasarkan data registrasi 2010, jumlah penduduk Kotamadya Jakarta Timur sebanyak 2.634.906 jiwa, dan jumlah rumah tangga sebanyak 724.580. tingkat pertumbuhan penduduk di Jakarta Timur mengalami kenaikan 0.05% per tahun.

Tabel 9. Pertumbuhan Penduduk Jakarta Timur

Kecamatan	Tahun				
	2006	2007	2008	2009	2010
Pasar Rebo	159.776	162.747	164.755	166.556	190.815
Ciracas	200.770	202.815	204.107	205.622	249.575
Cipayung	132.562	125.716	137.253	142.297	199.954
Makasar	177.930	180.581	182.441	184.788	201.617
Kramat Jati	204.629	206.327	209.960	213.076	243.759
Jatinegara	266.853	263.949	264.371	261.037	291.288
Duren Sawit	318.971	320.925	321.991	323.449	375.596
Cakung	225.702	232.140	237.185	239.059	407.058
Pulo Gadung	279.687	280.147	279.623	279.607	283.341
Matraman	193.826	193.254	193.614	193.896	191.867
Jumlah	2.160.706	2.168.601	2.195.300	2.209.387	2.634.906

Sumber: Jakarta Timur dalam angka BPS DKI

Sedangkan data mengenai jumlah kepadatan penduduk Jakarta Timur dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 10. Jumlah Kepadatan Penduduk Jakarta Timur

Kecamatan	Kepadatan Penduduk (Jiwa/ km²)			
	2007	2008	2009	2010
Pasar Rebo	12577	12732	12832	14715
Ciracas	12613	12693	13361	15521
Cipayung	4595	5017	5000	7028
Makasar	8337	8423	8411	7089
Kramat Jati	15467	15732	16428	18342
Jatinegara	24807	24847	23019	28418
Duren Sawit	14076	14122	14280	16583
Cakung	5466	5585	5622	9630
Pulo Gadung	17947	17913	17901	18163

Matraman	39846	39941	39092	38528
Jumlah	11550	11693	11669	13514

Sumber: Jakarta Timur dalam angka BPS DKI

Berdasarkan data diketahui bahwa jumlah rumah yang ada di Kotamadya Jakarta Timur pada tahun 2007 – 2010 mencapai 339.037 unit rumah dengan rasio populasi penduduk 2.534.906 jiwa. Sedangkan pada tahun 2012 dapat dilihat dari tabel di bawah berikut ini:

Tabel 11. Jumlah Hunian di Jakarta Timur 2012

Kecamatan	Jumlah Rumah	Jumlah Kartu Keluarga
Pasar Rebo	50525	40767
Ciracas	66513	48744
Cipayung	60942	52490
Makasar	47811	34660
Kramat Jati	71218	55867
Jatinegara	64051	27592
Duren Sawit	96295	70263
Cakung	147374	137260
Pulogadung	67208	34845
Matraman	37221	10656
Jumlah	709158	513144

Sumber: Jakarta Timur dalam angka 2012

4.1.3 **Gambaran Umum PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya Area Ciracas**

4.1.3.1 **Profil PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya Area Ciracas**

PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya Area Ciracas merupakan unit pelaksana area pada PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya,

dalam hal ini mempunyai tugas untuk melayani pelanggan dan melayani jaringan listrik distribusi. PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya Area Ciracas berlokasi di Jalan Centex Raya No. 1 Kelurahan Ciracas, Kecamatan Ciracas Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya Area Ciracas mempunyai luas wilayah kerja sekitar 76 km² dengan total jumlah pelanggan sebanyak 248.302 pelanggan. PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya Area Ciracas memiliki pendapatan hampir 0,1 Trilyun per Bulan atau sekitar Rp 96.786.580.034. Setiap bulannya rata-rata kwh yang terjual pada PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya Area Ciracas adalah 96.135.300 kwh.

4.1.3.2 **Visi dan Misi PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya Area Ciracas**

4.1.3.2.1 **Visi**

Diakui sebagai pengelola distribusi tenaga listrik yang efisien, andal dan berkualitas dengan kinerja unggul berbasis SDM yang kompeten.

4.1.3.2.2 **Misi**

Dalam rangka mengaktualisasikan Visi PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya Area Ciracas tersebut diatas, maka PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya Area Ciracas menetapkan Misi, sebagai berikut:

1. Mengelola bisnis pendistribusian tenaga listrik yang berorientasi kepada kepuasan pelanggan dan tingkat mutu pelayanan serta mendorong kegiatan ekonomi dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.
2. Menjalankan kegiatan usaha pendistribusian tenaga listrik yang berwawasan lingkungan.
3. Menjalankan kegiatan penjualan tenaga listrik secara wajar (*fairness*).
4. Mengelola Sumber Daya Manusia dan menjadikan kader yang berkompeten untuk menjalankan proses bisnis pendistribusian tenaga listrik.

4.1.3.3 **Struktur Organisasi PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya Area Ciracas**

Susunan Organisasi PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya Area Ciracas terdiri dari:

a) Manajer Area
b) Asisten Manajer Perencanaan, membawahi:
   1. Supervisor Perencanaan Pengusahaan;
   2. Supervisor Perencanaan Sistem Distribusi;
   3. Supervisor *Mapping* Data Jaringan dan Pelanggan;
   4. Supervisor Pelaksana Pengadaan.
c) Asisten Manajer Konstruksi, membawahi:
   1. Supervisor Penyambungan dan Pemutusan;

2. Supervisor Pengendalian Konstruksi.

d) Asisten Manajer Distribusi, membawahi:

1. Supervisor Operasi;
2. Supervisor Pemeliharaan.

e) Asisten Manajer Niaga, membawahi:

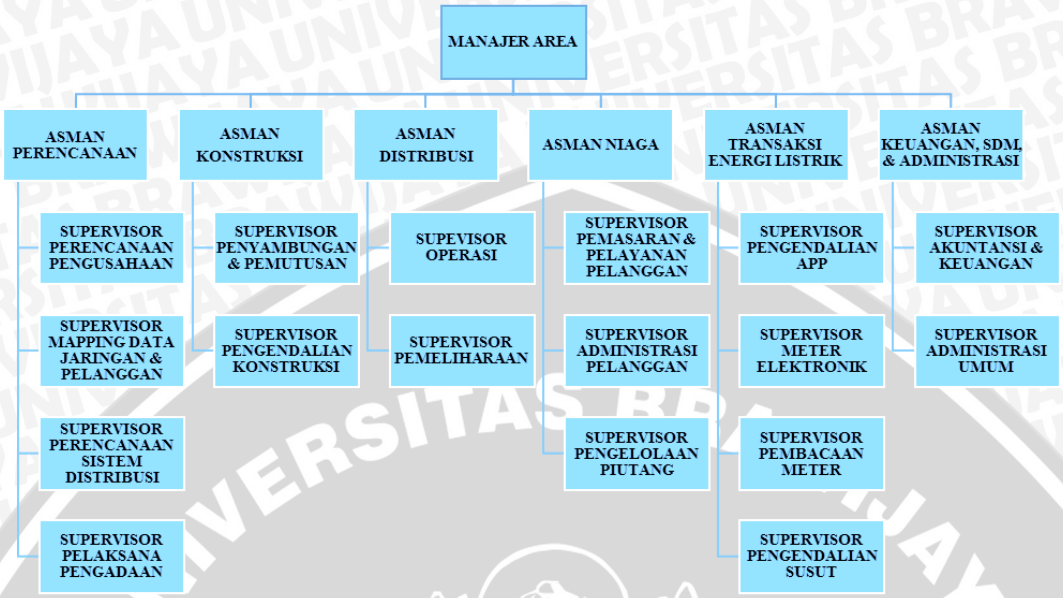
1. Supervisor Pemasaran dan Pelayanan Pelanggan;
2. Supervisor Administrasi Pelanggan;
3. Supervisor Pengelolaan Piutang.

f) Asisten Manajer Transaksi Energi Listrik, membawahi:

1. Supervisor Pengendalian APP;
2. Supervisor Meter Elektronik;
3. Supervisor Pembacaan Meter;
4. Supervisor Pengendalian Susut.

g) Asisten Manajer Keuangan, SDM, dan Administrasi, membawahi:

1. Supervisor Akutansi dan Keuangan;
2. Supervisor Administrasi Umum.



Gambar 4. Struktur Organisasi PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya Area Ciracas
Sumber: Formasi Jabatan Unit Pelaksana Area Pada PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya

Bagan Susunan Organisasi PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya Area Ciracas adalah bagan yang menganalisis atau menggambarkan struktur organisasi yang ada di PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya Area Ciracas mengenai jabatan tertinggi hingga pembagian bidang-bidang apa saja yang ada di Perusahaan tersebut serta mengambarkan pembagian kewenangan yang sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direksi ini. Bagan Susunan Organisasi PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya Area Ciracas dalam Lampiran Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0140.P/DIR/2016 tentang Formasi Jabatan Unit Pelaksana Area Pada PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya.

4.1.3.4 **Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab**

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0140.P/DIR/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Direksi Nomor 481.K/DIR/2012 tentang Formasi Jabatan Unit Pelaksana Area Pada PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya, maka perlu menetapkan penjabaran uraian tugas, wewenang dan tanggung jawab PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya Area Ciracas:

a) Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Manajer Area

- Tugas

  Menjamin, merencanakan, mengendalikan, serta mengkoordinasi-kan dengan mengatur tugas-tugas struktural dan fungsional unit Area dalam mengelola ketersediaan jaringan dan menjaga kontinuitas penyaluran tenaga listrik untuk melayani Area.

- Wewenang

  - Mengusulkan bahan pedoman rencana kerja (PRK) jaringan.
  - Mengusulkan pengembangan standar konstruksi jaringan tenaga listrik.
  - Mengesahkan rencana kerja pemeliharaan jaringan tenaga listrik.
  - Mengesahkan rencana kebutuhan material secara priodik.
  - Mengesahkan kebijakan penerapan P2TL, PB/PD, Pelayanan gangguan, AMR, Mapping dan APP rusak.
  - Mengesahkan laporan keuangan (neraca dan laporan laba rugi).

- Mengesahkan usulan kenaikan *reguler*, mutasi dan rotasi.
- Mengesahkan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan manajemen unit.
- Menetapkan kelayakan sebagai pelanggan baru PLN.
- Memutuskan sebagai pelanggan.
- Mengusulkan pegawai baik mutasi maupun rotasi sebagai pengembangan SDM.
- Menentukan target pendapatan unit.

b) Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Asisten Manajer Perencanaan

➢ Tugas

Bertanggung jawab merencanakan, menyusun, mengkoordinasi-kan, mengendalikan, memonitor, pembangunan jaringan distribusi tenaga listrik dan atau kegiatan lain yang terkait dengan jaringan distribusi yang berorientasi ke masa depan, anggaran operasi dan investasi, untuk mencapai target kinerja unit Area.

➢ Wewenang

- Mengendalikan anggaran operasi dan anggaran investasi rutin dan non rutin.
- Mengusulkan rencana pengembangan sistem jaringan distribusi untuk keandalan, meningkatkan pemasaran dan suplai tenaga listrik.

- Mengusulkan pengembangan aplikasi pengolahan data terintegrasi antara Area Pelanggan dan Internal Area.

c) Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Asisten Manajer Konstruksi

➢ Tugas

Bertanggung jawab terhadap perencanaan, penyambungan Jaringan Tegangan Menengah (JTM) dan melaksanakan pengawasan pekerjaan pemasangan jaringan tegangan rendah (JTR), Jaringan Tegangan Tinggi (JTT), Sambungan Rumah (SR) dan APP sesuai standar pelayanan serta melaksanakan pembongkaran terhadap setiap pelanggan yang memiliki tunggakan listrik melampaui ketentuan.

➢ Wewenang

- Mengesahkan Rekomendasi Sistem PB/PD s.d Daya 197 kVA.
- Mengesahkan Penyambungan dan Perluasan jaringan tenaga listrik.
- Mengesahkan Nilai unjuk Kerja SDM.

d) Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Asisten Manajer Distribusi

➢ Tugas

Menjamin terlaksananya pendistribusian sistem tenaga listrik dengan mengelola perencanaan, pengendalian dan pemeliharaan JTM, Instalasi Gardu, JTR, SR dan APP dengan mutu dan

kehandalan yang baik serta melakukan pengamanan terhadap kemungkinan bahaya listrik.

- Wewenang
  - Menetapkan jadwal petugas piket sesuai kebutuhan operasional dan ketersediaan SDM agar pengendalian operasi jaringan dapat dilaksanakan secara *real time*.
  - Menetapkan kebijakan pengaturan operasi jaringan termasuk kebijakan melakukan pemadaman atau penyalaan kembali untuk menjaga keamanan dan kelangsungan pasokan dalam kondisi darurat atau gangguan.
  - Menetapkan kebijakan perbaikan gangguan dengan menggunakan jasa pihak ketiga sesuai batas kewenangan dan ketersediaan anggaran.
  - Mengelola penggunaan tenaga kerja *outsourcing* untuk memenuhi kebutuhan jumlah SDM sesuai ketentuan yang berlaku.
  - Merekomendasikan mutasi pegawai yang meliputi promosi jabatan, rotasi dan pembinaan.
  - Mengusulkan RAO dan UAI ke bidang perencanaan.
  - Mengesahkan RAB pekerjaan pemeliharaan dan pihak ketiga.
  - Merekomendasikan penggunaan anggaran SKKO dan SKKI.
  - Menyetujui berkas atau dokumen administrasi pekerjaan pemeliharaan.

- Merekomendasikan pelaksanaan PDKB.

e) Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Asisten Manajer Niaga

➢ Tugas

Bertanggung jawab atas terselenggaranya pelaksanaan dan pengelolaan pemasaran dan pelayanan pada calon pelanggan, pelaksanaan pelayanan pada pelanggan yang berhubungan dengan pelayanan penyambungan baru, pelayanan perubahan daya tenaga listrik, pelayanan pengaduan langganan maupun pelayanan lainnya serta bertanggungjawab pada pengelolaan tata usaha langganan secara keseluruhan meliputi pembuatan laporan penjualan, laporan piutang pelanggan lancar dan ragu, terselenggaranya pelayanan penagihan rekening serta bertanggung jawab atas kegiatan pengawasan kredit.

➢ Wewenang

- Mengelola pemasaran dan niaga.
- Mengelola pelayanan pelanggan dan pengelolaan piutang.

f) Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Asisten Manajer Transaksi Energi Listrik

➢ Tugas

Pengendalian APP meliputi operasi dan pemeliharaan APP baik meter mekanik maupun elektronik (AMR, non AMR dan Prabayar) dan pengendalian alat ukur untuk keperluan operasional serta pengendalian segel. Pengelolaan rekening meliputi: pembacaan,

evaluasi pembacaan meter, dan pembuatan rekening. Pengendalian Susut, PJU, dan P2TL serta melakukan analisa dan evaluasi terhadap penyaluran energi.

- Wewenang
  - Menetapkan APP yang layak digunakan.
  - Menetapkan level *password* parameterisasi meter elektronik atau AMR.
  - Menetapkan golongan denda P2TL sesuai aturan yang berlaku.
  - Melakukan koreksi rekening terhadap rekening berjalan apabila ada kesalahan rekening.

g) Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Asisten Manajer Keuangan, SDM dan Administrasi

- Tugas

  Bertanggung jawab atas kelancaran pengelolaan dan pengendalian kegiatan bidang administrasi dan keuangan yang meliputi sumber daya manusia, kesekretariatan, anggaran, keuangan dan akuntansi untuk mencapai target kinerja sesuai tujuan perusahaan.

- Wewenang
  - Mengelola bidang SDM, Kesekretariatan, Anggaran, Keuangan dan Akuntansi serta mengkaji pelaporannya.

4.2 Penyajian Data dan Fokus Penelitian

4.2.1 Implementasi Program Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) Beji Lintar di PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya Area Ciracas.

Implementasi kebijakan publik merupakan aktivitas penyelesaian atau pelaksanaan suatu kebijakan yang telah ditetapkan atau disetujui dengan menggunakan sarana (alat) untuk mencapai tujuan kebijakan. Salah satu tahapan penting di dalam kebijakan publik adalah tahap implementasi kebijakan. Tahap implementasi sering dianggap remeh atau kurang penting oleh para aktor kebijakan, karena menurut mereka tahap implementasi hanya sebagai suatu pelaksanaan dari apa yang telah diputuskan dan di tetapkan oleh para pengambil keputusan. Namun pada kenyataannya, tahapan implementasi menjadi sangat penting karena suatu kebijakan hanya akan sekedar menjadi impian belaka apabila tidak di implementasikan. Jadi pada intinya, implementasi kebijakan publik adalah tahap dimana suatu kebijakan publik dilaksanakan secara maksimal sehingga tujuan yang telah direncanakan di dalam kebijakan publik itu sendiri dapat tercapai.

Suatu kebijakan publik tidak mempunyai arti penting tanpa tindakan-tindakan nyata yang dilakukan dengan program, kegiatan, atau proyek. Implementasi Program Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) Beji Lintar yang dibuat oleh PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya merupakan lanjutan dari Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor: 0017.P/DIR/2015 tentang Program Peningkatan dan Pengendalian Penjualan Tenaga Listrik. Dalam Peraturan Direksi tersebut, tepatnya pada Pasal 12 Ayat 2 tentang

Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik Non Konsumen dijelaskan bahwa Unit PLN dapat memasang APP sistem prabayar untuk penggunaan khusus seperti pasar malam, pedagang kaki lima, kegiatan umum/sosial (lapangan olah raga), pos ronda atas nama PLN setempat (IDPEL PLN) dengan daya dibatasi maksimum 5500 VA dan dikenakan tarif Layanan Khusus TR dengan faktor pengali N=1. Pasal 12 Ayat 2 tersebut merupakan dasar hukum PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya dalam menjalankan Program Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) Beji Lintar.

Program Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) Beji Lintar di implementasikan ke seluruh unit-unit pelaksana di bawah PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya. Program tersebut mulai dijalankan pada bulan April Tahun 2016. Salah satu unit pelaksana di bawah PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya adalah PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya Area Ciracas. Permasalahan pelanggaran pemakaian tenaga listrik non konsumen merupakan salah satu permasalahan yang tidak bisa dianggap remeh karena selain merugikan perusahaan, dampak dari masalah tersebut juga merugikan negara dan masyarakat.

Kondisi para pedagang kaki lima dan masyarakat pada umumnya yang sebagian besar masih menggunakan sumber listrik dari rumah warga, genset, atau bahkan menggunakan listrik secara ilegal dengan mencantol ke tiang listrik secara langsung, menyebabkan PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya Area Ciracas melakukan peninjauan terhadap keadaan sumber tenaga listrik untuk fasilitas umum.



Gambar 5. Kondisi sebelum adanya Program Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) Beji Lintar
Sumber: Dokumentasi Peneliti

Gambar diatas menunjukan kondisi pedagang kaki lima dan masyarakat pada umumnya dalam menggunakan energi tenaga listrik. Dari gambar tersebut dapat diketahui bahwa para pedagang kaki lima dan masyarakat pada umumnya belum menggunakan energi tenaga listrik secara legal dan aman. Berdasarkan kondisi tersebut PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya Area Ciracas melakukan peninjauan kembali terhadap keadaan sumber energi tenaga listrik untuk fasilitas umum dengan cara mengimplementasikan Program Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) Beji Lintar.

Belum adanya sumber energi tenaga listrik yang legal dan aman untuk fasilitas umum menjadikan alasan PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya Area Ciracas menjalankan suatu program yaitu Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) Beji Lintar. Dalam hal ini Program Stasiun Pengisian Listrik

Umum (SPLU) Beji Lintar berupaya untuk menggurangi susut (*losses*) non teknis yang salah satu penyebabnya disebabkan oleh pelanggaran pemakaian tenaga listrik non konsumen. Sehingga dengan adanya Program Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) Beji Lintar diharapkan mampu menaikan penjualan tenaga listrik dan menurunkan jumlah susut (*losses*) non teknis pada distribusi.

Selain itu, Program Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) Beji Lintar diharapkan mampu merubah *mindset*, budaya dan kesadaran masyarakat untuk tidak menggunakan energi tenaga listrik secara ilegal yang dapat membahayakan diri sendiri dan masyarakat sekitarnya. Karena pada dasarnya kebutuhan Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) Beji Lintar tidak lain untuk kepentingan pedagang kaki lima dan masyarakat itu sendiri.

Implementasi Program Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) Beji Lintar di PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya Area Ciracas menurut Bapak Saslizar (48 tahun) selaku Manajer PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya Area Ciracas adalah:

> "Jadi program Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) Beji Lintar merupakan suatu program yang inovatornya adalah PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya, kemudian program tersebut di implementasikan keseluruh area dibawah PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya. Salah satunya adalah PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya Area Ciracas. Dengan diimplementasikannya program tersebut diharapkan masyarakat dapat menggunakan listrik secara terbuka dan menguranggi pencurian listrik yang berdampak pada turunnnya *losses* distribusi". (hasil wawancara tanggal 22 November 2016 Pukul 10.15)

Berdasarkan hasil wawancara, dapat diketahui bahwa Program Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) Beji Lintar merupakan suatu program yang dibuat oleh PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya, kemudian di implementasikan keseluruh area dibawah PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya. Salah satu area yang mengimplementasikan Program Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) Beji Lintar adalah PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya Area Ciracas. Dengan adanya program ini, diharapkan masyarakat dapat menggunakan sumber listrik secara terbuka dan legal sehingga masyarakat tidak perlu mencari atau menggunakan sumber listrik dari rumah warga, genset, atau bahkan menggunakan sumber listrik secara ilegal dengan mencantolkan ke tiang listrik secara langsung yang dapat membahayakan diri sendiri dan masyarakat sekitar.

PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya Area Ciracas sangat konsisten dalam menjalankan Program Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) Beji Lintar, terbukti sampai bulan November tahun 2016 PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya Area Ciracas merupakan salah satu area yang memasang Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) Beji Lintar paling banyak diantara area yang lainnya, yaitu sebanyak 22 unit Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) Beji Lintar dan akan terus bertambah sesuai kebutuhan di wilayah kerjanya. Berikut adalah alamat Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) Beji Lintar di PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya Area Ciracas:

Tabel 12. Alamat Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) Beji Lintar di PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya Area Ciracas

No	Alamat	Koordinat	Tanggal Pemasangan
1	JL. Raya Centex No.1 Pujasera depan PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya Area Ciracas	-6.326481 106.876663	19/08/2016
2	JL. Gladiul, Lapangan Tenis Kav. DKI Cipayung	-6.326481 106.8744743	02/08/2016
3	JL. Raya Bogor km 27 Kios Sparepart motor	-6.334345 106.8893493	27/07/2016
4	JL. TB Simatupang Tanah Merdeka	-6.308396 106.873909	26/08/2016
5	JL. Regalia Suci Susukan	-6.313069 106.871738	26/08/2016
6	JL. H. Baping	-6.312531 106.874947	26/08/2016
7	JL. PPA Bambu Wulung, Taman PPA	-6.319717 106.897088	29/08/2016
8	JL. Bambu Kuning, Taman PKK 02	-6.311972 106.897289	29/08/2016
9	JL. Puskesmas Setu, Balai Warga Kel. Setu	-6.318588 106.909924	29/08/2016
10	JL. Gerbang Sari Dalam Bambu Apus, Taman Caliandra	-6.316640 106.905474	29/08/2016
11	JL. Madu Indah, Corner Jl. Raya Bambu Apus	-6.311959 106.903770	31/08/2016
12	JL. Bambu Wulung, Pertigaan Ojek Bambu Apus	-6.318939 106.908382	29/08/2016
13	JL. Kalisari Baru, Kalisari Baru	-6.341848 106.859252	01/09/2016

14	JL. Kalisari Lapan, Kalisari Lapan	-6.339362 106.855714	01/09/2016
15	JL. Bambu Apus Mabes Hankam, Perempatan Bambu Apus Madu Indah	-6.311809 106.902676	01/09/2016
16	JL. Raya Bogor, Pertigaan Kopassus Cijantung	-6.310690 106.862564	19/09/2016
17	JL. TB Simatupang, Pertokoan Perempatan Raya Bogor	-6.307281 106.866024	19/09/2016
18	JL. TB Simatupang, Pertokoan Perempatan Raya Bogor	-6.307281 106.866025	19/09/2016
19	JL. Raya Lapangan Tembak	-6.351833 106.883798	05/10/2016
20	JL. Raya Lapangan Tembak	-6.351876 106.885708	05/10/2016
21	JL. Pringgodani Cibubur	-6.383067 106.899652	11/10/2016
22	JL. Pringgodani Cibubur	-6.381860 106.896833	11/10/2016

Sumber: Dokumentasi PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya Area Ciracas

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa ada 22 unit Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) Beji Lintar yang telah dipasang di beberapa lokasi. Jumlah tersebut akan terus bertambah mengingat banyaknya indikasi pencurian listrik di wilayah kerja PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya Area Ciracas. Bertambahnya pemasangan Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) Beji Lintar didukung dengan pengadaan material yang langsung berasal dari gudang PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya Area Ciracas, jadi barangnya selalu *available* dan bisa segera dipasang.

a. Aktor dan Pelaku dalam Implementasi Program Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) Beji Lintar

Aktor-aktor atau pelaku yang terlibat dalam Implementasi Program Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) Beji Lintar adalah berasal dari internal PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya Area Ciracas dan eksternal PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya Area Ciracas. Aktor-aktor yang terlibat dari internal PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya Area Ciracas adalah bidang Niaga, bidang Konstruksi, bidang Transaksi Energi, dan bidang Perencanaan. Sedangkan aktor-aktor yang terlibat dari eksternal PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya Area Ciracas adalah PT Tangguh Jaya (Vendor), PT Tri Tunggal (Vendor), Gubernur DKI Jakarta, Walikota Jakarta Timur, Kecamatan dan Kelurahan. Setiap masing-masing aktor memegang peranan yang sangat penting dalam keberhasilan implementasi program Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) Beji Lintar di PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya Area Ciracas.

Peranan dari internal PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya Area Ciracas adalah sebagai berikut:

1. Bidang Niaga berkewajiban untuk menangani urusan administrasi dan pemasaran;
2. Bidang Konstruksi berkewajiban untuk melakukan pemasangan;
3. Bidang Transaksi Energi berkewajiban untuk uji coba atau untuk meyakinkan bahwa tidak ada kerusakan pada Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) Beji Lintar sebelum dipasang dilokasi yang

telah ditetapkan. Bidang Transaksi Energi juga berkewajiban untuk melakukan pemeliharaan (*maintenance)* secara berkala dan *monitoring* penggunaan Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) Beji Lintar;

4. Bidang Perencanaan berkewajiban untuk pengadaan material Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) Beji Lintar yang dibantu oleh PT Tri Tunggal (Vendor).

Sedangkan peranan dari eksternal PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya Area Ciracas adalah sebagai berikut:

1. PT Tri Tunggal (Vendor) dipercaya oleh PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya Area Ciracas untuk menyediakan material Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) Beji Lintar;
2. PT Tangguh Jaya (Vendor) dipercaya oleh PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya Area Ciracas untuk membantu PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya Area Ciracas dalam hal pemasangan Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) Beji Lintar;
3. Gubernur DKI Jakarta berperan sebagai pelindung dan pihak yang bertanggung jawab dari program Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) Beji Lintar, maksudnya adalah Gubernur DKI Jakarta merupakan aktor yang menyetujui implementasi Program Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) Beji Lintar di lahan fasilitas umum tanpa dikenakan biaya sewa KSPI (Kerjasama Pembangunan Infrastruktur) ketenagalistrikan;

4. Walikota Jakarta Timur berperan sebagai pihak yang menjebatani antara PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya Area Ciracas dengan pihak Kelurahan dan Kecamatan;
5. Kecamatan dan Kelurahan berperan sebagai pihak yang berwenang untuk menentukan dan meminta lokasi atau titik mana yang diijinkan untuk dapat dipasang Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) Beji Lintar.

Aktor internal dari PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya Area Ciracas merupakan aktor utama atau inti yang menentukan program Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) Beji Lintar dapat berhasil atau tidak. Berikut sesuai dengan pernyataan dari bapak Saslizar (48 Tahun) selaku Manajer PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya Area Ciracas, yaitu:

> "Aktor-aktor internal yang berasal dari PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya Area Ciracas seperti bidang niaga, bidang konstruksi, bidang transaksi energi, dan bidang perencanaan merupakan aktor utama dalam implementasi program ini mas. Hal itu dikarenakan bidang-bidang tersebut merupakan aktor yang sangat vital, semua wewenang dan kuasa berasal dari bidang-bidang tersebut. Seperti bidang niaga yang menangani urusan administratif, bidang konstruksi menangani urusan pemasangan, bidang transaksi energi menangani urusan uji coba, dan bidang perencanaan untuk pengadaan material. Kemudian aktor internal dari PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya Area Ciracas merupakan aktor yang diberikan wewenang oleh kantor distribusi untuk melaksanakan program ini mas, jadi program ini berasal dari kita, kalau dari kita sendiri tidak mau menjalankan dan mendukung program ini maka program ini tidak dapat berhasil". (hasil wawancara tanggal 22 November 2016 Pukul 10.20)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa peran dari aktor-aktor internal PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya Area Ciracas sangatlah vital, hal itu dikarenakan aktor internal dari PT PLN (Persero)

Distribusi Jakarta Rata Area Ciracas merupakan aktor utama yang diberikan wewenang oleh kantor distribusi untuk menjalankan program ini. Tanpa adanya inisiatif dari PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya Area Ciracas untuk menjalankan program ini maka program ini tidak dapat berjalan.

Dalam hal ini peran PT Tangguh Jaya dan PT Tri Tunggal selaku Vendor sangatlah diperlukan. Berikut penuturan dari bapak Mohamat Emir Ferdian (32 Tahun) selaku Supervisor Pemasaran & Pelayanan Pelanggan, yaitu:

> "Peran PT Tangguh Jaya dan PT Tri Tunggal selaku Vendor sangat kami perlukan mas dalam implementasi program ini. Hal itu dikarenakan kami sadar bahwa kami mempunyai banyak tugas pokok dan fungsi, agar program ini dapat berjalan lancar dan sukses maka kami merangkul Vendor dalam implementasi program ini. Seperti PT Tri Tunggal yang kami percaya untuk menyediakan material Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) Beji Lintar, sedangkan untuk pemasangan Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) Beji Lintar kami dibantu oleh PT Tangguh Jaya". (hasil wawancara tanggal 22 November 2016 Pukul 10.45)

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya Area Ciracas dalam implementasi program ini dibantu oleh Vendor. Hal tersebut dilakukan oleh PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya Area Ciracas demi kelancaran dan maksimalnya implementasi program tersebut. Kemudian, peran Gubernur DKI Jakarta dalam implementasi program ini sangat dibutuhkan. Hal tersebut sesuai dengan penjelasan dari bapak Amin Bunyamin (40 Tahun) Selaku Asisten Manajer Transaksi Energi, yaitu:

> "Karena Program Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) Beji Lintar pada salah satu tipenya menggunakan lahan fasilitas umum, maka kami harus mendapatkan ijin dulu mas dari Gubernur DKI

> Jakarta. Dalam hal ini Gubernur DKI Jakarta sangat diperlukan mas perannya, beliau sebagai pihak yang bertanggung jawab dan menyetujui kalau PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya Area Ciracas boleh memasang Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) Beji Lintar di lahan fasilitas umum tanpa dikenakan biaya mas. Hal itu disetuji oleh Gubernur DKI Jakarta karena program Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) Beji Lintar juga mendukung salah satu program Pemerintah Daerah yaitu program Jakarta Smart City". (hasil wawancara tanggal 22 November 2016 Pukul 14.10)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat diketahui bahwa peran Gubernur DKI Jakarta sangat dibutuhkan dalam hal perijinan. Tanpa ijin yang diberikan oleh Gubernur DKI Jakarta, PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya Area Ciracas tidak dapat memasang Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) Beji Lintar di wilayah kerjanya.

Walikota Jakarta Timur dalam implementasi program ini merupakan kunci yang menjebatani antara PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya Area Ciracas dengan pihak Kelurahan dan Kecamatan. Berikut ini adalah penjelasan dari bapak Saslizar (48 Tahun) selaku Manajer PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya Area Ciracas, yaitu:

> "Jika dilihat dari letak geografisnya kan PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya Area Ciracas masuk dalam wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur mas, maka Gubernur DKI Jakarta memerintahkan Walikota Jakarta Timur sebagai pihak yang menjebatani kami dengan pihak Kecamatan dan Kelurahan mas. Gubernur DKI Jakarta memerintahkan Walikota Jakarta Timur sebagai wujud konsistensi bahwa Gubernur DKI Jakarta dalam hal ini benar-benar mendukung dan ingin program ini benar-benar terlaksana dengan baik mas". (hasil wawancara tanggal 22 November 2016 Pukul 11.25)

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa pihak yang ditugaskan oleh Gubernur DKI Jakarta untuk menjebatani antara PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya Area Ciracas dengan pihak Kecamatan dan

Kelurahan dalam implementasi program Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) Beji Lintar adalah Walikota Jakarta Timur. Hadirnya Walikota Jakarta Timur sebagai pihak yang menjebatani merupakan wujud nyata dari Pemprov DKI Jakarta, bahwa dalam implementasi program ini Pemprov DKI Jakarta sangat mendukung.

Setiap masing-masing aktor memegang peranan penting dan kontribusinya sangat dibutuhkan demi keberhasilan implementasi program Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) Beji Lintar, tidak terkecuali pihak Kecamatan dan Kelurahan. Berikut sesuai dengan pernyataan bapak Mohamat Emir Ferdian (32 Tahun) selaku Supervisor Pemasaran & Pelayanan Pelanggan, yaitu:

> "Sebelum pihak kami melakukan pemasangan, kami berkordinasi terlebih dahulu dengan pihak kecamatan dan kelurahan untuk menentukan lokasi yang ada indikasi pencurian tenaga listrik. Kemudian kita pastikan pada pihak kecamatan dan kelurahan untuk menentukan apakah lokasi itu boleh dan layak untuk dipasang splu. Jadi ada kepastian dan landasan hukumnya dari pihak kecamatan dan kelurahan, tidak asal pasang saja. Biasanya pihak kelurahan yang memohon, nanti pihak kami yang akan memproses". (hasil wawancara tanggal 22 November 2016 Pukul 11.15)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa dalam hal ini peran pihak Kecamatan dan Kelurahan sangat dibutuhkan, karena pihak Kecamatan dan Kelurahan merupakan aktor yang menentukan lokasi-lokasi Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) Beji Lintar. Selain itu, pihak Kecamatan dan pihak Kelurahan merupakan pihak yang ditugasi oleh Gubernur DKI Jakarta lewat Walikota Jakarta Timur untuk memberikan ijin terhadap lokasi-lokasi yang akan dipasang Stasiun Pengisian Listrik Umum

(SPLU) Beji Lintar. Tanpa peran pihak Kecamatan dan Kelurahan program ini tidak bisa berlanjut ketahap berikutnya yaitu tahap pemasangan.

Dengan peran masing-masing aktor yang telah disebutkan tersebut, maka diharapkan implementasi program Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) Beji Lintar di PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya Area Ciracas dapat berjalan dengan baik. Kerjasama dan koordinasi yang baik dari para aktor-aktor yang terlibat sangat dibutuhkan demi tercapainya tujuan dan sasaran pada program ini. Adanya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan membuat aktor-aktor yang terlibat memiliki tanggung jawab lebih demi kelancaran program tersebut.

b. Tujuan dan Sasaran Program

Program Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) Beji Lintar merupakan program yang digunakan oleh PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya Area Ciracas untuk mengurangi praktik pencurian listrik dan untuk menyediakan sumber energi listrik di tempat umum secara terbuka, aman, dan legal. Dimana program ini di arahkan kepada seluruh masyarakat umum khususnya Pedagang Kaki Lima (PKL). Adapun tujuan umum dari program Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) Beji Lintar yaitu untuk meningkatkan penjualan tenaga listrik dan turunnya *losses* distribusi karena pemakaian listrik di tempat-tempat umum yang selama ini tidak terukur, beresiko tinggi dan tidak termonitor bisa dikendalikan dengan efektif melalui Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) Beji Lintar ini. Dari penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa komponen yang menjadi fokus

utama yaitu membuat pedagang kaki lima dan masyarakat umum dapat memiliki sumber energi tenaga listrik secara terbuka, aman dan legal. Jadi pedagang kaki lima dan masyarakat pada umumnya tidak perlu repot-repot untuk mencari sumber listrik seperti sebelum adanya Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) Beji Lintar. Berikut penjelasan bapak Amin Bunyamin (40 Tahun) selaku Asisten Manajer Transaksi Energi, yaitu:

> "Tujuan utama adanya program ini salah satunya yaitu masyarakat umum dan pedagang kaki lima menjadi tidak mencuri atau menggunakan sumber listrik secara ilegal di tempat-tempat umum, karena sekarang masyarakat sudah memiliki sumber energi tenaga listrik yang mudah, aman, dan legal. Dengan adanya Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) Beji Lintar diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk tidak menggunakan listrik secara ilegal". (hasil wawancara tanggal 22 November 2016 Pukul 13.20)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui dengan jelas bahwa tujuan dari program Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) Beji Lintar ini merupakan usaha dari PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya Area Ciracas untuk memberikan kesadaran kepada pedagang kaki lima dan masyarakat pada umumnya agar tidak melakukan pencurian listrik lagi karena selain merugikan perusahaan dan negara, hal tersebut dapat membahayakan diri sendiri dan masyarakat di sekitar. Adapun dampak yang ada dari tujuan program Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) Beji Lintar menurut bapak Amin Bunyamin (40 Tahun) selaku Asisten Manajer Transaksi Energi adalah sebagai berikut:

> "Program Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) Beji Lintar memberikan dampak yang signifikan terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL), hal tersebut terlihat jelas dari antusiasme para Pedagang Kaki Limat (PKL) terhadap keberadaan Stasiun Pengisian Listrik Umum

(SPLU) Beji Lintar. Karena dengan adanya Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) Beji Lintar mereka bisa meningkatkan taraf hidupnya. Sebagai contoh, sebelum adanya Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) Beji Lintar mereka hanya berjualan makanan. Tetapi setelah adanya program ini mereka menjadi berfikir untuk menambah pengasilannya dengan membeli blender dan kulkas mini. Jadi mereka yang awalnya hanya menjual makanan sekarang mereka juga bisa menjual berbagai jenis minuman seperti *juice* dan lain-lain. Dengan begitu akan menambah pengasilan mereka yang akan berdampak pada meningkatnya taraf hidup para Pedagang Kaki Lima (PKL)". (hasil wawancara tanggal 22 November 2016 Pukul 15.15)

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa dampak dari adanya program Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) Beji Lintar di PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya Area Ciracas adalah merupakan tujuan dari program ini. Apabila program ini berjalan dengan tepat di PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya Area Ciracas maka tujuan dari program ini akan tercapai. Karena dampak dari program ini merupakan tujuan dari adanya program Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) Beji Lintar.

Program Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) Beji Lintar juga merupakan upaya preventif yang dilakukan oleh PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya Area Ciracas karena dapat mengurangi praktik pencurian listrik dan juga menambah pendapatan (*revenue*) perusahaan. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan bapak Saslizar (48 Tahun) selaku Manajer PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya Area Ciracas:

"Jadi sebenarnya ada beberapa program yang dilakukan oleh PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya Area Ciracas untuk mengurangi praktik pencurian listrik yaitu program Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) dan program Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) Beji Lintar. Program Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik dirasa kurang berhasil karena setelah program itu dijalankan tenyata masih menimbulkan pelanggaran pencurian tenaga listrik, padahal sudah ditertibkan oleh tim dari Penertiban Pemakaian

> Tenaga Listrik (P2TL). Tetapi berbeda dengan program Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) Beji Lintar, karena program ini merupakan suatu program yang sangat membantu perusahaan, karena dapat menyelamatkan kwh yang dulu tidak terukur. Jadi ini merupakan upaya preventif dari pihak kami untuk menyediakan listrik secara legal". (hasil wawancara tanggal 22 November 2016 Pukul 10.30)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa program Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) Beji Lintar merupakan suatu program yang dijalankan oleh PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya Area Ciracas sebagai upaya preventif untuk mengurangi praktik pencurian listrik dan juga untuk meningkatkan pelayanan PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya Area Ciracas kepada masyarakat. Upaya preventif dilakukan oleh PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya Area Ciracas karena mereka sadar bahwa biaya untuk pencegahan lebih murah jika dibandingkan dengan biaya penanggulangan. Hal tersebut senada dengan apa yang disampaikan oleh bapak Saslizar (48 Tahun) selaku Manajer PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya Area Ciracas, yaitu:

> "Program Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) Beji Lintar merupakan suatu program yang bersifat preventif. Upaya preventif ini kami lakukan karena kami sadar bahwa tindakan preventif ini biayanya lebih murah jika dibandingkan dengan biaya menanggulangi dampak buruk yang terjadi". (hasil wawancara tanggal 22 November 2016 Pukul 10.35)

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa tujuan dari implementasi program Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) Beji Lintar merupakan upaya preventif yang dilakukan oleh PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya Area Ciracas untuk meminimalisir dampak buruk yang akan terjadi di kemudian hari.

Selain itu, program Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) Beji Lintar merupakan upaya dari PT PLN (Peresero) Distribusi Jakarta Raya Area Ciracas untuk mendukung program pemerintah provinsi DKI Jakarta yaitu Jakarta Smart City yang dalam hal ini wujudnya adalah penataan penggunaan listrik bagi fasilitas umum. Berikut sesuai dengan pernyataan bapak Amin Bunyamin (40 Tahun) selaku Asisten Manajer Transaksi Energi, yaitu:

> "Program Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) Beji Lintar merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya Area Ciracas untuk mendukung program pemerintah provinsi DKI Jakarta yaitu program Jakarta Smart City. Perlu diketahui bahwa program Jakarta Smart City adalah penerapan konsep kota cerdas yang mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk mengetahui, memahami, dan mengendalikan berbagai sumber daya di dalam kota dengan lebih efektif dan efisien dalam rangka memaksimalkan pelayanan publik, memberikan solusi penyelesaian masalah dan mendukung pembangunan berkelanjutan". (hasil wawancara tanggal 22 November 2016 Pukul 13.35)

Berdasarkan penjelasan diatas dapat diketahui bahwa program Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) Beji Lintar merupakan suatu program yang direncanakan dengan adanya sinergi terhadap program-program pemerintah provinsi yang ada. Dengan adanya sinergi antara program tersebut diharapkan mampu mensukseskan program Stasiun pengisian Listrik Umum (SPLU) Beji Lintar.

Sasaran dari program Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) Beji Lintar adalah pedagang kaki lima dan masyarakat pada umumnya. Tetapi lokasi-lokasi yang disediakan Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) Beji Lintar rata-rata di sekitar pedagang kaki lima berjualan. Hal tersebut

dilakukan karena berdasarkan hasil analisa dan data yang diperoleh oleh tim dari Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) menunjukan bahwa penyebab susut (*losses*) terbesar pada non teknis disebabkan oleh pencurian listrik yang dilakukan oleh pedagang kaki lima. Jadi alasan tersebutlah yang membuat PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya Area Ciracas lebih memilih lokasi-lokasi di dekat pedagang kaki lima berjualan, karena lokasi tersebut rentan terhadap pencurian listrik. Penjelasan tersebut sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Mohamat Emir Ferdian (32 Tahun) selaku Supervisor Pemasaran & Pelayanan Pelanggan, yaitu:

> "Sasaran utama dari program Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) Beji Lintar adalah pedagang kaki lima, kemudian masyarakat pada umumnya. Dalam hal ini kami ingin merubah budaya pedagang kaki lima dan masyarakat pada umumnya agar tidak mencuri listrik lagi. Terbukti sampai saat ini banyak masyarakat yang antusias pada program ini seperti ojek online yaitu gojek dan grab bike yang para pengemudinya banyak menggunakan Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) Beji Lintar untuk mengisi batrai alat komunikasi mereka". (hasil wawancara tanggal 22 November 2016 Pukul 14.15)

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya Area Ciracas benar-benar memfasilitasi pedagang kaki lima dan masyarakat pada umumnya agar tidak mencuri lagi. Dengan difasilitasinya Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) Beji Lintar diharapkan dapat merubah *mindset* pedagang kaki lima dan masyarakat pada umumnya. Karena pada dasarnya mereka membutuhkan sumber energi listrik tetapi tidak bisa difasilitasi secara resmi oleh pihak kami, dengan hadinya program Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) Beji Lintar yang betul-betul legal dan diizinkan oleh PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta

Raya Area Ciracas mereka sekarang menjadi bisa memanfaatkan listrik secara legal dan aman di tempat umum.

Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) Beji Lintar yang kurang produktif disuatu lokasi akan dipindahkan dilokasi lain yang lebih produktif lagi. Hal tersebut dilakukan oleh PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya Area Ciracas dengan harapan dapat meningkatkan pendapatan (*revenue*) perusahaan. Jadi secara makro program Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) Beji Lintar akan mengurangi *losses*, karena Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) Beji Lintar terukur dan aman untuk digunakan. Seperti pernyataan dari bapak Mohamat Emir Ferdian (32 Tahun) selaku Supervisor Pemasaran & Pelayanan Pelanggan, yaitu:

> "*Monitoring* dan evaluasi sudah dilakukan, yaitu dengan meninjau kembali lokasi-lokasi Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) Beji Lintar yang kurang produktif. Kemudian *monitoring* dan evaluasi juga sudah dilakukan dari sisi pembelian, sudah berapakah kwh yang masuk dan berapa kwh yang terjual. Tetapi dengan adanya Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) Beji Lintar belum dapat dikatakan berdampak signifikan terhadap turunnya jumlah *losses*. Perlu diketahui kita belum menggabungkan data itu, karena kita tidak begitu memperhatikan *income*nya. Yang menjadi orientasi kita dengan adanya program Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) Beji Lintar adalah perubahan budaya dan *mindset* agar pedagang kaki lima dan masyarakat pada umumnya mengenal program ini dan menggunakannya sehingga tidak ada pencurian listrik lagi". (hasil wawancara tanggal 23 November 2016 Pukul 10.15)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa tujuan program Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) Beji Lintar adalah berfokus pada perubahan budaya dari para pedagang kaki lima dan masyarakat pada umumnya agar tidak melakukan pencurian listrik lagi. Dengan tidak adanya pencurian listrik lagi, PT PLN (Persero) Distribusi

Jakarta Raya Area Ciracas mengharapkan dapat berdampak pada turunnya *losses* distribusi. Adanya tujuan dan sasaran yang sudah direncanakan dari program Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) Beji Lintar diharapkan program ini dapat berjalan dengan lancar dan terus berkelanjutan.

c. Sumber Daya

1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya merupakan salah satu faktor penting dan juga faktor pendukung dari implementasi program Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) Beji Lintar tersebut. Terutama ketersediaan sumber daya manusia, dimana ketersediaan suatu sumber daya manusia tersebut menjadi penunjang dalam implementasi program Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) Beji Lintar. Dengan adanya sumber daya yang cukup maka implementasi program Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) Beji Lintar dapat berjalan dengan maksimal dan tujuan utama dari program tersebut dapat terwujud.

Sumber daya yang sangatlah penting salah satunya adalah sumber daya manusia. Dimana ketersediaan sumber daya manusia menjadi faktor penentu tepatnya dalam pelaksanaan program ini. Dalam pelaksanaan program Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) Beji Lintar di PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya Area Ciracas ini, banyak aktor yang terlibat di dalamnya. Dengan banyaknya aktor yang terlibat didalam program ini membuat PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya Area Ciracas menjadi merasa terbantu. Hal itu senada dengan keterangan dari

bapak Saslizar (48 tahun) selaku Manajer PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya Area Ciracas:

> "Ketersediaan sumber daya manusia dalam program ini sangatlah banyak, hal itu disebabkan oleh banyaknya aktor yang terlibat dalam program ini, aktor yang terlibat dalam program ini berasal internal perusahaan dan eksternal perusahaan. Aktor-aktor yang terlibat dari internal perusahaan sendiri adalah bidang niaga, kontruksi, perencanaan dan transaksi energi. Sedangkan kalo dari eksternal perusahaan adalah pihak Vendor, Gubernur DKI Jakarta, Walikota Jakarta Timur, kecamatan dan kelurahan". (hasil wawancara tanggal 24 November 2016 Pukul 10.15)

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa sumber daya manusia yang terlibat dalam pelaksaan program ini sangat banyak. Masing-masing aktor mempunya tugas dan perannya masing-masing. Salah satu kunci keberhasilan suatu program adalah bergantung pada sumber daya manusia yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan kontribusi pada pelaksanaan program. Seperti dalam pelaksanaannya, PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya Area Ciracas sangat terbantu dengan adanya vendor, vendor tersebut terkoneksi langsung dengan bidang konstruksi dan perencanaan. Berikut ini adalah keterangan dari Bapak Saslizar (48 Tahun) selaku Manajer PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya Area Ciracas, yaitu:

> "Kita sangat terbantu dengan adanya Vendor. Ada dua Vendor yang melakukan kerjasama dengan PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya Area Ciracas, yaitu PT Tangguh Jaya dan PT Tri Tunggal. PT Tri Tunggal berperan dalam hal pengadaan material, sedangkan PT Tangguh Jaya berperan dalam membantu pemasangan Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) Beji Lintar". (hasil wawancara tanggal 23 November 2016 Pukul 11. 20)

Berdasarkan penjelasan Bapak Saslizar selaku Manajer PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya Area Ciracas tersebut, dapat diketahui bahwa Vendor sangat membantu dalam hal pengadaan material dan pemasangan Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) Beji Lintar. Selain itu salah kunci keberhasilan program ini adalah kecakapan atau *skill* yang dimiliki oleh para pegawai dari PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya Area Ciracas. Kecakapan atau *skill* yang dimiliki oleh para pegawai tersebut tidak terlepas dari jenjang pendidikan yang dimiliki oleh para pegawai. Berikut adalah data mengenai jenjang pendidikan di PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya Area Ciracas:

Tabel 13. Jenjang Pendidikan Pegawai PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya Area Ciracas

No	Pendidikan Terakhir	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	SMA	10	5	15
2	STM/SMK	19	1	20
3	Diploma I/II/III/IV Teknik	13	4	17
4	Diploma I/II/II/IV Non Teknik	3	2	5
5	S1 teknik	8	1	9
6	S1 Non Teknik	4	3	7
Jumlah		57	16	73

Sumber: Hasil olahan data peneliti

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa pendidikan terakhir paling banyak di PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya Area Ciracas adalah ditempati oleh STM dan SMK dengan jumlah sebanyak 20 pegawai. Kemudian posisi kedua ditempati oleh Diploma 1,2,3 dan 4 teknik dengan jumlah sebanyak 17 pegawai. Posisi ketiga ditempati oleh pendidikan

terakhir SMA dengan jumlah 15 orang pegawai. Posisi kelima ditempati oleh S1 teknik dengan jumlah sebanyak 9 pegawai. Sedangkan posisi keenam ditempati oleh S1 non teknik dengan jumlah sebanyak 7 pegawai. Dan yang terakhir ditempati oleh Diploma 1,2,3 dan 4 non teknik dengan jumlah sebanyak 5 pegawai. Bila diperhatikan, latar belakang pendidikan pegawai dari jurusan teknik terbilang cukup banyak. Latar belakang pendidikan jurusan teknik tersebut sangat membantu dalam implementasi program Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) Beji Lintar. Penjelasan tersebut sejalan dengan komentar dari bapak Saslizar (48 Tahun) selaku Manajer PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya Area Ciracas, yaitu:

> "Teman-teman dan para pegawai yang mempunyai latar belakang pendidikan jurusan teknik sangat membantu mas dalam program ini. Hal itu disebabkan karena mereka sudah punya basicnya mas, jadi lebih mudah mengerti dalam pelaksanaan program ini bila dibandingkan dari latar belakang pendidikan yang jurusannya non teknik". (hasil wawancara tanggal 23 November 2016 Pukul 10.15)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa latar pendidikan pegawai dari jurusan teknik mempunyai kelebihan tersendiri dalam implementasi program Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) Beji Lintar. Dengan latar belakang pendidikan rata-rata SMA keatas tersebut berdampak terhadap kecakapan atau *skill* dari para pegawai PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya Area Ciracas dalam menjalankan program Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) Beji Lintar. Adanya latar belakang pendidikan yang baik diharapkan dapat mendukung keberhasilan implementasi Program Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) Beji Lintar di PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya Area Ciracas.

2. Sumber Daya Finansial

Dalam implementasi suatu program diperlukan juga dukungan dari sumber daya finansial. Sumber daya finansial diperlukan sebagai faktor pendukung dalam pelaksanaan suatu program. Finansial merupakan alat (*tools*) yang penting untuk mencapai tujuan karena segala sesuatu harus diperhitungkan secara rasional. Hal ini akan berhubungan dengan berapa pengeluaran yang harus disediakan untuk membiayai gaji tenaga kerja, alat-alat yang dibutuhkan dan harus dibeli serta berapa hasil yang akan dicapai dari suatu organisasi.

Sumber daya finansial dalam pelaksanaan program ini berasal dari dana investasi pemasaran dan penambahan pelanggan. Harga untuk satu unit Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) Beji Lintar adalah sekitar Rp 7.500.000. Biaya tersebut sangatlah murah jika dibandingkan dengan kerugian yang dialami oleh PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya Area Ciracas akibat pencurian energi listrik. Penjelasan tersebut sejalan dengan keterangan dari Bapak Saslizar (48 Tahun) selaku Manajer PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya Area Ciracas, yaitu:

> "Biaya yang kita keluarkan untuk program ini tidak mahal, harga splu sekitar 7,5 juta/unit, sekarang baru 200 unit, kita baru keluar 1,6 milyar. Padahal dalam satu tahun ini, tahun 2016 kita untuk anggaran seluruh Jakarta aja 300-400 milyar untuk investasi pemasaran dan penambahan pelanggan, malah dengan adanya splu ini menggurangi praktik pencurian yang berdampak kepada *revenue* pln sendiri". (hasil wawancara tanggal 23 November 2016 Pukul 11.40)

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa biaya yang dikeluarkan oleh PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya Area Ciracas

untuk satu unit Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) Beji Lintar tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan biaya penanggulangan dari pencurian listrik itu sendiri. Dengan adanya sumber daya finansial yang berasal dari dana investasi pemasaran dan penambahan pelanggan, maka diharapkan program Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) Beji Lintar dapat berjalan dengan lancar tanpa ada masalah dan hambatan pada sumber daya finansialnya.

d. Sosialisasi Program

Pelaksanaan sosialisasi pada program Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) Beji Lintar dilakukan secara holistik. Sosialisasi tersebut dilakukan oleh PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya Area Ciracas mulai dari tingkat Gubernur DKI Jakarta, Walikota, Kecamatan, Kelurahan dan Masyarakat. Sosialisasi program yang di lakukan oleh PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya Area Ciracas menggunakan berbagai cara, seperti lewat media massa, media *online*, radio, seminar atau *talkshow* (festival budaya dan Hari Listrik Nasional). Hal tersebut sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Saslizar (48 Tahun) selaku Manajer PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya Area Ciracas, yaitu:

> "Kita memanfaatkan media cetak, media *online*, dan radio untuk mensosialisasikan program ini. Media cetak yang kita pilih untuk mensosialisasikan program Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) Beji Lintar adalah Media Indonesia, Bisnis Indonesia, Warta Kota, Koran Jakarta, Sentana, Neraca dan Rakyat Merdeka. Sedangkan media *online* yang kita pilih untuk mensosialisasikan program Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) Beji Lintar adalah Sindonews.com, Okezone.com, Antaranews.com. Kemudian untuk radio biasanya kita memakai Elshinta untuk sosialisasi program ini". (hasil wawancara tanggal 23 November 2016 Pukul 11.15)

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya Area Ciracas berusaha menggunakan berbagai media untuk mensosialisasikan program ini kepada seluruh lapisan masyarakat. Sedangkan sosialisasi program Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) Beji Lintar kepada internal PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya Area Ciracas dilakukan pada saat *Code of Conduct* dan Rapat Kerja. *Code of Conduct* merupakan rapat yang biasa dilakukan oleh PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya Area Ciracas. Rapat *Code of Conduct* adalah pedoman internal perusahaan yang berisikan sistem nilai, etika bisnis, komitmen serta penegakan terhadap peraturan-peraturan perusahaan bagi individu dalam menjalankan bisnis dan aktivitas lainnya serta berinteraksi dengan *stakeholders*. Sedangkan Rapat Kerja adalah rapat atau pertemuan para karyawan dan pimpinan guna membahas hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas suatu instansi, di dalam rapat kerja tersebut biasanya Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) Beji Lintar di sosialisasikan kepada internal perusahaan PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya Area Ciracas. Berikut penjelasan dari bapak Mohamat Emir Ferdian (32 Tahun) selaku Supervisor Pemasaran & Pelayanan Pelanggan di PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya Area Ciracas:

> "Sosialisasi kita lakukan tidak hanya kepada eksternal PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya Area Ciracas saja mas, tetapi kita juga lakukan kepada internal perusahaan. Hal tersebut kita lakukan agar seluruh pegawai kita mengenal dan paham tentang program ini sampai dengan tujuan dan manfaatnya, jangan sampai pihak eksternal perusahaan mengenal tetapi dari pihak internal perusahaan ada yang tidak mengenal mas. Biasanya sosialisasi terhadap pihak internal perusahaan kita lakukan pada saat *Code of Conduct* dan Rapat Kerja.

> Karena menurut kami pada saat *Code of Conduct* dan Rapat kerja merupakan waktu yang paling tepat untuk mensosialisasikan program ini dan membahas permasalahan yang sering terjadi pada program ini". (hasil wawancara tanggal 23 November 2016 Pukul 10.15)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya Area Ciracas juga melakukan sosialisasi kepada internal perusahaan, hal tersebut dilakukan dengan harapan agar para pegawai di PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya Area Ciracas lebih mengenal dan handal dalam menjalankan program ini. Selain itu, PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya Area Ciracas juga melakukan sosialisasi secara langsung atau *on the spot*. Berikut adalah kondisi pada saat sosialisasi secara langsung atau *on the spot*:



Gambar 6. Sosialisasi Program Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) Beji Lintar
Sumber: Dokumentasi Peneliti

Gambar diatas membuktikan bahwa PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya Area Ciracas juga melakukan sosialisasi program secara

langsung atau *on the spot*. Biasanya sehabis Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) Beji Lintar dipasang oleh PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya Area Ciracas juga dipasang *banner* disekitar situ, agar masyarakat menjadi tau dan bisa memanfaatkan program ini. Selain itu biasanya mereka juga sosialisasi langsung atau *on the spot* ke kecamatan-kecamatan. Kecamatan-kecamatan yang sudah pernah dilakukan sosialisasi program ini oleh PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya Area Ciracas adalah kecamatan ciracas, cipayung, pasar rebo dan cimanggis.

e. Proses Tahapan Implementasi Program

Dalam implementasi program ini ada beberapa proses yang harus diterapkan agar implementasi program Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) Beji Lintar dapat berjalan dengan baik dan juga menghasilkan keluaran yang memuaskan bagi pelaksana program maupun masyarakat umum. Adapun implementasi itu merupakan proses yang memerlukan tindakan-tindakan sistematis yang jelas. Berikut pernyataan yang diberikan oleh Bapak Saslizar (48 Tahun) selaku Manajer PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya Area Ciracas, yaitu:

> "Program Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) Beji Lintar ini kan merupakan suatu kebijakan publik mas. Setiap program pasti memiliki susunan tahapan pelaksanaan yang telah disusun dan harus dilaksanakan oleh pihak pelaksana, kalau tahapan pelaksana implementasi program Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) Beji Lintar disini tahapannya yang pertama diperlukan seperti kordinasi antara aktor pelaksana program untuk menentukan lokasi-lokasi yang akan dipasang Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) Beji Lintar dan melakukan pemasangan Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) Beji Lintar. Tahapan yang kedua adalah ketersediaan sumber daya pendukung seperti sumber daya manusia dan sumber daya finansial. Selanjutnya terakhir sosialisasi dan komunikasi dengan masyarakat

agar masyarakat mengetahui manfaat dari program ini serta tujuannya, dan untuk mengetahui bagaimana respon masyarakat mengenai program ini". (hasil wawancara tanggal 22 November 2016 Pukul 13.15)

Berdasarkan pernyataan diatas dapat di lihat bahwa dalam implementasi program Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) Beji Lintar di PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya Area Ciracas dibutuhkan beberapa tahapan proses antara lain yang pertama adalah diperlukan kordinasi antara aktor pelaksana program untuk menentukan lokasi-lokasi yang akan dipasang Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) Beji Lintar dan melakukan pemasangan Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) Beji Lintar. Adapun kordinasi antara aktor pelaksana program yang dimaksud yaitu untuk menentukan lokasi-lokasi mana yang akan dipasang Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) Beji Lintar, biasanya kordinasi tersebut dilakukan dengan pihak Kecamatan dan Kelurahan. Kordinasi tersebut dilakukan agar PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya Area Ciracas mendapatkan ijin untuk melakukan pemasangan Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) Beji Lintar dari pihak Kecamatan dan Kelurahan, agar dikemudian hari tidak terjadi permasalahan tentang ijin penggunaan fasilitas umum.

Tahapan proses implementasi yang kedua yaitu ketersediaan sumber daya dalam implementasi program. Sumber daya tersebut dibagi menjadi dua yaitu adanya sumber daya manusia sebagai aktor pelaksana program dan sumber daya finasial sebagai alat (*tools*) yang penting untuk mendukung berjalannya implementasi program ini. Sumber daya finansial akan

berhubungan dengan berapa pengeluaran yang harus disediakan untuk membiayai gaji tenaga kerja, alat-alat yang dibutuhkan dan harus dibeli serta berapa hasil yang akan dicapai dari suatu organisasi.

Tahapan yang terakhir yaitu sosialisasi dan komunikasi dengan masyarakat agar masyarakat mengetahui manfaat dari program serta tujuannya, dan untuk mengetahui bagaimana respon masyarakat mengenai program ini. Tahapan terakhir ini biasanya juga dimanfaatkan oleh PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya Area Ciracas untuk menerima masukan dari masyarakat terkait kekurangan yang ada pada program ini.

Adapun tahapan pokok proses implementasi diperlukan dalam pelaksanaan program guna untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan. Dalam hal ini berjalannya program Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) Beji Lintar diharapkan mampu bekerjasama dengan berbagai pihak, baik dari pihak internal perusahaan maupun eksternal perusahaan. Serta keahlian dan kehandalan sumber daya manusia dari berbagai pihak yang terlibat dalam implementasi program ini, dan kemampuan pihak internal dari PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya Area Ciracas untuk mencapai tujuan dan manfaat dari program agar mendapatkan respon yang baik dari masyarakat untuk menggunakan program ini.

4.2.2 Faktor Penghambat dan Pendukung dari Implementasi Program Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) Beji Lintar di PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya Area Ciracas

Implementasi Program Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) Beji Lintar di PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya Area Ciracas tidak dapat terlepas dari adanya faktor pendukung dan faktor penghambat. Adapun faktor pendukung dan faktor penghambat yaitu, meliputi:

a. Faktor Pendukung

1. Sumber Daya Manusia

Pelaksanaan program Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) Beji Lintar di PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya Area Ciracas tidak terlepas dari adanya faktor pendukung. Dalam penelitian ini faktor pendukung program Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) Beji Lintar yaitu adanya dukungan sumber daya manusia yang profesional sehingga dapat menentukan kesuksesan pencapaian dari tujuan program tersebut. Tujuan utama dari program Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) Beji Lintar yaitu untuk meningkatkan penjualan tenaga listrik dan turunnya *losses* distribusi karena pemakaian listrik di tempat-tempat umum yang selama ini tidak terukur, beresiko tinggi dan tidak termonitor bisa dikendalikan dengan efektif melalui Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) Beji Lintar ini.

Berkaitan dengan hal tersebut menurut Bapak Amin Bunyamin (40 Tahun) selaku Asisten Manajer Transaksi Energi, yaitu:

> "Menurut saya, ketersediaan sumber daya manusia pada pelaksanaan program ini sudah baik mas, meskipun sebenarnya sumber daya manusia tidak terlepas dari pihak internal perusahaan dan pihak eksternal perusahaan, tetapi setidaknya PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya Area Ciracas dibantu oleh Vendor dalam pelaksanaan program ini, sehingga target yang sudah direncanakan dapat tercapai". (hasil wawancara tanggal 24 November 2016 Pukul 11.15)

Berdasarkan penjelasan dari Bapak Amin Bunyamin (40 Tahun) diatas dapat diketahui bahwa ketersediaan sumber daya manusia dalam pelaksanaan program ini sudah memenuhi kriteria. Terlebih lagi dalam pelaksanaan program ini pihak internal PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya Area Ciracas dibantu oleh pihak Vendor dalam hal pengadaan material dan pemasangan Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) Beji Lintar.

2. Pembagian tugas-tugas dan kewajiban yang memadai dalam pelaksanaan program

Aktor-aktor yang terlibat dalam implementasi program Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) Beji Lintar terbilang cukup banyak, banyaknya aktor tersebut tidak membuat masing-masing aktor berjalan sendiri-sendiri tetapi justru para aktor tersebut saling bersinergitas dalam mendukung keberhasilan implementasi program Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) Beji Lintar. Sinergitas tersebut bisa berjalan karena adanya pembagian tugas-tugas dan kewajiban yang memadai dalam pelaksanaan program ini.

Hal itu senada dengan keterangan dari bapak Saslizar (48 tahun) selaku Manajer PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya Area Ciracas, yaitu:

> "Pada saat kami melakukan kordinasi dengan aktor-aktor yang terlibat, kami juga melakukan pembagian tugas dan kewajiban dengan mereka mas. Jadi sebelum program ini dilaksanakan, kami sudah menentukan pembagian tugas dan kewajiban tersebut. Pembagian tugas tersebut sudah mulai kami lakukan dari aktor internal PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya Area Ciracas yaitu bidang niaga, transaksi energi, konstruksi, dan perencanaan. Kemudian juga kami lakukan pada aktor eksternal PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya Area Ciracas yaitu Vendor (PT Tangguh Jaya dan PT Tri Tunggal), Gubernur DKI Jakarta, Walikota Jakarta Timur, Kecamatan dan Kelurahan". (hasil wawancara tanggal 24 November 2016 Pukul 11.35)

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa pihak PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya Area Ciracas sudah melakukan pembagian tugas kepada aktor-aktor yang terlibat. Dengan pembagian tugas tersebut diharapkan setiap aktor yang terlibat dapat mengetahui serta mengerti apa hak dan kewajibannya. Adanya pembagian tugas dan kewajiban yang memadai diharapkan dapat mendukung keberhasilan implementasi program Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) Beji Lintar.

3. Adanya Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat

Selain adanya sumber daya manusia yang profesional dalam pelaksanaan program ini, faktor pendukung lainnya adalah adanya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi terhadap program ini. Bahwa sebenarnya kesadaran masyarakat sangatlah diperlukan dalam pelaksanaan program, karena tanpa adanya kesadaran dari masyarakat terhadap pentingnya implementasi ini, program Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) Beji Lintar tidak dapat berjalan dengan maksimal.

Berikut pernyataan bapak Amin Bunyamin (40 Tahun) selaku Asisten Manajer Transaksi Energi mengenai tingkat kesadaran masyarakat untuk menggunakan Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) Beji Lintar, yaitu:

> "Kesadaran masyarakat itu sangat penting mas, karena kalau masyarakat tidak mempunyai kesadaran untuk menggunakan sumber energi listrik secara legal, program ini tidak akan tepat sasaran. Untuk itu kami dari awal sudah tekankan bahwa kami ingin merubah budayanya dulu, agar masyarakat terbiasa untuk menggunakan listrik secara tertib tanpa harus melakukan pelanggaran. Selama program ini berjalan, kami lihat di lokasi-lokasi yang sudah disediakan Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) Beji Lintar banya digunakan oleh masyarakat. Hal tersebut membuat kami menjadi senang dan termotivasi untuk terus memperbaiki program ini. Banyaknya masyarakat yang menggunakan program ini juga mencerminkan tingginya kesadaran masyarakat". (hasil wawancara tanggal 24 November 2016 Pukul 11.25)

Dari pernyataan diatas dapat diketahui bahwa adanya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) Beji Lintar. Kesadaran dan partisipasi masyarakat tersebut merupakan faktor pendukung dalam keberhasilan program ini, Karena program ini dihadirkan untuk masyarakat, bila masyarakat tidak berpartisipasi dengan cara menggunakannya maka program ini terbilang gagal. Tetapi dari pernyataan diatas dapat kita ketahui bahwa selama pelaksanaan program ini masyarakat sangat antusiasme. Semoga dengan adanya antusiasme yang tinggi tersebut dapat mendukung tercapainya tujuan dari program ini.

b. Faktor Penghambat

1. Pengaruh cuaca pada saat pemasangan

Cuaca sangat berpengaruh dalam pelaksanaan program ini khususnya pada saat pemasangan Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) Beji Lintar. Perlu diketahui bahwa berdasarkan spesifikasinya Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) Beji Lintar terbagi menjadi dua tipe, yaitu tipe *standing* dan tipe *hook*. Pada saat musin hujan PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya Area Ciracas agak kesulitan untuk memasang salah satu tipe Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) Beji Lintar, yaitu kesulitan terjadi pada saat memasang tipe *standing*.

Berikut pernyataan Bapak Amin Bunyamin (40 Tahun) selaku Asisten Manajer Transaksi Energi mengenai pengaruh cuaca pada saat pemasangan salah satu tipe Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) Beji Lintar, yaitu:

> "Pihak kami agak kesulitan pada saat melakukan pemasangan tipe *standing* waktu musim hujan. Hal itu disebabkan karena pada tipe *standing* kami harus membuat pondasi dulu yang unsurnya dari batu bata dan semen, pondasi tersebut harus dibuat agar Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) Beji Lintar tipe *standing* bisa berdiri kokoh. Tetapi kalau cuacanya tidak menentukan apalagi kalau musim hujan, itu sangat mengganggu pekerjaan kami. Makanya pihak kami lebih banyak memasang Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) Beji Lintar jenis tipe *hook* dikarenakan pemasangannya tidak begitu rumit seperti tipe *standing*". (hasil wawancara tanggal 24 November 2016 Pukul 13.25)

Dari pernyataan diatas dapat diketahui bahwa cuaca merupakan salah satu faktor penghambat dalam pelaksaan program ini, khususnya pada saat pemasangan. Kemudian dari pernyataan tersebut dapat diketahui alasan PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya Area Ciracas lebih banyak

memasang Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) Beji Lintar tipe *hook* karena pada saat pemasangannya tidak begitu rumit sepeti tipe *standing* yang harus membuat pondasi terlebih dahulu.

Pengaruh cuaca pada saat pemasangan salah satu tipe Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) Beji Lintar menjadi masalah utama yang dihadapi oleh PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya Area Ciracas. Sehingga dapat dikatakan bahwa pengaruh cuaca pada saat pemasangan merupakan faktor penghambat dalam implementasi program Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) Beji Lintar di PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya Area Ciracas. Hal tersebutlah yang mengakibatkan program ini belum maksimal dan sedikit terhambat.

2. Penentuan lokasi Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) Beji Lintar

Penentuan lokasi Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) Beji Lintar juga menjadi salah satu faktor penghambat dari implementasi program ini setelah faktor cuaca. Hambatan yang sering terjadi dalam hal ini adalah biasanya PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya Area Ciracas telah melakukan kordinasi dan penentuan lokasi dengan pihak Kecamatan dan Kelurahan. Dari kordinasi dengan kedua belah pihak tersebut biasanya membuahkan hasil yaitu mendapatkan lokasi yang dianggap ada indikasi pencurian listrik dan akan dipasang Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) Beji Lintar.

Setelah pihak PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya Area Ciracas dan pihak kecamatan serta kelurahan survey ke lokasi ternyata tidak ada

lahan yang tepat untuk difasilitasi Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) Beji Lintar. Hal tersebut senada dengan pendapat Bapak Mohamat Emir Ferdian (32 Tahun) selaku Supervisor Pemasaran & Pelayanan Pelanggan, yaitu:

> "Kita biasanya dengan tim sudah memberi tahu pihak kecamatan dan kelurahan mengenai titik-titik yang rawan pencurian listrik, namun sangat disayangkan pada titik-titik tersebut splu tidak bisa disedikan. Biasanya hal itu disebabkan karena tidak adanya lahan yang bisa menampung tipe *standing* dan biasanya untuk tipe *hook* jarak antara titik yang telah ditentukan jauh dengan tiang listrik, sehingga kalo kami memasang nanti akan kurang tepat sasaran". (hasil wawancara tanggal 24 November 2016 Pukul 14.15)

Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa program Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) Beji Lintar sangat memperhatikan lokasi, karena kalau PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya Area Ciracas salah dalam menempatkan Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) Beji Lintar maka nantinya tidak akan tepat sasaran. Jadi kalo dirasa tidak bisa dipasang disuatu lokasi maka tidak akan dipasang walaupun di lokasi tersebut terindikasi pencurian listrik yang cukup tinggi. Karena pihak kami juga memperhatikan keamanan dari Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) Beji Lintar juga. Kemudian adanya preman atau pemegang wilayah pada lokasi Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) Beji Lintar juga menjadi faktor penghambat dalam menentukan lokasi.

Berikut pernyataan dari Bapak Mohamat Emir Ferdian (32 Tahun) selaku Supervisor Pemasaran & Pelayanan Pelanggan, yaitu:

> "Tidak bisa dipungkiri kalo di daerah Jakarta masih banyak kelompok-kelompok yg menguasai suatu wilayah, biasanya kan para pedagang kaki lima mendapatkan sumber listrik dari mereka dengan

sistem setoran. Dengan adanya program ini biasanya ada sedikit penolakan karena mereka tidak mendapatkan setoran lagi dari uang listrik. Tetapi pihak kami mencoba melakukan negosiasi agar Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) Beji Lintar bisa tetap dipasang, yaitu dengan cara preman tersebut kami rangkul sebagai pihak yang mengelola, tidak apa-apa dikelola preman yang penting mereka mengambil listrik dari Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) Beji Lintar milik PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya Area Ciracas". (hasil wawancara tanggal 24 November 2016 Pukul 14.05)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa penentuan lokasi Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) Beji Lintar merupakan salah satu faktor penghambat dalam implementasi program ini. Hal tersebut disebabkan karena tidak adanya lokasi yang tepat untuk pemasangan Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) Beji Lintar disuatu titik dan masih adanya preman yang menguasai suatu daerah. Adanya faktor penghambat tersebut menyebabkan program ini tidak berjalan dengan maksimal dan sedikit terhambat.

4.3 **Analisis Data**

4.3.1 **Implementasi Program Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) Beji Lintar di PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya Area Ciracas.**

Implementasi kebijakan publik merupakan aktivitas penyelesaian atau pelaksanaan suatu kebijakan yang telah ditetapkan atau disetujui dengan menggunakan sarana (alat) untuk mencapai tujuan kebijakan. Salah satu tahapan penting di dalam kebijakan publik adalah tahap implementasi kebijakan. Tahap implementasi sering dianggap remeh atau kurang penting oleh para aktor kebijakan, karena menurut mereka tahap implementasi hanya sebagai suatu pelaksanaan dari apa yang telah diputuskan dan di

tetapkan oleh para pengambil keputusan. Namun pada kenyataannya, tahapan implementasi menjadi sangat penting karena suatu kebijakan hanya akan sekedar menjadi impian belaka apabila tidak di implementasikan. Jadi pada intinya, implementasi kebijakan publik adalah tahap dimana suatu kebijakan publik dilaksanakan secara maksimal sehingga tujuan yang telah direncanakan di dalam kebijakan publik itu sendiri dapat tercapai.

Selanjutnya Grindle dalam Winarno (2016: 135) memberikan pandangannya tentang implementasi dengan mengatakan bahwa secara umum, tugas implementasi adalah membentuk suatu kaitan (*linkage*) yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah. Berdasarkan pendapat tersebut dapat dikatakan bahwa implementasi adalah suatu proses kegiatan atau pekerjaan yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Dalam hal ini implementasi yang dimaksud yaitu implementasi program Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) Beji Lintar di PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya Area Ciracas.

Program Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) Beji Lintar merupakan suatu program yang dibuat oleh PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya, program tersebut di implementasikan kepada unit-unit pelaksana dibawah PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya. Salah satu unit pelaksana yang mengimplementasikan program ini adalah PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya Area Ciracas. Program Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) Beji Lintar di PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta

Raya Area Ciracas ini diharapkan dapat mengurangi praktik pecurian listrik yang berdampak pada menurunya susut (*losses*) non teknis distribusi dan meningkatkan pelayanan dari PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya Area Ciracas kepada masyarakat dengan menyediakan sumber energi tenaga listrik di fasilitas umum secara aman dan legal.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, menurut Manajer PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya Area Ciracas mengatakan bahwa implementasi program Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) Beji Lintar di PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya Area Ciracas sampai saat ini dapat dikatakan berjalan dengan lancar. Implementasi program Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) Beji Lintar di PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya Area Ciracas ini telah dilakukan sejak bulan April Tahun 2016 yang sesuai dengan Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor: 0017.P/DIR/2015 tentang Program Peningkatan dan Pengendalian Penjualan Tenaga Listrik. Dalam Peraturan Direksi tersebut, tepatnya pada Pasal 12 Ayat 2 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik Non Konsumen dijelaskan bahwa Unit PLN dapat memasang APP sistem prabayar untuk penggunaan khusus seperti pasar malam, pedagang kaki lima, kegiatan umum/sosial (lapangan olah raga), pos ronda atas nama PLN setempat (IDPEL PLN) dengan daya dibatasi maksimum 5500 VA dan dikenakan tarif Layanan Khusus TR dengan faktor pengali N=1. Pasal 12 Ayat 2 tersebut merupakan dasar hukum PT PLN (Persero) Distribusi

Jakarta Raya Area Ciracas dalam menjalankan program Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) Beji Lintar.

Hal tersebut juga dapat dilihat melalui pendapat dari Manajer PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya Area Ciracas, bahwa program ini difokuskan untuk merubah budaya dan *mindset* pedagang kaki lima dan masyarakat pada umumnya agar tidak melakukan pencurian listrik lagi dan mau berpartisipasi serta menggunakan program ini. Sejauh ini masyarakat di wilayah kerja PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya Area Ciracas mimiliki tingkat partisipasi yang baik dengan cara ikut serta menggunakan Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) Beji Lintar dan sangat mendukung program ini.

Dari data yang didapatkan peneliti dilapangan menunjukan bahwa terjadi kemajuan yang signifikan dari awal berjalannya program ini sampai dengan bulan November tahun 2016. Apabila kita lihat dari kemajuan yang terjadi tersebut menunjukan bahwa implementasi program Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) Beji Lintar di PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya Area Ciracas sampai saat ini berjalan dengan baik dan lancar sehingga berdampak kepada masyarakat bahwa pencurian listrik yang biasa dilakukan oleh pedagang kaki lima dan masyarakat pada umumnya berkurang setelah adanya Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) Beji Lintar dan memfasilitasi masyarakat untuk mendapatkan sumber energi tenaga listrik di fasilitas-fasilitas umum dan tempat terbuka. Dengan berjalannya program ini diharapkan susut (*losses*) distribusi dapat

berkurang. Hal tersebut tidak terlepas dari konsistensi yang dilakukan oleh PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya Area Ciracas yang sampai bulan November tahun 2016 mampu memasang sebanyak 22 unit Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) Beji Lintar. Hasil tersebut telah sesuai dengan tujuan dari adanya program Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) Beji Lintar yaitu menghilangkan kebiasaan melakukan pencurian listrik secara ilegal dan meningkatkan pelayanan PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya Area Ciracas kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa implementasi program Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) Beji Lintar di PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya Area Ciracas sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan pandangan Grindle dalam Winarno (2016: 135) tentang implementasi dengan mengatakan bahwa secara umum, tugas implementasi adalah membentuk suatu kaitan (*linkage*) yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah.

Dalam implementasi program Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) Beji Lintar diharapkan suatu keberhasilan agar dapat tercapainya tujuan yang telah dibuat. Tingkat partisipasi masyarakat dengan cara menggunakan Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) Beji Lintar dapat dikatakan sebagai kunci keberhasilan dari implementasi program ini. Dimana program ini ditujukan untuk menyediakan sumber energi listrik secara aman dan legal di fasilitas-fasilitas umum, yang ditujukan kepada

pedagang kaki lima dan masyarakat pada umumnya agar dapat menggunakan dan menikmati program yang sudah dibuat ini.

Dalam hal ini dapat kita ketahui dari hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi program Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) Beji Lintar sangatlah mendukung dan masyarakat pun ikut mendukung program ini dengan ikut menggunakan program ini. Namun, tidak dapat di pungkiri bahwa dari hasil wawancara dan penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa di awal implementasi program masih ada sebagian masyarakat yang memiliki tingkat kesadaran rendah. Masih ada disekitar lokasi pedagang kaki lima berjualan yang masih tidak menggunakan Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) Beji Lintar. Namun dengan berjalannya waktu, peningkatan partisipasi masyarakat mulai terlihat, hal itu disebabkan oleh sosialisasi yang sering dilakukan oleh pihak PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya Area Ciracas. Sosialisasi dapat merubah pola pikir masyarakat, karena masyarakat menjadi tau fungsi dan manfaat dari program ini serta keunggulannya program ini. Dengan pengetahuan yang dimiliki tersebut, masyarakat menjadi nyaman untuk menggunakan Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) Beji Lintar. Diharapkan dengan adanya program Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) Beji Lintar di wilayah kerja PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya Area Ciracas ini mampu merubah pola pikir pedagang kaki lima dan masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan pencurian listrik lagi yang dapat membahayakan diri sendiri dan

lingkungan disekitar serta merugikan PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya Area Ciracas dan juga negara.

a. Aktor dan Pelaku dalam Implementasi Program Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) Beji Lintar

Dalam implementasi program, aktor dan pelaku yang terlibat dalam pelaksanaan program merupakan salah satu faktor yang penting. Dalam hal tersebut aktor dan pelaku dalam implementasi program Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) Beji Lintar adalah berasal dari internal PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya Area Ciracas dan eksternal PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya Area Ciracas. Aktor-aktor yang terlibat dari internal PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya Area Ciracas adalah bidang Niaga, bidang Konstruksi, bidang Transaksi Energi, dan bidang Perencanaan. Sedangkan aktor-aktor yang terlibat dari eksternal PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya Area Ciracas adalah PT Tangguh Jaya (Vendor), PT Tri Tunggal (Vendor), Gubernur DKI Jakarta, Walikota Jakarta Timur, Kecamatan dan Kelurahan. Setiap masing-masing aktor dalam implementasi program memegang suatu peranan yang penting guna untuk mencapai tujuan dari program itu sendiri.

Selanjutnya Aktor Kebijakan Publik di Indonesia menurut Agustino (2012: 39-41) adalah sebagai berikut:

1. MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat)
2. DPR (Dewan Perwakilan Rakyat)
3. Presiden

4. Pemerintah
    a) Pemerintah Pusat
    b) Menteri
    c) Lembaga Pemerintah Non-Departemen
    d) Direktoral Jendral (Dirjen)
    e) Badan-Badan Negara Lainnya (Bank Sentral, BUMN, Dll)
    f) Pemerintah Daerah Provinsi
    g) Pemerintah Daerah Kota
    h) Kepala Desa
5. Dewan Perwakilan Daerah Provinsi
6. Dewan Perwakilan Daerah Kota/Kabupaten
7. Badan Perwakilan Desa.

Sedangkan menurut Manajer PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya Area Ciracas aktor-aktor yang terlibat dalam program ini adalah terdiri dari pihak internal PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya Area Ciracas dan pihak eksternal PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya Area Ciracas. Aktor internal terdiri dari bidang niaga, bidang konstruksi, bidang transaksi energi dan bidang perencanaan. Sedangkan dari eksternal terdiri dari Vendor, Gubernur DKI Jakarta, Walikota Jakarta Timur, Kecamatan dan Kelurahan.

Seluruh aktor yang terlibat dalam implementasi program Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) Beji Lintar masing-masing memiliki tanggung jawab. Disamping itu seluruh aktor diharapkan dapat menjalin

komunikasi yang baik dalam melakukan kerjasama. Dengan adanya komunikasi yang baik dan dapat bekerjasama antara aktor-aktor yang terlibat maka tujuan implementasi program Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) Beji Lintar dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa seluruh aktor dan pelaku yang terlibat dalam implementasi program Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) Beji Lintar memiliki masing-masing peran yang berbeda dan memiliki tanggung jawab untuk keberhasilan program ini. Peranan dari internal PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya Area Ciracas adalah sebagai berikut:

1. Bidang Niaga berkewajiban untuk menangani urusan administrasi dan pemasaran;
2. Bidang Konstruksi berkewajiban untuk melakukan pemasangan;
3. Bidang Transaksi Energi berkewajiban untuk uji coba atau untuk meyakinkan bahwa tidak ada kerusakan pada Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) Beji Lintar sebelum dipasang dilokasi yang telah ditetapkan. Bidang Transaksi Energi juga berkewajiban untuk melakukan pemeliharaan (*maintenance)* secara berkala dan *monitoring* penggunaan Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) Beji Lintar;
4. Bidang Perencanaan berkewajiban untuk pengadaan material Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) Beji Lintar yang dibantu oleh PT Tri Tunggal (Vendor).

Sedangkan peranan dari eksternal PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya Area Ciracas adalah sebagai berikut:

1. PT Tri Tunggal (Vendor) dipercaya oleh PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya Area Ciracas untuk menyediakan material Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) Beji Lintar;
2. PT Tangguh Jaya (Vendor) dipercaya oleh PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya Area Ciracas untuk membantu PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya Area Ciracas dalam hal pemasangan Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) Beji Lintar;
3. Gubernur DKI Jakarta berperan sebagai pelindung dan pihak yang bertanggung jawab dari program Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) Beji Lintar, maksudnya adalah Gubernur DKI Jakarta merupakan aktor yang menyetujui implementasi Program Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) Beji Lintar di lahan fasilitas umum tanpa dikenakan biaya sewa KSPI (Kerjasama Pembangunan Infrastruktur) ketenagalistrikan;
4. Walikota Jakarta Timur berperan sebagai pihak yang menjebatani antara PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya Area Ciracas dengan pihak Kelurahan dan Kecamatan;
5. Kecamatan dan Kelurahan berperan sebagai pihak yang berwenang untuk menentukan dan meminta lokasi atau titik mana yang diijinkan untuk dapat dipasang Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) Beji Lintar.

Dengan adanya peran dari masing-masing aktor yang terlibat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa aktor-aktor dan pelaku dalam implementasi program Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) Beji Lintar dapat mendukung dalam pelaksanaan program ini. Adanya dukungan dari aktor-aktor dan pelaku yang terlibat diharapkan mampu mensukseskan program ini, sehingga tujuan dari program ini dapat tercapai.

b. Tujuan dan Sasaran Program

Program Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) Beji Lintar merupakan program yang digunakan oleh PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya Area Ciracas untuk mengurangi praktik pencurian listrik dan untuk menyediakan sumber energi listrik di tempat umum secara terbuka, aman, dan legal. Dimana program ini di arahkan kepada seluruh masyarakat umum khususnya Pedagang Kaki Lima (PKL). Adapun tujuan umum dari program Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) Beji Lintar yaitu untuk meningkatkan penjualan tenaga listrik dan turunnya *losses* distribusi karena pemakaian listrik di tempat-tempat umum yang selama ini tidak terukur, beresiko tinggi dan tidak termonitor bisa dikendalikan dengan efektif melalui Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) Beji Lintar ini.

Sehingga jelas bahwa tujuan dari program Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) Beji Lintar ini merupakan usaha dari PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya Area Ciracas untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat umum dan pedagang kaki lima agar tidak melakukan pencurian

listrik secara ilegal di tempat-tempat umum, serta menyediakan masyarakat sumber energi tenaga listrik secara terbuka, aman dan legal.

Dalam implementasi program Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) Beji Lintar di PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya Area Ciracas juga diharapkan dapat menurunkan susut (*losses*) non teknis distribusi yang disebabkan oleh praktik pencurian listrik. Dengan adanya harapan seperti itu diharapkan secara bertahap tidak ada lagi masyarakat yang melakukan pencurian listrik dan masyarakat bisa beralih ke Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) Beji Lintar. Salah satu tujuan dari implementasi program Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) Beji Lintar di PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya Area Ciracas sendiri merupakan usaha pencapaian untuk menurunkan susut (*losses*) non teknis distribusi, karena dari beberapa tujuan yang telah disebutkan beberapa diantaranya merupakan syarat untuk menurunkan susut (*losses*) non teknis distribusi.

Menurut Van Metter dan Van Horn dalam Agustino (2012: 141-143) kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosio-kultur yang ada di level pelaksana kebijakan. Dalam hal ini PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya Area Ciracas melaksanakan suatu kebijakan yaitu program Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) Beji Lintar, dimana program tersebut dilaksanakan untuk mengurangi praktik pencurian listrik dan

menyediakan sumber energi tenaga listrik di tempat-tempat umum secara legal dan aman untuk masyarakat.

Menurut Abdullah (1988: 398), dalam proses implementasi sekurang-kurangnya terdapat tiga unsur penting dan mutlak, yaitu salah satunya *target group*. *Target group* yaitu kelompok yang menjadi sasaran dan diharapkan akan menerima manfaat program tersebut. Dalam implementasi program Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) Beji Lintar di PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya Area Ciracas yang menjadi sasaran adalah pegadang kaki lima dan masyarakat pada umumnya.

Sasaran dari program Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) Beji Lintar adalah pedagang kaki lima dan masyarakat pada umumnya. Hal tersebut dapat dilihat dari lokasi-lokasi yang disediakan Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) Beji Lintar rata-rata di sekitar pedagang kaki lima berjualan. Langkah tersebut dilakukan oleh PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya Area Ciracas karena berdasarkan hasil analisa dan data yang diperoleh oleh tim dari Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) menunjukan bahwa penyebab susut (*losses*) terbesar pada non teknis disebabkan oleh pencurian listrik yang dilakukan oleh pedagang kaki lima. Jadi alasan tersebutlah yang membuat PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya Area Ciracas lebih memilih lokasi-lokasi di dekat pedagang kaki lima berjualan, karena lokasi tersebut rentan terhadap pencurian listrik.

Dampak yang ada dari tujuan program Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) Beji Lintar terlihat jelas dari antusiasme para Pedagang Kaki

Limat (PKL) terhadap keberadaan Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) Beji Lintar. Karena dengan adanya Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) Beji Lintar mereka bisa meningkatkan taraf hidupnya. Sebagai contoh, sebelum adanya Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) Beji Lintar mereka hanya berjualan makanan. Tetapi setelah adanya program ini mereka menjadi berfikir untuk menambah pengasilannya dengan membeli blender dan kulkas mini. Jadi mereka yang awalnya hanya menjual makanan sekarang mereka juga bisa menjual berbagai jenis minuman seperti *juice* dan lain-lain. Dengan begitu akan menambah pengasilan mereka yang akan berdampak pada meningkatnya taraf hidup para pedagang kaki lima.

Dengan adanya tujuan dan sasaran dari program Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) Beji Lintar yang jelas seperti diatas diharapkan program Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) Beji Lintar di PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya Area Ciracas dapat berjalan dengan lancar dan baik. Sehingga masyarakat dapat menikmati sumber energi tenaga listrik di tempat-tempat umum secara aman dan legal tanpa harus repot-repot mencari sumber listrik seperti sebelum adanya program tersebut. Peran dari para aktor yang terlibat tidak dapat terlepas dari keberhasilan program Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) Beji Lintar. Tanpa adanya dukungan dan peran serta dari pihak-pihak yang terlibat, maka program Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) Beji Lintar ini tidak akan berjalan dengan baik dan lancar.

Dari hasil wawancara dan pengamatan yang ada dilapangan maka dapat kita simpulkan bahwa program Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) Beji Lintar yang dilaksanakan oleh PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya Area Ciracas memang bertujuan untuk mengurangi praktik pencurian listrik dan menyediakan sumber energi tenaga listrik di tempat-tempat umum secara aman dan legal. Komitmen masyarakat untuk merubah budayanya juga sangat penting guna mendukung keberhasilan program Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) Beji Lintar.

c. Sumber Daya

1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya merupakan suatu faktor pendukung dalam implementasi program Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) Beji Lintar, terutama ketersediaan sumber daya manusia. Sumber daya manusia sebagai penggerak program Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) Beji Lintar sangatlah diperlukan, tanpa adanya sumber daya manusia program Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) Beji Lintar tidak dapat berjalan dengan baik. Sedangkan dengan adanya sumber daya manusia yang cukup maka implementasi program Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) Beji Lintar dapat berjalan dengan maksimal dan tujuan dari program tersebut dapat terwujud.

Dalam hal ini sumber daya manusia yang tersedia dalam implementasi program Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) Beji Lintar yaitu berasal dari internal PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya Area Ciracas dan

eksternal PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya Area Ciracas. Sumber daya manusia yang tersedia dari internal PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya Area Ciracas adalah berasal dari bidang Niaga, bidang Konstruksi, bidang Transaksi Energi dan bidang Perencanaan. Sedangkan sumber daya manusia yang terlibat dari eksternal PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya Area Ciracas adalah Vendor (PT Tangguh Jaya dan PT Tri Tunggal), Gubernur DKI Jakarta, Walikota Jakarta Timur, Kecamatan dan Kelurahan. Sedangkan menurut penuturan Manajer PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya Area Ciracas sumber daya manusia yang terlibat dalam implementasi program Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) Beji Lintar sudah cukup membantu untuk mensukseskan program ini.

Menurut Van Metter dan Van Horn dalam Agustino (2012: 141-144) mengatakan bahwa manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Dalam hal ini ketersediaan sumber daya manusia yang terlibat dalam implementasi program Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) Beji Lintar sudah cukup membantu, sumber daya manusia yang terlibat dalam program ini mempunyai peran masing-masing. Oleh karena itu sumber daya manusia dalam program ini merupakan sumber daya terpenting, karena tanpa sumber daya manusia program ini tidak dapat terlaksana dengan baik.

Sedangkan menurut Manajer PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya Area Ciracas, sumber daya manusia dapat dikatakan sudah mencukupi

dikarenakan PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya Area Ciracas terbantu dengan adanya vendor. Adanya dua vendor yang dipercaya dan melakukan kerjasama dengan PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya Area Ciracas sangat membantu dalam implementasi program Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) Beji Lintar. Kedua vendor tersebut yaitu PT Tangguh Jaya dan PT Tri Tunggal. PT Tri Tunggal berperan dalam hal membantu pengadaan material, sedangkan PT Tangguh Jaya berperan dalam membantu pemasangan Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) Beji Lintar.

Hasil penelitian mengenai ketersediaan sumber daya manusia di PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya Area Ciracas yaitu sudah cukup membantu dalam implementasi program Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) Beji Lintar. Ditambah sumber daya manusia yang dimiliki terlatih dan profesional, hal tersebut tidak terlepas dari latar belakang pendidikan para pegawai yang kebanyakan berasal dari jurusan teknik. Para pegawai yang mempunyai latar belakang pendidikan jurusan teknik mempunyai kelebihan tersendiri dalam implementasi program Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) Beji Lintar. Dengan ketersediaan sumber daya manusia yang sudah mencukupi setidaknya program Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) Beji Lintar dapat berjalan dengan baik.

2. Sumber Daya Finansial

Dalam implementasi suatu program diperlukan juga dukungan dari sumber daya finansial. Sumber daya finansial diperlukan sebagai faktor

pendukung dalam pelaksanaan suatu program. Finansial merupakan alat (*tools*) yang penting untuk mencapai tujuan karena segala sesuatu harus diperhitungkan secara rasional. Sumber daya finansial biasanya digunakan dalam suatu program untuk membiayai gaji tenaga kerja dan alat-alat yang dibutuhkan serta harus dibeli.

Menurut Van Metter dan Van Horn dalam Agustino (2012: 141-144) bahwa selain sumber daya manusia, sumber daya-sumber daya lain juga diperhitungkan juga, salah satunya sumberdaya finansial. Dalam hal ini sumber daya finansial berasal dari dana investasi pemasaran dan penambahan pelanggan. Harga untuk satu unit Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) Beji Lintar adalah sekitar Rp 7.500.000. Biaya tersebut sangatlah murah jika dibandingkan dengan kerugian yang dialami oleh PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya Area Ciracas akibat pencurian energi listrik.

Menurut Manajer PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya Area Ciracas, biaya yang kita keluarkan untuk program ini tidak mahal, harga Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) Beji Lintar sekitar 7,5 juta/unit, sekarang baru 200 unit, kita baru keluar 1,6 milyar. Padahal dalam satu tahun ini, tahun 2016 kita untuk anggaran seluruh Jakarta aja 300-400 milyar untuk investasi pemasaran dan penambahan pelanggan, malah dengan adanya Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) Beji Lintar ini menggurangi praktik pencurian yang berdampak kepada *revenue* PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya Area Ciracas sendiri.

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan yang peneliti lakukan dilapang maka dapat disimpulkan bahwa program Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) Beji Lintar yang dilaksanakan oleh PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya Area Ciracas sudah memiliki sumber daya finansial yang mencukupi untuk melaksanakan program ini. Dengan adanya sumber daya finansial yang mencukupi tersebut maka dapat mendukung keberhasilan program Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) Beji Lintar di PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya Area Ciracas.

d. Sosialisasi Program

Pelaksanaan sosialisasi pada program Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) Beji Lintar dilakukan secara holistik. Sosialisasi tersebut dilakukan oleh PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya Area Ciracas mulai dari tingkat Gubernur DKI Jakarta, Walikota, Kecamatan, Kelurahan dan Masyarakat. Sosialisasi program yang di lakukan oleh PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya Area Ciracas menggunakan berbagai cara, seperti lewat media massa, media *online*, radio, seminar atau *talkshow* (festival budaya dan Hari Listrik Nasional).

Menurut Edward III dalam Widodo (2010: 97), komunikasi kebijakan memiliki beberapa dimensi, antara lain dimensi transmisi (*trasmission*), kejelasan (*clarity*) dan konsistensi (*consistency*). Ketiga dimensi tersebut dijelaskan oleh Edward III dalam Widodo (2010: 97) sebagai berikut:

1. Dimensi transmisi menghendaki agar kebijakan publik disampaikan tidak hanya disampaikan kepada pelaksana

(*implementors*) kebijakan tetapi juga disampaikan kepada kelompok sasaran kebijakan dan pihak lain yang berkepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung.

2. Dimensi kejelasan (*clarity*) menghendaki agar kebijakan yang ditrasmisikan kepada pelaksana, *target group* dan pihak lain yang berkepentingan secara jelas sehingga diantara mereka mengetahui apa yang menjadi maksud, tujuan, sasaran, serta substansi dari kebijakan publik tersebut sehingga masing-masing akan mengetahui apa yang harus dipersiapkan serta dilaksanakan untuk mensukseskan kebijakan tersebut secara efektif dan efisien.
3. Dimensi konsistensi (*consistency*) diperlukan agar kebijakan yang diambil tidak simpang siur sehingga membingungkan pelaksana kebijakan, *target group* dan pihak-pihak yang berkepentingan.

Dalam hal ini PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya Area Ciracas melakukan sosialisasi dan komunikasi keseluruh aktor-aktor yang terlibat dalam program Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) Beji Lintar. Baik aktor internal PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya Area Ciracas yaitu bidang niaga, bidang konstruksi, bidang transaksi energi dan bidang perencanaan. Maupun eksternal PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya Area Ciracas yaitu Vendor, Gubernur DKI Jakarta, Walikota Jakarta Timur, Kecamatan dan Kelurahan. Serta pedagang kaki lima dan masyarakat pada umumnya.

Menurut Manajer PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya Area Ciracas pihaknya memanfaatkan media cetak, media *online*, dan radio untuk mensosialisasikan program ini kepada pedagang kaki lima dan masyarakat pada umumnya bahkan aktor-aktor yang terlibat. Media cetak yang di pilih untuk mensosialisasikan program Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) Beji Lintar adalah Media Indonesia, Bisnis Indonesia, Warta Kota, Koran Jakarta, Sentana, Neraca dan Rakyat Merdeka. Sedangkan media *online* yang di pilih untuk mensosialisasikan program Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) Beji Lintar adalah Sindonews.com, Okezone.com, Antaranews.com. Kemudian radio juga merupakan salah satu media yang dipilih oleh PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya Area Ciracas untuk mensosialisasikan program ini, biasanya radio yang dipilih adalah radio Elshinta.

Sedangkan menurut Manajer PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya Area Ciracas sosialisasi juga dilakukan kepada internal PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya Area Ciracas, sosialisasi program tersebut biasanya dilakukan pada saat *Code of Conduct* dan Rapat Kerja. Hal tersebut di lakukan agar seluruh pegawai PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya Area Ciracas mengenal dan paham tentang program ini sampai dengan tujuan dan manfaatnya, jangan sampai pihak eksternal perusahaan mengenal tetapi dari pihak internal perusahaan ada yang tidak mengenal.

Dari hasil analisa yang peneliti lakukan dilapangan dan juga berdasarkan pendapat dari Manajer PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta

Raya Area Ciracas bahwa pihaknya juga telah melakukan sosialisasi program secara langsung atau *on the spot* kepada pedagang kaki lima dan masyarakat pada umumnya serta Kecamatan dan Kelurahan. Biasanya sehabis Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) Beji Lintar dipasang oleh PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya Area Ciracas juga dipasang *banner* disekitar situ, agar masyarakat menjadi tau dan bisa memanfaatkan program ini. Selain itu biasanya mereka juga sosialisasi langsung atau *on the spot* ke kecamatan-kecamatan. Kecamatan-kecamatan yang sudah pernah dilakukan sosialisasi program ini oleh PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya Area Ciracas adalah kecamatan ciracas, cipayung, pasar rebo dan cimanggis.

Berdasarkan hasil penelitian dan pendapat yang telah disebutkan diatas maka dapat disimpulkan bahwa sosialisasi program Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) Beji Lintar di PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya Area Ciracas sudah berjalan dengan baik. Dengan sosialisasi dan komunikasi yang baik tersebut maka para aktor yang terlibat serta sasaran dari program ini mengerti dan paham tentang program ini. Sosialisasi yang dilakukan tersebut juga memberikan kejelasan tentang pelaksanaan program ini, jadi terhindar dari unsur komunikasi yang simpang siur. Sosialisasi dan komunikasi yang di lakukan oleh PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya Area Ciracas sangat mendukung keberhasilan program ini, diharapkan dengan sosialisasi yang baik makan tujuan dari program ini dapat tercapai.

e. Proses Tahapan Implementasi Program

Dalam implementasi program ini ada beberapa proses yang harus diterapkan agar implementasi program Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) Beji Lintar dapat berjalan dengan baik. Dalam penelitian ini berdasarkan pernyataan dari Manajer PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya Area Ciracas bahwa dalam implementasi program Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) Beji Lintar di PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya Area Ciracas dibutuhkan beberapa tahapan proses antara lain menjalin kordinasi antara aktor pelaksana program untuk menentukan lokasi-lokasi yang akan dipasang Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) Beji Lintar dan melakukan pemasangan Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) Beji Lintar. Adapun kordinasi antara aktor pelaksana program yang dimaksud yaitu untuk menentukan lokasi-lokasi mana yang akan dipasang Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) Beji Lintar, biasanya kordinasi tersebut dilakukan dengan pihak Kecamatan dan Kelurahan. Kordinasi tersebut dilakukan agar PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya Area Ciracas mendapatkan ijin untuk melakukan pemasangan Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) Beji Lintar dari pihak Kecamatan dan Kelurahan, agar dikemudian hari tidak terjadi permasalahan tentang ijin penggunaan fasilitas umum.

Tahapan yang kedua adalah ketersediaan sumber daya pendukung seperti sumber daya manusia dan sumber daya finansial. Selanjutnya terakhir sosialisasi dan komunikasi dengan masyarakat agar masyarakat

mengetahui manfaat dari program ini serta tujuannya, dan untuk mengetahui bagaimana respon masyarakat mengenai program ini.

Menurut Jones (1994: 166) dalam Nursalam (2010), dimana implementasi merupakan proses yang memerlukan tindakan-tindakan sistematis yang terdiri dari interpretasi, organisasi dan aplikasi. Interpretasi berlaku dari para pelaksana kebijakan harus mengetahui dengan baik mengenai substansi kebijakan, makna kebijakan, dan tujuan kebijakan. Kemudian organisasi berupa penghimpunan sumber daya dan pengelolaan sumber daya tersebut. Tujuan organisasi adalah menjalankan program-program yang telah dirancang. Dan pada tahapan aplikasi diharapkan akan muncul respon dari kelompok sasaran. Dalam tahapan implementasi program Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) Beji Lintar di PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya Area Ciracas tahapan pokok proses implementasi diperlukan dalam pelaksanaan program guna untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan. Dalam hal ini berjalannya program Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) Beji Lintar diharapkan mampu bekerjasama dengan berbagai pihak, baik dari pihak internal perusahaan maupun eksternal perusahaan. Serta keahlian dan kehandalan sumber daya manusia dari berbagai pihak yang terlibat dalam implementasi program ini, dan kemampuan pihak internal dari PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya Area Ciracas untuk mencapai tujuan dan manfaat dari program agar mendapatkan respon yang baik dari masyarakat untuk menggunakan program ini.

Berdasarkan hasil wawancara dilapangan bahwa tahapan proses implementasi program Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) Beji Lintar sudah berjalan dengan baik dan telah sesuai dengan apa yang di buat oleh PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya Area Ciracas. Dimana terjadi komunikasi dan kordinasi yang baik antara PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya Area Ciracas dengan aktor-aktor lain yang terlibat, tujuan dari implementasi program Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) Beji Lintar pun sangat realistis dimana masyarakat dilarang untuk melakukan pencurian tenaga listrik di tempat-tempat umum. Hal tersebut setidaknya mampu menggurangi susut (*losses*) non teknis distribusi yang berdampak terhadap kerugian perusahaan dan negara.

4.3.2 Faktor Penghambat dan Pendukung dari Implementasi Program Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) Beji Lintar di PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya Area Ciracas

a. Faktor Pendukung

Dalam implementasi program Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) Beji Lintar tidak dapat terlepas dari adanya faktor pendukung serta faktor penghambat. Dalam hal ini Anderson dalam Islamy (2009: 108-110) memaparkan beberapa faktor pendukung antara lain yaitu yang pertama respek anggota masyarakat terhadap otoritas dan keputusan-keputusan badan pemerintah, yang kedua yaitu adanya kesadaran untuk menerima kebijakan, yang ketiga yaitu adanya keyakinan bahwa kebijakan itu dibuat secara sah, konstitusional dan dibuat oleh pejabat pemerintah yang

berwenang melalui prosedur yang telah ditetapkan, yang keempat yaitu sikap menerima dan melaksanakan kebijakan publik karena kebijakan-kebijakan kontroversional yang lebih banyak mendapatkan penolakan warga masyarakat dalam pengimplementasiannya.

Sedangkan faktor pendukung dari implementasi program Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) Beji Lintar sendiri yaitu adanya dukungan sumber daya manusia yang profesional sehingga dapat menentukan kesuksesan pencapaian dari tujuan program tersebut. Tujuan utama dari program Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) Beji Lintar yaitu untuk meningkatkan penjualan tenaga listrik dan turunnya *losses* distribusi karena pemakaian listrik di tempat-tempat umum yang selama ini tidak terukur, beresiko tinggi dan tidak termonitor bisa dikendalikan dengan efektif melalui Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) Beji Lintar ini. Menurut Asisten Manajer Transaksi Energi di PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya Area Ciracas ketersediaan sumber daya manusia pada pelaksanaan program ini sudah baik mas, meskipun sebenarnya sumber daya manusia tidak terlepas dari pihak internal perusahaan dan pihak eksternal perusahaan, tetapi setidaknya PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya Area Ciracas dibantu oleh Vendor dalam pelaksanaan program ini, sehingga target yang sudah direncanakan dapat tercapai. Dengan adanya sumber daya manusia yang sudah memadai tersebut implementasi program ini dapat berjalan baik dan pada akhirnya susut (*losses*) non teknis distribusi dapat

menurun serta tujuan dari program Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) Beji Lintar dapat tercapai.

Selanjutnya faktor pendukung yang kedua adalah adanya pembagian tugas-tugas dan kewajiban yang memadai dalam pelaksanaan program. Aktor-aktor yang terlibat dalam implementasi program Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) Beji Lintar terbilang cukup banyak, banyaknya aktor tersebut tidak membuat masing-masing aktor berjalan sendiri-sendiri tetapi justru para aktor tersebut saling bersinergitas dalam mendukung keberhasilan implementasi program Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) Beji Lintar. Sinergitas tersebut bisa berjalan karena adanya pembagian tugas-tugas dan kewajiban yang memadai dalam pelaksanaan program ini. Menurut Manajer PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya Area Ciracas, bawa pada saat PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya Area Ciracas melakukan kordinasi dengan aktor-aktor yang terlibat, PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya Area Ciracas juga melakukan pembagian tugas dan kewajiban dengan pihak-pihak yang terlibat. Jadi sebelum program ini dilaksanakan, PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya Area Ciracas sudah menentukan pembagian tugas dan kewajiban tersebut. Pembagian tugas tersebut sudah mulai dibagi dari aktor internal PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya Area Ciracas yaitu bidang niaga, transaksi energi, konstruksi, dan perencanaan. Kemudian juga di lakukan pada aktor eksternal PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya Area Ciracas

yaitu Vendor (PT Tangguh Jaya dan PT Tri Tunggal), Gubernur DKI Jakarta, Walikota Jakarta Timur, Kecamatan dan Kelurahan.

Kemudian faktor pendukung yang terakhir adalah adanya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam program ini. Bahwa sebenarnya kesadaran masyarakat sangatlah diperlukan dalam pelaksanaan program, karena tanpa adanya kesadaran dari masyarakat terhadap pentingnya implementasi ini, program Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) Beji Lintar tidak dapat berjalan dengan maksimal. Seperti yang diungkapkan oleh Asisten Manajer Transaksi Energi PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya Area Ciracas bahwa kesadaran masyarakat sudah memiliki tingkat kesadaran yang bagus. Selama program ini berjalan, lokasi-lokasi yang sudah disediakan Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) Beji Lintar banyak digunakan oleh masyarakat. Banyaknya masyarakat yang menggunakan program ini juga mencerminkan tingginya kesadaran masyarakat.

Dari hasil penelitian menunjukan bahwa ketiga faktor pendukung program Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) Beji Lintar sangat mempengaruhi keberhasilan program tersebut di PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya Area Ciracas. Hal tersebut memudahkan terwujudnya tujuan dari implementasi program Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) Beji Lintar di PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya Area Ciracas.

b. Faktor Penghambat

Faktor penghambat merupakan salah satu penghalang berjalannya suatu implementasi program. Dalam hal ini Soenarko (2000: 185) menyebutkan beberapa faktor penghambat yaitu yang pertama teori yang menjadi dasar kebijakan itu tidak tepat, karenanya harus dilakukan *reformulation* terhadap kebijakan tersebut. Yang kedua sarana yang dipilih untuk pelaksanaan tidak efektif. Yang ketiga sarana itu mungkin tidak tau bahkan kurang dipergunakan sebagaimana mestinya. Yang keempat isi dari kebijakan itu bersifat samar-samar. Yang kelima ketidakpastian faktor internal dan eksternal. Yang keenam kebijakan yang ditetapkan itu mengandung banyak lubang, dalam pelaksanaan kurang memperhatikan masalah-masalah teknis. Yang terakhir adanya kekurangan atau tersedianya sumber-sumber pembantu (waktu, uang, dan sumber daya manusia).

Faktor penghambat dari implementasi program Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) Beji Lintar di PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya Area Ciracas ini salah satunya adalah pengaruh cuaca pada saat pemasangan. Dari keterangan Asisten Manajer Transaksi Energi di PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya Area Ciracas, bahwa PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya Area Ciracas agak kesulitan pada saat melakukan pemasangan tipe *standing* waktu musim hujan. Hal itu disebabkan karena pada tipe *standing* PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya Area Ciracas harus membuat pondasi dulu yang unsurnya dari batu bata dan semen, pondasi tersebut harus dibuat agar Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU)

Beji Lintar tipe *standing* bisa berdiri kokoh. Tetapi kalau cuacanya tidak menentukan apalagi kalau musim hujan, itu sangat mengganggu pekerjaan PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya Area Ciracas.

Selanjutnya penentuan lokasi Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) Beji Lintar juga menjadi salah satu faktor penghambat dari implementasi program ini setelah faktor cuaca. Berikut keterangan dari Supervisor Pemasaran & Pelayanan Pelanggan di PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya Area Ciracas bahwa biasanya tim dari PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya Area Ciracas sudah memberi tahu pihak kecamatan dan kelurahan mengenai titik-titik yang rawan pencurian listrik, namun sangat disayangkan pada titik-titik tersebut Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) Beji Lintar tidak bisa disedikan. Biasanya hal itu disebabkan karena tidak adanya lahan yang bisa menampung tipe *standing* dan biasanya untuk tipe *hook* jarak antara titik yang telah ditentukan jauh dengan tiang listrik, sehingga kalo dipasang nanti akan kurang tepat sasaran.

Sedangkan menurut Supervisor Pemasaran & Pelayanan Pelanggan di PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya Area Ciracas bahwa tidak bisa dipungkiri kalo di daerah Jakarta masih banyak kelompok-kelompok yg menguasai suatu wilayah, biasanya kan para pedagang kaki lima mendapatkan sumber listrik dari mereka dengan sistem setoran. Dengan adanya program ini biasanya ada sedikit penolakan karena mereka tidak mendapatkan setoran lagi dari uang listrik. Tetapi pihak PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya Area Ciracas mencoba melakukan negosiasi agar

Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) Beji Lintar bisa tetap dipasang, yaitu dengan cara preman tersebut di rangkul sebagai pihak yang mengelola, tidak apa-apa dikelola preman yang penting para pedagang kaki lima dan masyaraka pada umumnya mengambil listrik dari Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) Beji Lintar milik PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya Area Ciracas.

Berdasarkan hasil analisa peneliti dilapang dan hasil wawancara yang ada maka dapat disimpulkan bahwa penentuan lokasi Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) Beji Lintar merupakan salah satu faktor penghambat dalam implementasi program ini, hal tersebut disebabkan karena tidak adanya lokasi yang tepat untuk pemasangan Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) Beji Lintar disuatu titik dan masih adanya preman yang menguasai suatu daerah menjadi faktor penghambat dalam implementasi program ini. Adanya faktor penghambat tersebut menyebabkan program ini menjadi tidak berjalan maksimal.

BAB V

PENUTUP

5.1 **Kesimpulan**

Dari penelitian yang telah dilakukan mengenai implementasi program Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) Beji Lintar di PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya Area Ciracas, maka kesimpulan dan saran dari peneliti adalah sebagai berikut:

1. Aktor yang terlibat dalam implementasi program Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) Beji Lintar terdiri dari internal dan eksternal PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya Area Ciracas. Aktor internal terdiri dari Bidang Niaga, Konstruksi, Transaksi Energi dan Perencanaan. Sedangkan aktor eksternal terdiri dari Vendor (PT Tangguh Jaya dan PT Tri Tunggal), Gubernur DKI Jakarta, Walikota Jakarta Timur, Kelurahan dan Kecamatan. Dimana masing-masing aktor memiliki peranan yag penting dalam implementasi program tersebut.
2. Program Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) Beji Lintar di PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya Area Ciracas memiliki beberapa tujuan yang diharapkan dapat tercapai, yaitu seluruh pedagang kaki lima dan masyarakat pada umumnya tidak melakukan pencurian listrik sehingga dapat mengurangi susut (*losses*) non teknis pada PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya Area Ciracas dan tersedianya sumber energi listrik di tempat-tempat umum.

3. Berdasarkan data yang diketahui sumber daya manusia yang profesional di PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya Area Ciracas cukup membantu pelaksanaan implementasi program Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) Beji Lintar. Banyaknya aktor-aktor yang telibat dalam implementasi program Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) Beji Lintar juga sangat membantu.
4. Sosialisasi yang dilaksanakan mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Banyaknya media yang digunakan untuk sosialisasi menyebabkan keberhasilan sosialisasi tersebut.
5. Dalam hal ini pedagang kaki lima dan masyarakat pada umumnya di wilayah kerja PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya Area Ciracas sangat mendukung adanya program Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) Beji Lintar. Hal ini menunjukan bahwa program Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) Beji Lintar berjalan dengan baik serta peran aktif masyarakat yang mendukung.

Dalam implementasi program Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) Beji Lintar tidak dapat terlepas dari adanya faktor pendukung dan faktor penghambat. Dalam hal ini faktor pendukung dan faktor penghambat implementasi program Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) Beji Lintar adalah:

1. Faktor pendukung program tersebut yaitu adanya dukungan sumber daya manusia yang profesional, selanjutnya faktor pendukung yang kedua adalah adanya pembagian tugas-tugas dan kewajiban yang memadai dalam pelaksanaan program. Kemudian faktor pendukung yang lainnya

adalah adanya kesadaran masyarakat untuk ikut berpartisipasi terhadap program ini.

2. Berikutnya merupakan faktor penghambat dari implementasi program Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) Beji Lintar antara lain pengaruh cuaca pada saat pemasangan dan penentuan lokasi Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) Beji Lintar.

5.2 **Saran**

1. Seharusnya pemasangan Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) Beji Lintar lebih terjadwal. Agar permasalahan cuaca yang menjadi penghambat pada saat pemasangan tidak terjadi lagi.
2. Adanya dua tipe Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) Beji Lintar seharunya bisa dijadikan pilihan pada saat pemasangan musim hujan.
3. Seharusnya sebelum melakukan pemasangan Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) Beji Lintar dilakukan survey yang mendalam terlebih dahulu, supaya lokasi yang dipilih sebagai tempat pemasangan benar-benar layak.
4. Seharunya pada saat menentukan lokasi Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) Beji Lintar melibatkan penegak hukum seperti kepolisian, agar tidak terjadi penolakan dari preman-preman yang menguasai suatu daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Abdullah, Syukur. 1998. *Laporan Temu Kajian Posisi dan Peran Ilmu Administrasi Negara dan Manajemen*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia dan Asia Foundation.

Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.

Abdul, Wahab Solichin. 2008. *Analisis Kebijaksanaan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara, Edisi Kedua*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Agustino, Leo. 2012. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

Dunn, Wiliam N. 1999. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Dewi, Rahayu K. 2016. *Studi Analisis Kebijakan*. Bandung: CV Pustaka Setia.

Fontana, Avanti, dan Zainal Arifin. 2016. *19 Tahun Inovasi Ketenagalistrikan Indonesia*. Jakarta: PLN Research Institute.

Grindle, Merille S. 1980. *Politics and Policy Implementation in The Third World*. New Jersey: Princeton University Press.

Islamy, Irfan M. 2009. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.

Indradi, Sjamsiar S. 2010. *Dasar-Dasar & Teori Administrasi Publik*. Malang: Agritek YPN Malang.

Jones, Charles O. 1991. *Pengantar Kebijakan Publik (Penerjemah Ricky Istamto)*. Jakarta: Rajawali.

Luankali, Bernadus. 2007. *Analisis Kebijakan Publik Dalam Proses Pengambilan Keputusan*. Bandung: Amelia Press.

Manila, IGK. 1996. *Praktek Manajemen Pemerintahan Dalam Negeri*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Moleong, J. Lexy. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Nazir, Moh. 2003. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Nugroho, Riant. 2009. *Public Policy*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

Nursalam. 2010. Implementasi Kebijakan Peningkatan Produksi Tanaman Pangan Lokal dan Ketahanan Pangan di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Jurnal Administrasi Publik, Volume 1 No. 1. Fisip Undana Kupang.

Parsons, Wayne. 2008. *Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*. Jakarta: Kencana.

Pasolong, Harbani. 2011. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.

Pasolong, Harbani. 2012. *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.

Siagian, Sondang P. 1985. *Administrasi Pembangunan*. Jakarta: Bumi Aksara.

Soenarko. 2000. *Public Policy, Pengertian Pokok untuk Memahami dan Analisa Kebijaksanaan Pemerintahan*. Surabaya: Airlangga University Press.

Suharto, Edi. 2009. *Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*. Bandung: Alfabeta.

Syafri, Wirman. 2012. *Studi tentang Administrasi Publik*. Jakarta: Erlangga.

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sinambela, Lijan Poltak. 2014. *Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan, dan Implementasi*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Sjamsuddin, Sjamsiar. 2014. *Hukum Administrasi Negara*. Malang: UB Press Staf.

Situmorang, Chazali H. 2016. *Kebijakan Publik (Teori Analisis, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan)*. Depok: SSDI.

Tachjan, H. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI.

Wibawa, Samodra. 1994. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Intermedia.

Widodo, Joko. 2010. *Analisis Kebijakan Publik, Konsep dan Aplikasi Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Bayu Media.

Wahab, Solichin Abdul. 2012. *Analisis Kebijakan dari Formulasi Ke Penyusanan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Winarno, Budi. 2016. *Kebijakan Publik Era Globalisasi: Teori, Proses, dan Studi Kasus Komparatif*. Yogyakarta: Center Of Academic Publishing Service (CAPS).

Zauhar, Soesilo. 1992. *Pengantar Ilmu Administasi Negara*. Malang: PPIIS Unibraw.

Dokumen:

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (Persero).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 45 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (Persero).

Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor: 0017.P/DIR/2015 tentang Program Peningkatan dan Pengendalian Penjualan Tenaga Listrik.

Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor: 0140.P/DIR/2016 tentang Formasi Jabatan Unit Pelaksana Area Pada PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya.

Rini Lestari, Eka, 2015. Implementasi Kebijakan Otonomi Desa Di Desa Pilanjau Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau. eJournal Administrasi Negara Volume 3, No.2, 2015:466-497.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 431/KMK.06/2002 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pembayaran Subsidi Listrik.

Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: KEP-117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktek Good Corporate Governance dalam Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 63/KEP.M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 5899 K/20/MEM/2016 tentang Pengesahan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) Tahun 2016 s/d 2025.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Pedoman Wawancara

- Implementasi Program Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) Beji Lintar di PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya Area Ciracas.

1. Aktor dan Pelaku dalam Implementasi Program Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) Beji Lintar.
   - Siapa saja aktor yang terlibat dalam program ini?
   - Apa peran dari masing-masing aktor yang terlibat?
   - Bagaimana kordinasi yang dilakukan antara aktor yang terlibat?
   - Bagaimana wewenang masing-masing aktor yang terlibat?
   - Kenapa aktor-aktor tersebut terlibat dalam program ini?
2. Tujuan dan Sasaran Program
   - Apa tujuan dari program Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) Beji Lintar?
   - Siapa sasaran dari program Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) Beji Lintar?
   - Apa dampak dari tujuan program Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) Beji Lintar?
   - Apa dampak dari sasaran program Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) Beji Lintar?
   - Mengapa ditetapkan tujuan tersebut?
   - Mengapa ditetapkan sasaran tersebut?
   - Bagaimana cara mencapai tujuan tersebut?

- Bagaimana cara mencapai sasaran tersebut?

3. Sumber daya
    - Apa saja sumber daya yang tersedia?
    - Apakah sumber daya yang tersedia dapat mencukupi?
    - Darimana sumber daya tersebut berasal?
    - Bagaimana peran dari sumber daya tersebut?
    - Mengapa sumber daya tersebut dibutuhkan?
    - Darikapan sumber daya tersebut mulai dibutuhkan?
4. Sosialisasi program
    - Bagaimana sosialisasi program ini?
    - Siapa yang melakukan sosialisasi pada program ini?
    - Kapan sosialisasi mulai dilakukan?
    - Sampai kapan sosialisasi dilakukan?
    - Mengapa sosialisasi harus dilakukan?
5. Proses Tahapan Implementasi Program
    - Apa saja tahapan dalam implementasi program?
    - Bagaimana proses tahapan implementasi ini?
    - Kapan tahapan implementasi program tersebut mulai dilakukan?
    - Siapa yang terlibat dalam tahapan implementasi program?
    - Mengapa harus ada tahapan pada implementasi program ini?

- Faktor Penghambat dan Pendukung dari Implementasi Program Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) Beji Lintar di PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya Area Ciracas.

1. Faktor Pendukung
    - Apa faktor pendukung pada program ini?
    - Bagaimana faktor pendukung pada program ini?
    - Darimana saja asal faktor pendukung program ini?
    - Mengapa faktor pendukung tersebut dibutuhkan?
    - Siapa yang terlibat dalam faktor pendukung?
2. Faktor Penghambat
    - Apa faktor penghambat pada program ini?
    - Bagaimana faktor penghambat pada program ini?
    - Darimana saja asal faktor penghambat program ini?
    - Mengapa faktor penghambat tersebut dibutuhkan?
    - Siapa yang terlibat dalam faktor penghambat?

Lampiran 2. Surat Keterangan Telah Melakukan Riset

PT PLN (Persero)
DISTRIBUSI JAKARTA RAYA
AREA CIRACAS

Jalan Raya CENTEX No. 1 - Jakarta Timur 13740

Telepon : (021) 8726605 - 8726606 Kotak Pos : 13740 Facsimile : (021) 8726604 E-mail : ciracas@pln.co.id Website : www.pln.co.id

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN RISET

Nomor: 0002.Kt/SDM.04.06/A.CRS/2016

Yang bertanda tangan di bawah ini Manajer PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya Area Ciracas. Menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama	: Giovedi Wibisanna
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Tempat/Tanggal Lahir	: Jakarta, 14 September 1995
NIM	: 135030107113010
Jurusan	: Ilmu Administrasi Publik
Universitas	: Brawijaya
Judul Skripsi	: Implementasi Program Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) Beji Lintar (Studi Pada PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya Area Ciracas)

Menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di atas benar-benar telah melakukan penelitian di PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya Area Ciracas pada tanggal 19 September – 19 Desember 2016 dan berperilaku baik sesuai aturan yang berlaku.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta,19 Desember 2016
MANAJER

PT PLN DISTRIBUSI JAKARTA RAYA AREA CIRACAS (Persero)

SASLIZAR

Lampiran 3. Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor: 0017.P/DIR/2015

PT PLN (Persero)
DISTRIBUSI JAKARTA RAYA DAN TANGERANG

JALAN MOHAMMAD IKHWAN RIDWAN RAIS NO. 1 - JAKARTA PUSAT 10110
Telp. : (021) 3454000 – 3455000 Kotak Pos : 1141 http: www.

Nomor : 1752 /AGA.01.01/DISJAYA/2015 16 September 2015
Surat Sdr No : -
Lampiran : 1 (satu) berkas
Sifat : Segera
Perihal : Program Peningkatan dan Pengendalian Penjualan Listrik

Kepada
PT PLN (Persero)
Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang
Seluruh Area

u.p. Yth. Manajer Area,

Bersama ini kami sampaikan Peraturan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor : 0017.P/DIR/2015 tanggal 28 Agustus 2015 tentang Program Peningkatan Dan Pengendalian Penjualan Tenaga Listrik yang berlaku sejak tanggal ditetapkan, untuk dapat dipergunakan sebagai pedoman pelaksanaan pekerjaan.

Demikian disampaikan dan kami ucapkan terima kasih.

MANAGER NIAGA DAN PELAYANAN PELANGGAN
DISTRIBUSI JAKARTA RAYA DAN TANGERANG
MOH.MUNIEF BUDIMAN

PT PLN (PERSERO)

PERATURAN DIREKSI PT PLN (PERSERO)

NOMOR : 0017 .P/DIR/2015

TENTANG

PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGENDALIAN PENJUALAN TENAGA LISTRIK

DIREKSI PT PLN (PERSERO)

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka menjalankan misi PT PLN (Persero) sebagai pendorong kegiatan ekonomi, maka dipandang perlu mendorong peningkatan penjualan tenaga listrik di daerah-daerah yang mampu menambah penjualan tenaga listrik;

b. bahwa pada kenyataannya ada daerah-daerah yang kemampuan penyediaan tenaga listriknya terbatas, maka dipandang perlu mengendalikan penjualan tenaga listrik;

c. bahwa masih terdapat golongan tarif yang penjualan tenaga listriknya perlu dikendalikan untuk menekan peningkatan nilai subsidi, yaitu golongan tarif yang belum mencapai nilai keekonomian dan belum mengikuti mekanisme *tariff adjustment*;

d. bahwa untuk mendukung upaya peningkatan penjualan dan pengendalian tenaga listrik pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c di atas, perlu ditetapkan program untuk meningkatkan dan mengendalikan penjualan tenaga listrik;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf d di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Direksi PT PLN (Persero) tentang Program Peningkatan dan Pengendalian Penjualan Tenaga Listrik.

Mengingat :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero);
5. Anggaran Dasar PT PLN (Persero);
6. Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 023.K/DIR/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja PT PLN (Persero) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 273.K/DIR/2013 dan Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0443.K/DIR2013.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKSI PT PLN (PERSERO) TENTANG PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGENDALIAN PENJUALAN TENAGA LISTRIK.

BAB I...

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. PLN adalah Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara yang didirikan dengan Akta Notaris Sutjipto SH, Nomor 169 tanggal 30 Juli 1994 yang telah dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 6731 Tahun 1994 Tambahan Nomor 73.
2. Unit PLN adalah Unit Organisasi di bawah PLN Kantor Pusat yang mempunyai tugas pengusahaan tenaga listrik meliputi Unit Induk yaitu PLN Wilayah dan PLN Distribusi, Unit Pelaksana adalah PLN Area dan Sub Unit Pelaksana yaitu PLN Rayon.
3. General Manager selanjutnya disebut GM adalah sebutan pemangku jabatan struktural yang memiliki kewenangan dan sebagai penanggung jawab Unit Induk dalam hal ini GM PLN Distribusi dan GM PLN Wilayah.
4. Manajer Unit adalah sebutan pemangku jabatan struktural yang memiliki kewenangan dan sebagai penanggung jawab Unit Pelaksana dalam hal ini Manajer Area dan Sub Unit Pelaksana dalam hal ini Manajer Rayon.
5. Konsumen adalah setiap orang atau badan usaha atau badan/lembaga lainnya yang memakai tenaga listrik dari instalasi PLN berdasarkan alas hak yang sah baik yang menggunakan sistem reguler maupun sistem prabayar.
6. Konsumen Reguler adalah setiap orang atau badan usaha atau badan/lembaga lainnya yang memakai tenaga listrik dari instalasi PLN berdasarkan alas hak yang sah yang melunasi pembayaran tagihan listrik setiap bulan setelah pemakaian tenaga listrik.
7. Konsumen Prabayar adalah setiap orang atau badan usaha atau badan/lembaga lainnya yang memakai tenaga listrik dari instalasi PLN berdasarkan alas hak yang sah yang melunasi pembayaran tagihan listrik sebelum pemakaian tenaga listrik.
8. Identitas Pelanggan (Konsumen) selanjutnya disebut IDPEL adalah kumpulan angka yang merupakan identitas Konsumen yang membedakan antara satu Konsumen dengan Konsumen lainnya.
9. Penyambungan Baru selanjutnya disebut PB adalah proses pengajuan pasang baru listrik oleh Calon Konsumen mulai pendaftaran sampai dengan penyambungan listrik di Konsumen.
10. Tambah Daya selanjutnya disebut TD adalah proses pengajuan tambah daya listrik oleh Konsumen mulai pendaftaran sampai dengan Konsumen memperoleh daya baru yang diajukan.
11. Penyambungan Sementara selanjutnya disebut PS adalah penyambungan tenaga listrik untuk kepentingan yang bersifat sementara.
12. Perjanjian Kerjasama selanjutnya disebut PKS adalah suatu kesepakatan antara Direksi PLN dengan Konsumen dalam rangka jual beli tenaga listrik yang selanjutnya dituangkan dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik.
13. Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik selanjutnya disebut PJBTL adalah hubungan hukum antara Unit PLN dengan Konsumen yang merupakan alas hak yang sah dalam jual beli tenaga listrik.
14. Daya Tersambung adalah daya yang disepakati antara PLN dengan Konsumen yang dituangkan dalam PJBTL.
15. Biaya Penyambungan selanjutnya disebut BP adalah biaya yang dibayar oleh Konsumen/Calon Konsumen ketika mengajukan penyambungan baru dan/atau penambahan daya.
16. BP Standar adalah biaya yang dibayar oleh Konsumen/Calon Konsumen ketika mengajukan penyambungan baru dan/atau penambahan daya, yang besarnya sesuai dengan tarif yang ditetapkan dalam peraturan yang berlaku.
17. BP Rencana Anggaran Biaya selanjutnya disebut BP RAB adalah biaya yang dibayar oleh Konsumen/Calon Konsumen ketika mengajukan penyambungan baru dan/atau penambahan daya, yang besarnya sesuai dengan rencana anggaran biaya mengacu kepada harga satuan yang ditetapkan PLN.
18. Jaminan Langganan (JL) adalah jaminan berupa uang atau bank garansi yang dikeluarkan oleh perbankan nasional atas pemakaian daya dan energi listrik selama menjadi Konsumen.
19. Piutang Ragu-ragu (PRR) adalah piutang Konsumen yang tidak dilunasi dan sukar ditagih atau diragukan pembayarannya serta telah dilaksanakan pemutusan rampung sambungan tenaga listrik.

20. Data...

20. Data Induk Langganan selanjutnya disebut DIL adalah sekumpulan data induk Konsumen yang memuat histori transaksi jual beli tenaga listrik.
21. Komponen C adalah komponen biaya energi primer untuk memproduksi tenaga listrik termasuk minyak pelumas, zat kimia apabila diperlukan.
21. Tegangan Tinggi (TT) adalah tegangan sistem di atas 35.000 Volt sampai dengan 245.000 Volt.
22. Tegangan Menengah (TM) adalah tegangan sistem di atas 1.000 Volt sampai dengan 35.000 Volt.
23. Tegangan Rendah (TR) adalah tegangan sistem sampai dengan 1.000 Volt.
24. Sambungan Rumah (SR) adalah jaringan/instalasi antara jaringan distribusi tenaga listrik sampai dengan rel pembatas dan pengukur.
25. Alat Pembatas dan Alat Pengukur yang selanjutnya disebut APP adalah alat milik PLN yang dipakai untuk membatasi daya listrik dan mengukur energi listrik baik sistem reguler maupun sistem prabayar.
26. Alat Pembatas adalah alat milik PLN untuk membatasi daya listrik yang digunakan Konsumen sesuai dengan PJBTL antara PLN dengan Konsumen.
27. Alat Pengukur adalah alat milik PLN berupa peralatan elektromekanik maupun elektronik untuk untuk mengukur energi listrik yang dipakai Konsumen.
28. Pekerjaan Dalam Keadaan Bertegangan (PDKB) adalah pekerjaan pengoperasian dan pemeliharaan jaringan listrik dalam keadaan bertegangan.
29. Pelayanan Teknik selanjutnya disebut Yantek adalah unit pemeliharaan dan pelayanan gangguan yang dikontrakkan kepada pihak ketiga.
30. *Total Maintenance Contract* (TMC) adalah pekerjaan pemeliharaan yang dikontrakkan kepada pihak ketiga.

Pasal 2

Maksud dan Tujuan

(1) Maksud ditetapkannya Peraturan ini adalah sebagai pedoman dalam program peningkatan dan pengendalian penjualan tenaga listrik.

(2) Tujuan ditetapkannya Peraturan ini adalah untuk keseragaman dalam melaksanakan program peningkatan dan pengendalian penjualan tenaga listrik.

Pasal 3

Ruang Lingkup

Ruang lingkup Peraturan ini meliputi:

1. Kriteria Peningkatan Penjualan Tenaga Listrik.
2. Kriteria Pengendalian Penjualan Tenaga Listrik.

BAB II

PENINGKATAN PENJUALAN TENAGA LISTRIK

Bagian Kesatu

Kriteria Peningkatan Penjualan Tenaga Listrik

Pasal 4

Kriteria daerah yang penjualan tenaga listriknya didorong untuk ditingkatkan sebagai berikut:

1. Daerah dengan kemampuan pembangkitan memenuhi kriteria (n-1) atau daerah yang akan memenuhi kriteria (n-1) karena mendapat tambahan pasokan dari pembangkit non-BBM yang akan beroperasi kurang dari 1 (satu) tahun ke depan;

2. Daerah...

2. Daerah dengan pembebanan trafo tenaga belum mencapai rata-rata 80% (delapan puluh persen), dan
3. Dalam hal penambahan penjualan tenaga listrik ada golongan tarif dengan harga jual lebih tinggi dari biaya energi primer untuk memproduksi tenaga listrik (komponen C).

Bagian Kedua

Penyambungan Baru (PB) dan Tambah Daya (TD)

Pasal 5

(1) Pada prinsipnya PB/TD 1 (satu) persil hanya boleh dilayani dengan 1 (satu) IDPEL. Dalam hal terdapat kendala ketersediaan lahan gardu, atau Konsumen memerlukan pengaturan pemanfaatan bangunan, maka Unit PLN dapat melayani PB/TD pada 1 (satu) persil dengan lebih dari 1 (satu) IDPEL, dengan persyaratan sebagai berikut:

1. Konsumen/Calon Konsumen kesulitan menyediakan lahan gardu, maka:
   a. Unit PLN dapat membangun gardu dengan ukuran lahan yang tidak sesuai dengan standar PLN karena keterbatasan luas lahan yang disediakan oleh Konsumen/Calon Konsumen sepanjang memenuhi persyaratan keselamatan teknis, atau Unit PLN tidak dapat membangun gardu karena Konsumen/Calon Konsumen sama sekali tidak dapat menyediakan lahan untuk gardu, maka Konsumen/Calon Konsumen dapat dilayani lebih dari 1 (satu) IDPEL dalam 1 (satu) persil.
   b. Permohonan PB/TD golongan tarif Industri dengan Daya Tersambung 30 MVA atau lebih besar dalam hal Konsumen/Calon Konsumen meminta dilayani dengan Tegangan Menengah, maka dapat dilayani melalui Tegangan Menengah dengan lebih dari 1 (satu) IDPEL, dengan ketentuan masing-masing IDPEL maksimal daya 30 MVA dan menggunakan Tarif I-3/TM.
   c. Permohonan PB/TD golongan tarif Bisnis dan Pemerintah dengan Daya Tersambung di atas 200 kVA dalam hal Konsumen meminta dilayani dengan Tegangan Rendah, maka dapat dilayani melalui Tegangan Rendah dengan lebih dari 1 (satu) IDPEL, dengan ketentuan masing-masing IDPEL maksimal daya 200 kVA dan menggunakan Tarif B-2 atau P-1.
   d. Permohonan PB/TD golongan tarif Industri dengan Daya Tersambung di atas 200 kVA dalam hal Konsumen meminta dilayani dengan Tegangan Rendah, maka dapat dilayani melalui Tegangan Rendah dengan lebih dari 1 (satu) IDPEL, dengan ketentuan masing-masing IDPEL maksimal daya 200 kVA dan menggunakan Tarif Layanan Khusus.
2. Dalam hal Konsumen memerlukan pengaturan pemanfaatan bangunan, dimungkinkan melayani lebih dari 1 (satu) IDPEL dalam 1 (satu) persil dengan persyaratan peruntukan listriknya berbeda dan/atau pemiliknya berbeda.
3. Instalasi antara 1 (satu) IDPEL dengan IDPEL lainnya harus terpisah dan tidak dapat saling pasok.
4. Dalam hal salah satu IDPEL yang dimaksud pada angka 1 dan angka 2 mengalami pemutusan sementara/bongkar rampung karena menunggak pembayaran tagihan listrik atau Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) atau saling pasok diantara IDPEL dalam 1 (satu) persil/bangunan, maka IDPEL lainnya harus dalam keadaan diputus sementara, dimana ketentuan ini harus diperjanjikan dan disepakati oleh Konsumen dalam PJBTL yang mengajukan permintaan 2 (dua) pasokan/lebih dengan 2 (dua) IDPEL/lebih di dalam 1 (satu) persil.

(2) Permohonan PB/TD yang memerlukan investasi trafo dan jaringan atau jaraknya relatif jauh dari jaringan yang memerlukan investasi pembangunan jaringan listrik melebihi nilai BP yang dibayar Konsumen, di mana pembangunan jaringan tersebut berpotensi menumbuhkan pasar pemanfaatan listrik, maka Unit PLN atas persetujuan GM dapat melayani permohonan PB/TD dengan nilai investasi sesuai kewenangan GM yang berlaku.

(3) Konsumen/Calon Konsumen yang mengalami kendala biaya saat mengajukan PB/TD karena besarnya beban BP dan/atau JL, maka GM dapat:

1. Menyetujui PB dengan pembayaran BP dan JL dalam bentuk uang secara angsuran maksimum selama 24 (dua puluh empat) bulan.
2. Menyetujui TD dengan pembayaran BP dan JL dalam bentuk uang secara angsuran maksimum selama 24 (dua puluh empat) bulan hanya untuk Konsumen yang tidak pernah menunggak dalam waktu 1 (satu) tahun terakhir.

3. Memberi...

3. Memberi keringanan pembayaran BP dengan pemotongan maksimum sebesar 50% (lima puluh persen) untuk TD yang hanya memerlukan *setting relay* atau penggantian Alat Pembatas, di mana JL mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) angka 2.

(4) Konsumen/Calon Konsumen yang mengalami kendala biaya saat mengajukan pemasangan kembali eks-bongkar rampung karena pada persil yang dimohonkan pemasangan kembali ada PRR, maka GM dapat memberi keringanan pembayaran nilai PRR dengan cara angsuran maksimum 12 (dua belas) bulan pada IDPEL lama. Apabila pada persil tersebut diperlukan tambahan IDPEL baru maka PRR pada IDPEL lama wajib dilunasi terlebih dahulu.

Pasal 6

Percepatan pelayanan PB/TD dilakukan sebagai berikut:

1. Dalam hal menyediakan material tepat waktu GM diberi kewenangan untuk melakukan pengadaan sendiri dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. Untuk material penyambungan TM/TR dalam hal material pengadaan Terpusat/*Joint Procurement* belum tersedia, dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan Divisi/Unit pelaksana pengadaan terkait.
   b. Permintaan PB/TD memerlukan material yang melebihi pagu material yang diadakan secara Terpusat/*Joint Procurement*, dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan Divisi/Unit pelaksana pengadaan terkait.
2. Dalam hal layanan PB/TD/PS terkendala oleh ketersediaan material, maka Unit PLN dapat:
   a. Memasok listrik dengan *temporary material* atau peralatan *mobile* sambil menunggu selesainya pekerjaan fisik secara permanen.
   b. Masing-masing Unit PLN saling transparan atas persediaan material penyambungan di unitnya untuk pemanfaatan material penyambungan antar Unit PLN.
   c. Dapat melayani PS tidak permanen tanpa mengenakan BP RAB namun material penyambungan disediakan dan dipasang oleh pemohon PS, dan PLN hanya menyediakan APP.
   d. Dapat melayani kebutuhan listrik masa konstruksi dengan layanan reguler yang dikenakan tarif reguler apabila listrik yang digunakan akan dipakai secara permanen di lokasi yang sama.
3. Dalam memenuhi kecukupan kapasitas trafo dan/atau ketersediaan jaringan untuk mengantisipasi permintaan PB/TD yang berpotensi menumbuhkan pasar pemanfaatan tenaga listrik, GM dapat menyetujui penambahan kapasitas/pembangunan trafo distribusi dan/atau jaringan walaupun Calon Konsumen belum membayar BP.
4. Untuk mengantisipasi agar pelayanan PB/TD tidak tertunda karena proses persetujuan administrasi, maka :
   a. Manajer Area dapat memproses PJBTL untuk Konsumen Layanan Khusus (Premium) sambil menunggu persetujuan Direksi terkait penetapan tarif premium standar dengan atau tanpa PKS.
   b. Pejabat satu tingkat di bawah pejabat yang berwenang diberi kewenangan menandatangani persetujuan administrasi layanan PB/TD bila pejabat yang berwenang sedang tidak dapat menandatangani dokumen administrasi.

Bagian Ketiga
Jumlah dan Lama Gangguan

Pasal 7

(1) Untuk mengurangi terjadinya jumlah dan lama pemadaman akibat masalah koordinasi sistem proteksi, maka sistem proteksi jaringan, Gardu Induk, dan pembangkit sewa/IPP harus dipastikan dapat bekerja dengan baik.

(2) Untuk mengurangi energi yang tidak tersalurkan akibat gangguan, masing-masing Unit PLN agar mengoptimalkan regu Yantek yang *mobile* mendekati lokasi pusat beban dan secara rutin melakukan inspeksi potensi gangguan.

(3) Dalam hal Material Distribusi Utama (MDU) tipe tertentu sering mengalami gangguan dan dipandang perlu untuk tidak digunakan lagi sampai adanya hasil pengujian, maka GM dapat:
   1. Melakukan pengadaan sendiri material pengganti, khusus untuk material yang sering mengalami gangguan dengan jumlah sesuai dengan material yang mengalami gangguan.

2. Meminta...

2. Meminta bantuan PLN Pusat Penelitian dan Pengembangan Ketenagalistrikan atau konsultan independen (non profit) untuk melakukan kajian penyebab gangguan.

(4) Dalam hal penyelesaian gangguan yang bersifat darurat, Unit PLN dapat melakukan pengadaan material yang diperlukan untuk secepatnya menuntaskan perbaikan.

(5) Untuk mengurangi lama padam pada Konsumen yang diakibatkan oleh gangguan instalasi milik Konsumen, maka Unit PLN dapat memberi penjelasan kepada Konsumen untuk meminta bantuan instalatir yang kompeten dalam rangka memperbaiki gangguan instalasi milik Konsumen.

Bagian Keempat
Frekuensi dan Lama Pemeliharaan, dan Tegangan Layanan

Pasal 8

Upaya untuk mengurangi frekuensi dan lama pemeliharaan dilakukan cara:

1. Memastikan agar pemeliharaan dilakukan dengan disiplin dan rutin, maka Unit PLN dapat melakukan pemeliharaan yang disesuaikan dengan jadwal pemeliharaan Konsumen.
2. Mengoptimalkan pekerjaan dalam keadaan bertegangan oleh regu PDKB untuk pekerjaan yang dimungkinkan dikerjakan dalam keadaan bertegangan pada saat perbaikan gangguan atau pemeliharaan.
3. Pekerjaan-pekerjaan pemeliharaan yang berpotensi menyebabkan pemadaman sedapat mungkin dilakukan bersamaan.

Pasal 9

Untuk memperbaiki tegangan layanan dilakukan dengan cara:

1. Untuk memastikan bahwa penurunan tegangan pelayanan tidak lebih rendah dari 10% (sepuluh persen) tegangan TR dan tidak lebih rendah dari 5% (lima persen) tegangan TM/TT dari tegangan nominal, maka Unit PLN dapat :
   a. Melakukan pengadaan trafo khusus bila tegangan TM di bawah standar PLN diperkirakan tetap terjadi dalam waktu di atas 6 (enam) bulan.
   b. Melakukan pengadaan trafo distribusi bila pengadaan Terpusat/*Joint Procurement* terlambat atau pengadaan gagal.
   c. Memasang trafo non standar (dari sisi kapasitas daya) untuk mengatasi kesulitan lahan pemasangan trafo.
   d. Mengoptimalkan pemanfaatan kapasitor atau Automatic Voltage Regulator (AVR).
   e. Mensyaratkan Konsumen untuk memasang kapasitor di sisi Konsumen TM/TT bila beban Konsumen menyebabkan penurunan tegangan di bawah ketentuan aturan jaringan (distribution code/grid code).
2. Unit PLN wajib melakukan pengukuran beban trafo dan tegangan ujung secara rutin guna mengantisipasi pertumbuhan beban setempat.

Bagian Kelima
Kesalahan Baca Meter atau APP Rusak

Pasal 10

Untuk mengurangi kesalahan baca meter atau APP rusak dilakukan dengan cara:

1. Unit PLN harus segera mengganti APP yang rusak.
2. Unit PLN dapat menyediakan *stock* APP per Area sesuai kebutuhan untuk mengganti APP yang rusak.
3. Untuk memastikan agar angka stand APP mudah terbaca oleh petugas catat meter, maka Unit PLN dapat:
   a. Memindahkan APP dari dalam rumah Konsumen ke posisi luar rumah atas biaya PLN.

b. Mengganti...

b. Mengganti APP bila kaca APP sudah buram atau rusak.

c. Mengganti secara bertahap APP yang telah beroperasi di atas 10 (sepuluh) tahun.

4. Harus dipastikan agar rasio *Current Transformer* (CT)/*Potential Transformer* (PT) sesuai antara DIL dengan fisik di lapangan.

Bagian Keenam

Kerjasama Bisnis Dengan Konsumen

Pasal 11

Untuk mengatasi rendahnya pertumbuhan penjualan tenaga listrik khususnya di kelompok Industri dan Bisnis, terutama sebagai dampak dari adanya penyesuaian tarif tenaga listrik dan kecenderungan Konsumen dengan daya di atas 200 kVA memakai listrik dari pembangkit listrik sendiri, maka GM diberi kewenangan untuk melakukan:

1. Negosiasi dengan Konsumen berupa:
   a. Pemberian insentif harga di Luar Waktu Beban Puncak (LWBP), di mana persetujuan tarifnya ditetapkan oleh Direksi.
   b. Menjual listrik lebih murah pada kondisi pembangkitan berlimpah (musim-musim tertentu seperti musim hujan yang menyebabkan PLTA berlimpah, adanya ketentuan *take or pay* yang mengakibatkan pengurangan produksi pembangkit PLN yang biaya produksinya lebih rendah dari harga jual), dimana persetujuan tarifnya ditetapkan oleh Direksi.
   c. Insentif harga atas penambahan pemakaian dari pemakaian reguler, dimana persetujuan tarifnya ditetapkan oleh Direksi.
2. Negosiasi dengan Konsumen untuk memberi insentif dalam bentuk tambahan layanan, berupa:
   a. Kompensasi gratis layanan konsultasi teknis di internal Konsumen dengan prioritas tarif I-2, I-3, I-4 dan B-3.
   b. Bantuan konsultasi teknis dari PLN Pusat Penelitian dan Pengembangan Ketenagalistrikan bagi Konsumen Industri/Bisnis dengan biaya PLN apabila diperlukan.
3. GM dapat melakukan negosiasi untuk membeli listrik dari Konsumen yang memiliki pembangkit tenaga listrik dan menjualnya kembali kepada Konsumen tersebut dengan tarif Layanan Khusus (harga jual dari PLN kepada Konsumen di atas harga beli PLN dari Konsumen dapat di bawah tarif reguler), dengan besaran harga jual dari PLN kepada Konsumen harus mendapat persetujuan oleh Direksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketujuh

Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik Non Konsumen

Pasal 12

Tindak lanjut hasil Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) Non Konsumen dilakukan sebagai berikut :

1. Untuk mempermudah proses legalisasi Penerangan Jalan Umum (PJU) ilegal setelah ada kesepakatan dengan Pemerintah Daerah setempat, maka Unit PLN dapat melakukan:
   a. Legalisasi PJU ex pemasangan masyarakat yang instalasinya sudah terpasang, dapat dilayani dengan BP Rp0,- untuk layanan Prabayar.
   b. Legalisasi PJU ex pemasangan masyarakat yang instalasinya sudah terpasang, dapat dilayani dengan BP Rp.0,- dan JL diangsur maksimal 2 (dua) tahun dalam pembayaran tagihan listrik untuk layanan Reguler baik pola abonemen maupun menggunakan APP.
   c. Keamanan instalasi PJU ex pemasangan masyarakat menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
2. Unit PLN dapat memasang APP sistem prabayar untuk penggunaan khusus seperti pasar malam, pedagang kaki lima, kegiatan umum/sosial (lapangan olah raga), pos ronda atas nama PLN setempat (IDPEL PLN) dengan daya dibatasi maksimum 5500 VA dan dikenakan tarif Layanan Khusus TR dengan faktor pengali N=1.

Bagian...

Bagian Kedelapan

Pemantauan Potensi Pasar

Pasal 13

Pemantauan potensi pasar dilakukan dengan cara:

1. Melakukan promosi untuk mendorong penambahan daya terutama Konsumen bisnis dan industri yang memiliki jam nyala di atas 400 (empat ratus) jam per bulan.
2. Melakukan kemitraan dengan asosiasi Konsumen di daerah (antara lain asosiasi pertekstilan, asosiasi pengusaha, asosiasi pedagang kaki lima) guna memperoleh data potensi pasar yang secara cepat dan akurat dapat segera ditindaklanjuti untuk menjadi Konsumen.
3. Melakukan kemitraan dengan asosiasi kontraktor ketenagalistrikan guna memperoleh data potensi pasar secara berkala.
4. Melakukan kemitraan dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Daerah (badan perijinan daerah) guna memperoleh data perijinan baru yang telah diterbitkan khususnya untuk tarif Industri dan Bisnis.

BAB III

PENJUALAN TENAGA LISTRIK

DI DAERAH YANG MEMERLUKAN PENGENDALIAN PENJUALAN TENAGA LISTRIK

Bagian Kesatu

Pengendalian Pemakaian Tenaga Listrik

Pasal 14

Kriteria Pengendalian Penjualan Tenaga Listrik

Kriteria daerah yang memerlukan adanya pengendalian penjualan tenaga listrik adalah sebagai berikut:

1. Daerah dengan pembangkitan yang tidak memenuhi kriteria (n-1);
2. Daerah dengan pembebanan trafo tenaga telah mencapai rata-rata lebih dari 80% (delapan puluh persen); dan
3. Dalam hal penambahan penjualan tenaga listrik tidak ada golongan tarif dengan harga jual lebih tinggi dari biaya energi primer untuk memproduksi tenaga listrik (komponen C).

Pasal 15

Pengendalian pertumbuhan pemakaian tenaga listrik dilakukan dengan cara:

1. Memberi insentif kepada Konsumen Industri dan Bisnis dengan daya di atas 200 kVA yang bersedia dipadamkan pada WBP dan beralih menggunakan pembangkit sendiri. Insentif diberikan berupa diskon tarif untuk pemakaian listrik pada LWBP yang nilainya setara dengan selisih antara biaya bahan bakar produksi sendiri dengan harga listrik PLN pada WBP. Biaya yang diganti mengacu kepada jumlah energi listrik yang diproduksi genset milik Konsumen sebagai akibat berhentinya pasokan listrik PLN atas permintaan PLN. Program pemberian insentif ini diberikan kepada Konsumen setelah memenuhi ketentuan sebagai berikut :
   a. Secara administrasi ada kesepakatan tertulis antara PLN dengan Konsumen.
   b. Secara teknis telah dipasang APP elektronik pada keluaran genset yang dapat merekam angka stand APP produksi genset sebagai akibat berhentinya pasokan listrik PLN atas permintaan PLN.
   c. Perhitungan tarif yang digunakan untuk skema insentif ini ditetapkan oleh Direksi.
2. Dalam hal adanya permintaan PB/TD dengan daya di atas 200 kVA, GM hanya dapat melayani PB/TD Konsumen dengan tarif non subsidi untuk Konsumen yang bersedia memakai tenaga listrik pada LWBP.

3. PB/TD...

3. PB/TD harus disertai dengan upaya-upaya sosialisasi hemat energi dan langkah penghematan pemakaian listrik sehingga PB/TD dimaksud tidak meningkatkan beban puncak sistem setempat secara signifikan.

Bagian Kedua

Optimalisasi Kapasitas Sistem Pembangkitan

Pasal 16

Optimalisasi kapasitas sistem pembangkitan dilakukan dengan cara:

1. Melakukan PB/TD atau meningkatkan penjualan sepanjang ada peningkatan rasio total pendapatan terhadap biaya pokok produksi.
2. Melakukan negosiasi untuk membeli listrik dari Konsumen yang memiliki pembangkit tenaga listrik dan menjualnya kembali ke Konsumen tersebut dengan tarif Layanan Khusus (harga jual dari PLN kepada Konsumen di atas harga beli PLN dari Konsumen dapat di bawah tarif reguler), dengan besaran harga jual dari PLN kepada Konsumen harus mendapat persetujuan Direksi.
3. Menginformasikan kepada Calon Konsumen Industri untuk berinvestasi di daerah yang memenuhi kriteria peningkatan penjualan tenaga listrik.
4. Dalam hal PLN bekerjasama dengan mitra penyedia tenaga listrik non bahan bakar minyak dan penyedia tenaga listrik bertanggung jawab menyediakan jaringan untuk menyalurkan tenaga listrik ke sistem PLN, maka Unit PLN harus proaktif melakukan upaya-upaya mempercepat evakuasi daya dari pembangkit milik mitra antara lain membantu pembebasan lahan, berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah setempat, memberi masukan untuk mempercepat pembangunan jaringan.
5. Dalam hal pembangkit baru non bahan bakar minyak yang diperkirakan akan beroperasi dalam waktu kurang dari 6 (enam) bulan sehingga dimungkinkan menambah penjualan tenaga listrik, maka Unit PLN dapat membangun dan mempersiapkan penyaluran tenaga listrik kepada Calon Konsumen sehingga dapat menyala segera setelah pembangkit beroperasi.

Bagian Ketiga

Penyediaan Kapasitas Pembangkit

Pasal 17

(1) GM dapat melakukan kerjasama dengan Anak Perusahaan penyedia tenaga listrik dalam rangka menyediakan kapasitas pembangkit guna memenuhi permintaan listrik Calon Konsumen Industri besar atau kawasan industri dengan skema layanan *Business to Business* (B to B).

(2) GM proaktif mendorong pemanfaatan energi baru terbarukan (PLT Minihidro, PLT Biomasa dan PLT Biogas) untuk mengganti produksi listrik dari pembangkit yang menggunakan bahan bakar minyak.

Bagian Keempat

Sosialisasi Penghematan

Pasal 18

Sosialisasi hemat energi kepada Konsumen secara rutin dilakukan dengan cara:

1. Mengedukasi Konsumen dan masyarakat antara lain melalui sekolah, kantor dan perumahan tentang penggunaan listrik yang hemat dan tepat guna.
2. Mengedukasi Konsumen dan masyarakat untuk menggunakan sumber energi lain selain listrik untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti konversi penggunaan pemanas air listrik ke pemanas air gas atau pemanas air tenaga matahari.
3. Memberikan penghargaan bagi Konsumen yang peduli energi bersih (*Green Energy*) dan memanfaatkan energi matahari untuk penerangan baik di dalam maupun luar ruangan.

Bagian...

Bagian Kelima

Penjualan Tenaga Listrik Tarif Bersubsidi

Pasal 19

Pengendalian penjualan tenaga listrik untuk rumah tangga tarif R-1 dengan daya tersambung 450 VA dan 900 VA dilakukan dengan cara:

1. Melayani PB hanya bagi pemohon yang tidak mampu secara ekonomi yang dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu dari Kelurahan/Desa setempat.
2. Melayani penurunan daya menjadi 450 VA atau 900 VA hanya bagi pemohon yang tidak mampu secara ekonomi yang dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu dari Kelurahan/Desa setempat.
3. Mendorong pelanggan yang jam nyalanya mencapai 500 (lima ratus) jam per bulan atau lebih besar untuk melakukan penambahan daya. Dalam hal pelaksanaan proses penambahan daya tidak tersedia Alat Pembatas, Unit PLN diberi kewenangan untuk melakukan pengadaan Alat Pembatas.
4. TD menjadi 1300 VA atau lebih besar bagi Konsumen Reguler, BP dan JL dapat diangsur bersamaan dengan tagihan listrik paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak penyalaan TD. Khusus Konsumen Prabayar untuk TD menjadi 1300 VA atau lebih besar, maka BP dan kewajiban lainnya dapat dibayar secara angsuran paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak penyalaan TD.

Pasal 20

Pengendalian penjualan tenaga listrik bagi Konsumen dengan golongan tarif bersubsidi selain tarif R-1 daya 450 VA dan 900 VA dilakukan dengan cara:

1. Apabila dalam suatu sistem yang kapasitasnya terbatas ada pemohon PB/TD dari Konsumen/Calon Konsumen yang penggunaan listriknya produktif dan ada pemohon dari Konsumen/Calon Konsumen yang penggunaan listriknya konsumtif, maka Unit PLN memprioritaskan PB/TD untuk Konsumen/Calon Konsumen yang penggunaan listriknya produktif.
2. Apabila ada pemohon PB/TD golongan tarif bersubsidi selain tarif R-1 daya 450 VA dan 900 VA, maka Unit PLN memberi penjelasan kepada pemohon PB/TD terkait konsekuensi dari golongan tarif daya yang diminta dengan tujuan mengarahkan pemohon PB/TD memperoleh daya yang sesuai dan yang tidak bersubsidi. Jika sudah dipastikan tidak ada peluang untuk diarahkan ke golongan tarif yang tidak bersubsidi, maka permohonan PB/TD dapat dilayani.
3. Dalam hal Unit PLN harus melayani sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini, maka Unit PLN tersebut memprioritaskan PB/TD untuk besaran tarif yang lebih mendekati ke golongan tarif yang tidak bersubsidi.
4. Apabila ada permintaan penurunan daya menjadi 450 VA atau 900 VA, hanya dapat dilayani bagi pemohon PB/TD yang tidak mampu secara ekonomi yang dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu dari Kepala Desa/Lurah setempat kecuali untuk golongan tarif S-2 daya 450 VA dan S-2 daya 900 VA.

BAB IV

PELAPORAN

Pasal 21

Unit PLN melaporkan pelaksanaan atas Peraturan ini setiap semester kepada Kepala Divisi yang membidangi distribusi/operasi dan pelayanan pelayanan masing-masing Regional.

BAB V...

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 28 Agustus 2015

DIREKTUR UTAMA,



SOFYAN BASIR

Lampiran 4. Dokumentasi Penelitian



Wawancara dengan Bapak Saslizar selaku Manajer PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya Area Ciracas



Wawancara dengan Bapak Mohamat Emil Ferdian selaku Supervisor Pemasaran & Pelayanan Pelanggan PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya Area Ciracas



Wawancara dengan Bapak Suprapto selaku Pedagang Kaki Lima di wilayah kerja PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya Area Ciracas



Wawancara dengan Bapak Heri selaku Pedagang Kaki Lima di wilayah kerja PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya Area Ciracas



Meninjau Lokasi Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) Beji Lintar di Jl. Raya Centex No. 1



Meninjau Lokasi Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) Beji Lintar di Jl. TB Simatupang Tanah Merdeka

Lampiran 5. Curriculum Vitae

CURRICULUM VITAE



Nama	: Giovedi Wibisanna
Nomor Induk Mahasiswa	: 135030107113010
Tempat dan Tanggal Lahir	: Jakarta, 14 September 1995
Alamat Asal	: Komp TNI - AL, Jl. Teluk Mandar No. 66 RT. 003 / RW. 008, Pasar Minggu, Jakarta Selatan
Agama	: Islam
Nomor HP	: 081291311995
Email	: giovediwibisanna@gmail.com
Pendidikan	: 1. SD Yasporbi III Jakarta Tamat Tahun 2007 2. SMP Yasporbi II Jakarta Tamat Tahun 2010 3. SMA Negeri 39 Jakarta Tamat Tahun 2013